



Transformasi BPPK untuk Pembelajaran yang Adaptif dan Berdampak

The Transformation of BPPK for Adaptive and Impactful Learning

Laporan Tahunan
Annual Report
2025

Laporan Tahunan

Annual Report

2025

**Transformasi BPPK untuk Pembelajaran
yang Adaptif dan Berdampak**

*The Transformation of BPPK for Adaptive and
Impactful Learning*





Dwi Teguh Wibowo

Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
Acting Head of The Financial Education and Training Agency

Para stakeholders BPPK, para pemelajar, dan seluruh masyarakat Indonesia,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2025 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dapat terus melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal di tengah dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

Tahun 2025 ditandai dengan berlanjutnya ketidakpastian global akibat fragmentasi ekonomi dunia, tensi geopolitik yang belum sepenuhnya mereda, serta disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat, khususnya pada pemanfaatan kecerdasan artifisial dan transformasi digital di berbagai sektor. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap stabilitas perekonomian nasional serta dinamika pasar keuangan global. Namun demikian, perekonomian Indonesia

To the stakeholders of FETA, our learners, and the broader public,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

May goodness prevail.

We give thanks to God Almighty for His abundant grace and blessings, through which the Financial Education and Training Agency (FETA, or BPPK) was able to carry out its duties and functions optimally throughout 2025, amid an increasingly complex strategic environment.

The year 2025 was marked by continued global uncertainty stemming from world economic fragmentation, geopolitical tensions that had not fully subsided, and rapidly advancing technological disruption, particularly in the use of artificial intelligence and digital transformation across various sectors. These conditions placed pressure on national economic stability and on the dynamics of global financial markets. Nevertheless, Indonesia's economy continued to demonstrate

tetap menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan yang terjaga, inflasi yang relatif terkendali, serta stabilitas sistem keuangan yang tetap terpelihara berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati, terukur, dan responsif.

Dalam konteks tersebut, peran strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara menjadi semakin krusial. Kebijakan fiskal tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi, mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing nasional. Untuk itu, dukungan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berintegritas menjadi prasyarat utama. Di sinilah BPPK mengambil peran sebagai Corporate University Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai motor penggerak pembelajaran organisasi (Learning Organization).

Sepanjang tahun 2025, BPPK terus memperkuat ekosistem pembelajaran terintegrasi dengan mengoptimalkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran terstruktur (structured learning), pembelajaran sosial (social learning), serta pembelajaran berbasis pengalaman di tempat kerja (experiential learning). Transformasi digital pembelajaran terus ditingkatkan melalui pengembangan platform pembelajaran daring yang lebih interaktif, serta penguatan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan strategis para stakeholders.

Selain itu, BPPK juga memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi melalui optimalisasi Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System) guna memastikan retensi dan diseminasi aset intelektual organisasi berjalan secara sistematis, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh pegawai. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BPPK dalam membangun budaya berbagi pengetahuan.

Laporan Tahunan 2025 ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BPPK kepada para pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Laporan ini memuat informasi mengenai arah kebijakan dan strategi organisasi, capaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta berbagai inisiatif transformasi pembelajaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada BPPK. Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi kelembagaan, memperkuat tata kelola yang baik (good governance), serta menghadirkan layanan pembelajaran yang inovatif, relevan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi.

Semoga BPPK senantiasa mampu menjadi mitra strategis dan solusi pembelajaran dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

strong resilience, with steady growth, relatively controlled inflation, and financial system stability that was maintained through careful, measured, and responsive synergy between fiscal and monetary policy.

In this context, the strategic role of the Ministry of Finance (MoF) as the manager of state fiscal policy has become increasingly crucial. Fiscal policy is required not only to safeguard stability, but also to drive economic transformation, accelerate inclusive and sustainable development, and strengthen national competitiveness. To this end, support from a superior, adaptive, and high-integrity workforce is a key prerequisite. This is where FETA takes on its role as the MoF's Corporate University, serving as the driving force behind organizational learning (the Learning Organization).

Throughout 2025, FETA continued to strengthen its integrated learning ecosystem by optimizing self-learning, structured learning, social learning, and experiential learning. Digital learning transformation continued to advance through the development of more interactive online learning platforms, as well as the strengthening of curricula aligned with the strategic needs of its stakeholders.

In addition, FETA also strengthened the management of organizational knowledge by optimizing its Knowledge Management System to ensure that the retention and dissemination of the organization's intellectual assets proceed in a systematic, structured manner that is easily accessible to all employees. This effort is part of FETA's commitment to building a culture of knowledge sharing.

This 2025 Annual Report has been prepared as a manifestation of FETA's transparency and accountability to its stakeholders and service users. This report contains information on the organization's policy direction and strategy, performance achievements, resource management, and the various learning transformation initiatives carried out throughout 2025.

We extend our deepest appreciation and gratitude for the trust and support given to FETA. We are committed to continuing institutional transformation, strengthening good governance, and delivering learning services that are innovative, relevant, and have a tangible impact on improving organizational performance.

May FETA always be able to serve as a strategic partner and learning solution in supporting the professional, accountable, and sustainable management of state finances, in order to realize an advanced and prosperous Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.





Daftar Isi

Table Of Content

BAB 1

KILAS KINERJA 2025

2025 PERFORMANCE OVERVIEW

- 11 **Arah Kebijakan dan Strategi 2025-2029**
Policy Directions and Strategies 2025-2029
- 16 **Pengelolaan Kinerja Organisasi**
Organizational Performance Management
- 21 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlights
- 21 **BPPK dalam Angka**
FETA in Figures
- 23 **Peristiwa Penting**
Key Milestones
- 41 **Penghargaan BPPK**
FETA Awards

BAB 2

SEJARAH BPPK

FETA PROFILE

- 45 **Visi, Misi dan Tata Nilai**
Vision, Mission, and Values
- 46 **Sejarah BPPK**
History of FETA
- 48 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure
- 49 **Profil Pejabat**
Profiles of Officials

BAB 3

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

- 56 **Profil Sumber Daya Manusia**
Human Resources Profile
- 59 **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**
Human Resources Management

BAB 4

ANALISIS KINERJA

PERFORMANCE ANALYSIS

- 63 **Perumusan Kebijakan Pembelajaran**
Learning Policy Reformation
- 63 **Pengelolaan Pembelajaran Keuangan Negara**
Management OF State-Finance Learning
- 81 **Pengelolaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara**
Management of Competency Testing and Certification in State Finance
- 84 **Pengelolaan Akreditasi**
Accreditation Management
- 86 **Pengelolaan Beasiswa Kementerian Keuangan**
Ministry of Finance Scholarship Management
- 90 **Pelaksanaan Penjamin Mutu Pembelajaran**
Implementation of Learning Quality Assurance
- 91 **Pengelolaan Tes Non Jabatan Fungsional**
Management of Non-Functional Position Tests
- 94 **Pendidikan Vokasi Politeknik Keuangan Negara STAN**
Vocational Education at the Polytechnic of State Finance STAN (PKN STAN)
- 99 **Learning Organization**
Learning Organization
- 99 **Knowledge Management**
Knowledge Management
- 100 **Whistle Blowing System**
Whistle Blowing System
- 101 **Keterbukaan Informasi Publik**
Public Information Disclosure

BAB 5

KEMITRAAN STRATEGIS

STRATEGIC PARTNERSHIPS

- 105 **Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding**
Memorandum of Understanding (MoU)







BAB 1

KILAS KINERJA 2025

*2025 PERFORMANCE
OVERVIEW*

Arah Kebijakan dan Strategi 2025-2029

Policy Directions and Strategies 2025-2029

1.1

Rencana Strategis (renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L). Dalam rangka mendukung tujuan kelima Kementerian Keuangan, pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional, BPPK menetapkan 23 (dua puluh tiga) Arah Kebijakan (AK) dan Strategi untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **AK Pendidikan bereputasi unggul dan bertaraf internasional.**
Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor satu ini adalah:
 - a. Pelaksanaan transformasi kelembagaan PKN STAN untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan memiliki kapabilitas tinggi.
 - b. Transformasi kurikulum, metode, dan media pembelajaran PKN STAN dalam rangka meningkatkan link-and-match dengan dunia kerja serta selaras dengan minat dan kebutuhan pemelajar.
 - c. Pembukaan program studi Magister Terapan di bidang keuangan negara untuk mencetak calon pemimpin dan agen perubahan pengelola keuangan negara.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi di bidang keuangan negara melalui pengajuan dan perolehan akreditasi nasional yang unggul.
 - e. Intensifikasi kegiatan tridharma perguruan tinggi bertaraf internasional.
 - f. Transformasi dosen PKN STAN menuju penguatan kapabilitas secara unggul dan bertaraf internasional.

The Strategic Plan (Renstra) is a medium-term planning document encompassing the vision, mission, objectives, strategies, policies, programs, and activities of ministries/agencies (K/L). In support of the fifth objective of the Ministry of Finance (MoF)—namely, the management of organizational resources and information technology within the framework of the Kemenkeu Satu (One Ministry of Finance, or One MoF) culture, which drives the acceleration of national bureaucratic transformation—the FETA has established 23 (twenty-three) Policy Directions (PD) and Strategies for 2025-2029 as follows:

1. *PD Education of Excellent Reputation and International Standard.*
FETA's strategies to realize Policy Direction number one are as follows:
 - a. *Implementation of the institutional transformation of the Polytechnic of State Finance STAN (PKN STAN) to build an adaptive organization with high capability.*
 - b. *Transformation of PKN STAN's curriculum, instructional methods, and learning media to strengthen link-and-match with the world of work and alignment with learners' interests and needs.*
 - c. *Launch of an Applied Master's Program in public finance to produce future leaders and agents of change in public financial management.*
 - d. *Enhancement of vocational education quality in the field of state finance through the pursuit and attainment of excellent national accreditation.*
 - e. *Intensification of Tridharma (Three Pillars of Higher Education) activities at the international level.*
 - f. *Transformation of PKN STAN lecturers toward the strengthening of capabilities at an excellent and international standard.*

- g. Penyempurnaan tata kelola dan manajemen talenta dosen PKN STAN dalam rangka peningkatan motivasi dan kinerja dosen.
- h. Penguatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, dan/atau institusi internasional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- i. Optimalisasi tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) di antara melalui diferensiasi layanan dan penguatan reputasi (branding) PKN STAN.
- j. Peningkatan kontribusi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) terhadap kualitas dan/atau kuantitas layanan PKN STAN.

2. **AK Pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter, mental, budaya, serta kepemimpinan yang aplikatif bagi mahasiswa PKN STAN.**
Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor dua ini adalah Pembangunan karakter, mental dan budaya, serta kepemimpinan secara teoritikal dan praktikal bagi mahasiswa PKN STAN sebagai calon pemimpin dan agen perubahan yang agile dan berintegritas.
3. **AK Pendidikan yang inklusif.**
Strategi yang dilakukan BPPK dalam mewujudkan AK nomor tiga ini adalah:
 - a. Perluasan akses pendidikan di bidang keuangan negara dan sektor keuangan melalui penerimaan jalur pembibitan, afirmasi kewilayahan, afirmasi prestasi, afirmasi sekolah keagamaan, dan/atau afirmasi lainnya.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan PKN STAN yang inklusif seperti dengan menyediakan academic coaching clinic dan learning buddy.
 - c. Peningkatan dampak positif program pengabdian masyarakat yang inklusif dan selaras dengan PN dan isu strategis Kemenkeu, di antaranya melalui pengembangan kompetensi dan/atau pemberian fasilitasi bagi

- g. *Improvement of governance and talent management for PKN STAN lecturers to enhance lecturer motivation and performance.*
- h. *Strengthening of cooperation with international organizations, agencies, and/or institutions in the implementation of the Three Pillars of Higher Education.*
- i. *Optimization of Public Service Agency (BLU) governance, including through service differentiation and reputation strengthening (branding) of PKN STAN.*
- j. *Increase in the Public Service Agency (BLU) revenue contribution to the quality and/or quantity of PKN STAN services.*

2. *PD Education Oriented toward the Development of Character, Mentality, Culture, and Applied Leadership for PKN STAN Students.*
FETA's strategy to realize Policy Direction number two is the theoretical and practical development of character, mentality and culture, as well as leadership for PKN STAN students as future leaders and agents of change who are agile and possess integrity.
3. *PD Inclusive Education.*
The strategies undertaken by FETA to realize Policy Direction number three are as follows:
 - a. *Expansion of access to education in the field of state finance and the financial sector through talent seeding pathways, regional affirmation, achievement-based affirmation, religious school affirmation, and/or other affirmation schemes.*
 - b. *Delivery of inclusive PKN STAN education, including through the provision of an academic coaching clinic and a learning buddy.*
 - c. *Enhancement of the positive impact of inclusive community service programs aligned with national priorities and the MoF's strategic issues, including through competency development and/or facilitation for Micro, Small,*

- UMKM, koperasi, kaum rentan, komunitas marginal, lembaga keagamaan, masyarakat, desa, dan lembaga lainnya.
- d. Kolaborasi program pengabdian masyarakat dengan institusi/ organisasi yang kredibel serta partner/client bertaraf internasional secara berkelanjutan sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - e. Peningkatan kapabilitas civitas akademika PKN STAN dan dan pemberian fasilitas untuk menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang kontributif.
4. **AK Pengelolaan tugas belajar yang efektif dan tepat sasaran.**
Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor empat ini adalah:
- a. Optimalisasi kemitraan strategis dalam kerja sama penyediaan pendidikan bagi pegawai Kementerian Keu
 - b. Penguatan program beasiswa bagi pegawai Kementerian Keuangan.
 - c. Penguatan tata kelola dan dukungan IT dalam rangka peningkatan kualitas layanan pengelolaan tugas belajar dan pemberdayaan alumni.
5. **AK Program pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang responsif.**
Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor lima ini adalah:
- a. Pelaksanaan AKP Tematik dan Lintas Fungsi sesuai dengan perkembangan isu strategis terkini dan kebutuhan pengembangan karier dan manajemen talenta.
 - b. Penyusunan piloting learning dan career paths bagi mitra kerja Unit Eselon I/LNSW dan/atau jabatan tertentu dari masing-masing Pusdiklat
 - c. Penyusunan desain, materi, dan

- and Medium Enterprises (MSMEs), cooperatives, vulnerable groups, marginalized communities, religious institutions, communities, villages, and other entities.*
- d. *Collaboration on community service programs with credible institutions/organizations and international-level partners/clients on a sustained basis in accordance with needs analysis.*
 - e. *Enhancement of PKN STAN's academic community capabilities and the provision of facilities to organize contributive community service programs.*
4. *PD Effective and Targeted Study Assignment Management. FETA's strategies to realize Policy Direction number four are as follows:*
- a. *Optimization of strategic partnerships in the provision of education for MoF employees.*
 - b. *Strengthening of scholarship programs for MoF employees.*
 - c. *Strengthening of governance and IT support to improve the quality of study assignment management services and alumni empowerment.*
5. *PD Responsive Thematic and Cross-Functional Learning Programs. FETA's strategies to realize Policy Direction number five are as follows:*
- a. *Implementation of Thematic and Cross-Functional Training Needs Analysis (TNA, or AKP) in accordance with the latest strategic issue developments and career development and talent management needs.*
 - b. *Development of piloting learning and career paths for partner work units of Echelon I Units/Indonesia National Single Window Agency (LNSW) and/or specific positions from each Center for Education and Training (Pusdiklat).*

- evaluasi pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang sesuai dengan kebutuhan strategis terkini dan tepat sasaran.
- d. Pengimplementasian pembelajaran tematik dan lintas fungsi yang interaktif dan kolaboratif.
 - e. Penguatan kapasitas pengajar program pembelajaran tematik dan lintas fungsi.
 - f. Penguatan kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, lembaga internasional, dan institusi lainnya dalam rangka pembelajaran dan fungsi strategis lain sesuai kebutuhan.
6. **AK Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter, mental, budaya, serta kepemimpinan yang aplikatif bagi SDM pengelola keuangan negara.**
Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor enam ini adalah:
- a. Penguatan karakter, mental dan budaya, serta kepemimpinan secara teoritikal dan praktikal bagi SDM pengelolaan keuangan negara sebagai pemimpin yang risk taker, predence, accountable, dan responsible serta menerapkan core value ASN.
 - b. Pembangunan dan pengembangan Kemenkeu Leaders Academy (KLA).
7. **AK Edukasi di bidang keuangan negara yang kontributif, kolaboratif, dan mudah diakses.**
Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor tujuh ini adalah:
- a. Perluasan edukasi di bidang keuangan negara yang mudah diakses dan sesuai dengan isu strategis dan program prioritas nasional dan/atau Kemenkeu.
 - b. Penyediaan program edukasi di bidang keuangan negara yang dapat diikuti oleh SDM Pengelola Keuangan Negara dan kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

- c. *Development of design, content, and evaluation of thematic and cross-functional learning that is aligned with the latest strategic needs and accurately targeted.*
 - d. *Implementation of interactive and collaborative thematic and cross-functional learning.*
 - e. *Strengthening of the capacity of instructors for thematic and cross-functional learning programs.*
 - f. *Strengthening of strategic partnerships with central and regional government agencies, academics, the private sector, international institutions, and other entities for learning purposes and other strategic functions as needed.*
6. *PD Learning Oriented toward the Strengthening and Development of Character, Mentality, Culture, and Applied Leadership for State Finance Management Human Resources. FETA's strategies to realize Policy Direction number six are as follows:*
- a. *Strengthening of character, mentality and culture, as well as theoretical and practical leadership for state finance management human resources as leaders who are risk-takers, prudent, accountable, and responsible, and who apply the core values of the State Civil Apparatus (ASN).*
 - b. *Establishment and development of the MoF Leaders Academy (KLA).*
7. *PD Contributive, Collaborative, and Accessible Education in the Field of State Finance. FETA's strategies to realize Policy Direction number seven are as follows:*
- a. *Expansion of easily accessible education in the field of state finance that aligns with strategic issues and national priority programs and/or those of the MoF.*
 - b. *Provision of education programs in the field of state finance that can be attended by State Finance Management Human Resources and community groups in accordance with their needs.*

8. AK Pembelajaran di bidang keuangan negara dan sektor keuangan yang inklusif.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor delapan ini adalah:

- Penyediaan alokasi bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (KLDI) untuk dapat mengirimkan peserta program pembelajaran di bidang keuangan negara secara proporsional dan tepat sasaran.
- Penyediaan program pembelajaran klasikal dan digital (e-learning, open access learning, micro learning, webinar, dan program pembelajaran digital lainnya) di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, serta bidang prioritas lainnya yang dapat diikuti oleh SDM Pengelola Keuangan KLDI, dan kelompok masyarakat secara lebih masif dan fleksibel.
- Pembentukan dan pengembangan Kemenkeu Center.

9. AK Tata kelola Kemenkeu Corporate University yang unggul dan bertaraf internasional.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor sembilan ini adalah:

- Penguatan pengelolaan strategi dan tata kelola Kemenkeu Corporate University dalam rangka menyesuaikan dengan kerangka organisasi dan kebutuhan terkini.
- Optimalisasi peran organisasi dalam pengelolaan strategi Kemenkeu Corporate University untuk meningkatkan alignment antara pembelajaran dengan kinerja.

10. AK Implementasi organisasi pembelajar (learning organization) yang matang. Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor sepuluh ini adalah:

8. PD Inclusive Learning in the Field of State Finance and the Financial Sector.

FETA's strategies to realize Policy Direction number eight are as follows:

- Provision of allocations for Ministries/Agencies/Regional Government Work Units/ Institutions (KLDI) to send participants to state finance learning programs in a proportional and well-targeted manner.*
- Provision of classroom and digital learning programs (e-learning, open access learning, micro learning, webinars, and other digital learning programs) in the field of state finance and the financial sector, as well as other priority fields, which can be accessed by KLDI's State Finance Management Human Resources and community groups more broadly and flexibly.*
- Establishment and development of the MoF Center (Kemenkeu Center).*

9. PD Excellent and International-Standard Governance of the MoF Corporate University.

FETA's strategies to realize Policy Direction number nine are as follows:

- Strengthening of strategy management and governance of the MoF Corporate University to align with the current organizational framework and needs.*
- Optimization of the organizational role in managing the strategy of the MoF Corporate University to improve alignment between learning and performance.*

10. PD Mature Implementation of a Learning Organization.
FETA's strategies to realize Policy Direction number ten are as follows:

- Penguatan budaya belajar Kemenkeu dengan mendorong inisiatif individu dan organisasi untuk terus melakukan pengembangan kompetensi menuju learning organization.
- Pemantauan dan evaluasi implementasi organisasi pembelajar secara berkelanjutan.

11. AK Pembelajaran terintegrasi yang berdampak tinggi.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor sebelas ini adalah:

- Penguatan metode pembelajaran yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi teknologi digital dan artificial intelligence.
- Penguatan dalam pengukuran dampak pembelajaran terhadap kinerja pegawai maupun organisasi.
- Penyediaan pembelajaran yang kreatif dengan memanfaatkan teknologi terkini yang membahas isu aktual di bidang keuangan negara dan sektor keuangan.
- Penyempurnaan tata kelola dan penjaminan mutu pembelajaran berbasis dukungan teknologi informasi yang andal.

12. AK Sertifikasi dan/atau uji kompetensi di bidang keuangan negara dan sektor keuangan yang andal.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor dua belas ini adalah:

- Penguatan infrastruktur, regulasi, dan tata kelola sertifikasi dan uji kompetensi bagi pengelola keuangan negara.
- Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi bagi pengelola keuangan negara secara masif baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun KLDI.
- Penyiapan infrastruktur, regulasi, dan tata kelola pemberian akreditasi bagi KLDI untuk dapat melaksanakan sertifikasi/uji kompetensi di bidang keuangan negara secara mandiri.
- Penguatan regulasi dan tata kelola termasuk standar pelayanan sertifikasi/uji kompetensi di

- Strengthening of the MoF's learning culture by encouraging individual and organizational initiatives to continuously pursue competency development toward a learning organization.*
- Continuous monitoring and evaluation of the implementation of the learning organization.*

11. PD High-Impact Integrated Learning.
FETA's strategies to realize Policy Direction number eleven are as follows:

- Strengthening of inclusive, creative, and sustainable learning methods through the optimization of digital technology and artificial intelligence.*
- Strengthening of the measurement of learning impact on employee and organizational performance.*
- Provision of creative learning that leverages the latest technology to address current issues in the field of state finance and the financial sector.*
- Improvement of learning governance and quality assurance underpinned by reliable information technology support.*

12. PD Reliable Certification and/or Competency Testing in the Field of State Finance and the Financial Sector.

FETA's strategies to realize Policy Direction number twelve are as follows:

- Strengthening of infrastructure, regulations, and governance of certification and competency testing for state finance managers.*
- Large-scale implementation of certification and competency testing for state finance managers, both within the MoF and KLDI.*
- Preparation of infrastructure, regulations, and governance for granting accreditation to KLDI to independently conduct certification/competency testing in the field of state finance.*
- Strengthening of regulations and governance, including service standards for certification/*



bidang keuangan negara yang digunakan untuk menunjang profesi kelompok masyarakat yang berkaitan dengan keuangan negara.

- e. Penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi di bidang keuangan negara yang digunakan untuk menunjang profesi kelompok masyarakat yang berkaitan dengan keuangan negara secara profesional dan kredibel.
- f. Penyusunan instrumen pengukuran kompetensi yang valid dan reliabel.

13. AK Akreditasi program pelatihan di bidang keuangan negara yang kredibel.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor tiga belas ini adalah:

- a. Penguatan kebijakan dan tata kelola akreditasi program pembelajaran di bidang keuangan negara yang fit-for-purpose.
- b. Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan, dan asistensi bagi KLDI untuk meningkatkan minat bagi KLDI agar memanfaatkan Akreditasi Program Pembelajaran di Bidang Keuangan Negara dalam mendukung penguatan kompetensi SDM.

14. AK Lembaga sertifikasi profesi yang profesional.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor empat belas ini adalah Pembentukan dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

15. AK Pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang profesional dan adaptif.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor lima belas ini adalah:

competency testing in the field of state finance, used to support the professions of community groups related to state finance.

- e. *Professional and credible delivery of certification/competency testing in the field of state finance that is used to support the professions of community groups related to state finance.*
- f. *Development of valid and reliable competency measurement instruments.*

13. PD Credible Accreditation of Training Programs in the Field of State Finance.

FETA's strategies to realize Policy Direction number thirteen are as follows:

- a. *Strengthening of policies and governance of learning program accreditation in the field of state finance that is fit-for-purpose.*
- b. *Delivery of socialization, guidance, and assistance for KLDI to increase their interest in utilizing the Accreditation of Learning Programs in the Field of State Finance to support the strengthening of human resource competencies.*

14. PD A Professional Certification Authority (LSP).

FETA's strategy to realize Policy Direction number fourteen is the establishment and development of a Professional Certification Authority (LSP) licensed by the National Professional Certification Agency (BNSP).

15. PD Professional and Adaptive Development of State Finance Functional Positions.

FETA's strategies to realize Policy Direction number fifteen are as follows:

- a. Penyiapan dan penguatan kebijakan, tata kelola, dan infrastruktur pembinaan Jabatan Fungsional Keuangan Negara (JFKN) yang mendorong optimalisasi peranan dan peningkatan kualitas hasil kerja.
- b. Penguatan kelembagaan pelaksanaan fungsi pembinaan JFKN melalui pembentukan Unit Kerja khusus setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- c. Pengembangan Sistem Informasi yang agile dan adaptif untuk menunjang pelaksanaan fungsi pembinaan JFKN.
- d. Pemetaan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.
- e. Pembentukan dan pengelolaan forum pengetahuan JFKN untuk mendorong terciptanya ekosistem JFKN yang solutif dan kontributif.
- f. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik profesi JFKN untuk mewujudkan SDM JFKN yang profesional.
- g. Pemenuhan kebutuhan SDM yang menjalankan fungsi pembinaan JFKN dengan SDM yang memiliki kompetensi teknis yang mumpuni melalui mutasi antar unit eselon I (MAUEI) serta pengembangan kapasitas SDM Internal.
- h. Penyusunan, pengembangan, dan penerapan Learning Path JFKN dan Learning Path kompetensi manajerial dengan melibatkan stakeholder terkait.

16. AK Penelitian yang kontributif dan selaras dengan strategi Kemenkeu.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor enam belas ini adalah:

- a. Peningkatan research-based policy dengan mengembangkan penelitian yang memprioritaskan isu strategis Kemenkeu.
- b. Optimalisasi penelitian yang memberikan kontribusi akademis dan/atau praktis di bidang keuangan negara.

- a. *Preparation and strengthening of policies, governance, and infrastructure for the development of State Finance Functional Positions (JFKN) to drive the optimization of roles and the improvement of work quality.*
- b. *Strengthening of the institutional capacity for the JFKN development function through the establishment of a dedicated work unit at the level of Junior High-Level Leadership Position (JPT Pratama).*
- c. *Development of an agile and adaptive Information System to support the implementation of the JFKN development function.*
- d. *Competency mapping, implementation of competency development, and monitoring and evaluation of competency development.*
- e. *Establishment and management of a JFKN knowledge forum to foster the creation of a solution-oriented and contributive JFKN ecosystem.*
- f. *Facilitation of the establishment of a professional organization and the drafting of a professional code of ethics for JFKN to realize professional JFKN human resources.*
- g. *Fulfillment of human resource needs for those performing the JFKN development function with personnel possessing strong technical competencies, through Inter-Echelon I Unit Transfers (MAUEI) and internal human resource capacity development.*
- h. *Formulation, development, and implementation of the Learning Path for JFKN and the Learning Path for managerial competency, involving relevant stakeholders.*

16. PD Contributive Research Aligned with the Ministry of Finance's Strategy.

FETA's strategies to realize Policy Direction number sixteen are as follows:

- a. *Enhancement of research-based policy by developing research that prioritizes the MoF's strategic issues.*

- c. Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitasi penelitian yang kontributif dan selaras dengan strategi Kemenkeu.
- d. Peningkatan penelitian kolaboratif dengan institusi/organisasi yang kredibel dan bertaraf internasional.
- e. Penguatan publikasi penelitian BPPK pada jurnal nasional/internasional yang bereputasi baik.
- f. Penyediaan sarana/media publikasi penelitian dengan tata kelola dan reputasi yang baik, serta memiliki kebijakan copyright sesuai standar.

17. AK Manajemen pengetahuan yang andal.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor tujuh belas ini adalah:

- a. Penyusunan dan implementasi roadmap/cetak biru manajemen pengetahuan untuk jangka menengah.
- b. Penyempurnaan tata kelola manajemen pengetahuan yang inovatif.
- c. Identifikasi pengetahuan di bidang keuangan negara yang link and match dengan kebutuhan dan minat pengguna.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aset intelektual yang inovatif dengan dukungan teknologi informasi manajemen pengetahuan yang andal.
- e. Pengorganisasian pengetahuan yang sistematis dan terstandar.
- f. Pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan yang mudah diakses, menarik, dan terpercaya, dengan optimalisasi penggunaan artificial intelligence.
- g. Pemanfaatan aset intelektual sebagai solusi permasalahan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- h. Pemantauan aset intelektual yang berkelanjutan.

- b. *Optimization of research that contributes academically and/or practically to the field of state finance.*
- c. *Enhancement of human resource competency and facilitation of research that is contributive and aligned with the MoF's strategy.*
- d. *Increase in collaborative research with credible and internationally reputed institutions/organizations.*
- e. *Strengthening of FETA research publications in well-reputed national/international journals.*
- f. *Provision of research publication channels/media with good governance and reputation, as well as a copyright policy in accordance with established standards.*

17. PD Reliable Knowledge Management.
FETA's strategies to realize Policy Direction number seventeen are as follows:

- a. *Formulation and implementation of a roadmap/blueprint for knowledge management for the medium term.*
- b. *Improvement of innovative knowledge management governance.*
- c. *Identification of knowledge in the field of state finance that is link and match with user needs and interests.*
- d. *Enhancement of the quality and quantity of innovative intellectual assets with the support of reliable knowledge management information technology.*
- e. *Systematic and standardized organization of knowledge.*
- f. *Development of a MoF knowledge management system that is accessible, engaging, and trustworthy, with the optimization of artificial intelligence.*
- g. *Utilization of intellectual assets as solutions to problems and to accelerate work completion.*
- h. *Continuous monitoring of intellectual assets.*

- i. Peningkatan kapasitas SDM pengelola manajemen pengetahuan dan SDM penjamin kualitas aset intelektual.
- j. Penyusunan kebijakan dan tata kelola Community of Practices (CoP).
- k. Pengembangan dan pengelolaan Community of Practices prioritas Kemenkeu.

18. AK Komunikasi publik dan kemitraan strategis yang efektif dan inklusif.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor delapan belas ini adalah:

- a. Implementasi strategi komunikasi yang efektif dan inklusif dalam membangun citra BPPK dan Kemenkeu yang positif.
- b. Pengelolaan informasi publik yang transparan dan efektif dalam memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.
- c. Penguatan kemitraan strategis yang inklusif dengan institusi dalam dan luar negeri yang berdampak bagi peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), pembelajaran, sertifikasi/uji kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan manajemen pengetahuan di bidang keuangan negara

19. AK Pengelolaan organisasi dan budaya yang adaptif.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor sembilan belas ini adalah:

- a. Penataan organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang agile dan adaptif.
- b. Penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan core value ASN.

20. AK Pengelolaan SDM yang humanis dan efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor dua puluh ini adalah:

- i. *Enhancement of the capacity of human resources managing knowledge management and those responsible for intellectual asset quality assurance.*
- j. *Formulation of policies and governance for Communities of Practice (CoP).*
- k. *Development and management of the MoF priority Communities of Practice.*

18. PD Effective and Inclusive Public Communication and Strategic Partnerships.

FETA's strategies to realize Policy Direction number eighteen are as follows:

- a. *Implementation of effective and inclusive communication strategies to build a positive image of FETA and the MoF.*
- b. *Transparent and effective management of public information to strengthen relationships with stakeholders.*
- c. *Strengthening of inclusive strategic partnerships with domestic and international institutions that contribute to improving the quality of the Three Pillars of Higher Education (Tridharma) — education, research, and community service — learning, certification/competency testing, functional position development, and knowledge management in the field of state finance.*

19. PD Adaptive Organizational and Cultural Management.

FETA's strategies to realize Policy Direction number nineteen are as follows:

- a. *Organizational restructuring to realize an agile and adaptive organization.*
- b. *Strengthening of organizational culture oriented toward the values of the MoF and the core values of the State Civil Apparatus.*

20. PD Humane and Effective Human Resource Management to Enhance Organizational Performance.

- a. Pengelolaan SDM yang humanis dan efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Pengembangan learning path yang mendukung pengembangan kompetensi SDM.

21. AK Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal dan akuntabel.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor dua puluh satu ini adalah:

- a. Pengelolaan keuangan yang berkualitas, adaptif, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.
- b. Pengelolaan BMN yang optimal dan akuntabel dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengelolaan BMN yang optimal dan akuntabel ini dilakukan dengan mewujudkan sarana dan prasarana yang responsif gender dengan mengadopsi teknologi informasi termutakhir untuk pembelajaran yang efektif dan efisien.

22. AK Pengawasan dan pengendalian internal yang andal, transparan, dan berkeadilan.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor dua puluh dua ini adalah:

- a. Penguatan peran Unit Kepatuhan Internal melalui institusionalisasi yang efektif dan desain tata kelola yang optimal untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- b. Penguatan SDM UKI secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan kompetensi, pola mutasi, dan manajemen talenta sehingga mampu merumuskan efektivitas dan efisiensi operasi, perbaikan proses bisnis, peningkatan kualitas dan kuantitas output, serta peningkatan compliance.

FETA's strategies to realize Policy Direction number twenty are as follows:

- a. *Humane and effective management of human resources to enhance organizational performance.*
- b. *Development of a learning path that supports human resource competency development.*

21. PD Optimal and Accountable Financial and State-Owned Asset (BMN) Management.

FETA's strategies to realize Policy Direction number twenty-one are as follows:

- a. *High-quality, adaptive financial management with high accountability.*
- b. *Optimal and accountable State-Owned Asset (BMN) management to support the implementation of duties and functions. This optimal and accountable BMN management is carried out by realizing gender-responsive facilities and infrastructure, adopting the latest information technology for effective and efficient learning.*

22. PD Reliable, Transparent, and Equitable Internal Oversight and Control.

FETA's strategies to realize Policy Direction number twenty-two are as follows:

- a. *Strengthening of the role of the Internal Compliance Unit (UKI) through effective institutionalization and optimal governance design to provide adequate certainty (reasonable assurance) toward the achievement of organizational objectives.*
- b. *Continuous strengthening of Internal Compliance Unit (UKI) human resources by considering competency, transfer patterns, and talent management, thereby enabling the formulation of*

23. AK Penerapan teknologi digital yang tepat guna.

Strategi BPPK dalam mewujudkan AK nomor dua puluh tiga ini adalah:

- a. Penyelenggaraan layanan akademik dan non akademik PKN STAN yang berbasis teknologi tepat guna.
- b. Penyediaan layanan pencarian dan rekomendasi pembelajaran sesuai kebutuhan pengguna berbasis teknologi artificial intelligence.
- c. Penyelenggaraan layanan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara serta sertifikasi dan uji kompetensi yang menggunakan teknologi tepat guna.
- d. Penyelenggaraan layanan pembelajaran melalui penyempurnaan Kemenkeu Learning Center (KLC) yang berbasis teknologi tepat guna.
- e. Pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi digital secara berkelanjutan.

operational effectiveness and efficiency, business process improvements, and enhancement of the quality and quantity of output, as well as improvement of compliance.

23. PD Appropriate Application of Digital Technology.

FETA's strategies to realize Policy Direction number twenty-three are as follows:

- a. *Delivery of PKN STAN academic and non-academic services based on appropriate technology.*
- b. *Provision of learning search and recommendation services tailored to user needs, based on artificial intelligence technology.*
- c. *Delivery of functional position development services in the field of state finance, as well as certification and competency testing services utilizing appropriate technology.*
- d. *Delivery of learning services through the improvement of the MoF Learning Center (KLC) based on appropriate technology.*
- e. *Continuous monitoring and evaluation of digital technology application.*



Pengelolaan Kinerja Organisasi

Organizational Performance Management

1.2

BPPK telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) sejak tahun 2007. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan BPPK meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, reviu dan penyempurnaan komitmen kinerja. Detil tahapan pengelolaan kinerja tahun 2025 sebagai berikut.

Refinement PERJANJIAN Kinerja Kemenkeu-One BPPK

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja dan risiko BPPK diawali dengan pelaksanaan reviu atas Perjanjian Kinerja (PK) dan Piagam Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan PK dan Piagam MR Tahun 2025.

Proses Refinement Kinerja dan Risiko ini telah dimulai sejak triwulan IV tahun 2024 yang ditandai dengan penyampaian Nota Dinas (ND) Sekretaris BPPK nomor ND-4146/PP.1/2024 perihal Penyampaian Kebijakan Refinement Kinerja dan Permintaan Masukan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One-Two-Three BPPK 2024. Dalam rangka refinement kinerja dan risiko tersebut dilakukan pembahasan dengan unit-unit kerja di BPPK sebagaimana berikut.

- Refinement K-One BPPK dilakukan tanggal 21 November 2024;
- Refinement K- Two Setban dilakukan tanggal 25 November 2024;
- Refinement K-Two Pusdiklat Tematik dilakukan tanggal 26 November 2024;
- Refinement Kemenkeu-Three BDK dilaksanakan tanggal 2 Desember 2024;

FETA has implemented a performance management system based on the balanced scorecard (BSC) since 2007. In general, performance management within FETA encompasses all stages of strategy execution, namely planning, implementation, monitoring and evaluation of performance, and review and refinement of performance commitments. The details of the 2025 performance management stages are as follows.

REFINEMENT OF THE MOF-ONE FETA PERFORMANCE AGREEMENT

The planning stage of FETA's performance and risk management begins with the review of the Performance Agreement (PK) and Risk Management (MR) Charter for the Year 2024. The follow-up to the results of this review is the refinement and updating of the Performance Agreement and Risk Management Charter for the Year 2025.

The Performance and Risk Refinement Process was initiated in the fourth quarter of 2024, marked by the submission of Official Memorandum (OM) from the Secretary of FETA No. ND-4146/PP.1/2024 regarding the Submission of the Performance Refinement Policy and Request for Input on the MoF-One-Two-Three FETA 2024 Performance Agreement. In the context of the performance and risk refinement, discussions were held with the work units within FETA as follows.

- *Refinement of K-One FETA was conducted on 21 November 2024;*
- *Refinement of K-Two Secretary of the Agency (Setban) was conducted on 25 November 2024;*
- *Refinement of K-Two Thematic Center for Education and Training (Pusdiklat Tematik) was conducted on 26 November 2024;*
- *Refinement of MoF-Three Regional Campus of Finance Education and Training (BDK) was conducted on 2 December 2024;*

- Refinement Kemenkeu-Two PKN STAN dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024.

Perjanjian Kinerja yang disusun telah mempertimbangkan arahan pimpinan, perubahan visi dan misi, reorganisasi, dan diselaraskan dengan peta proses bisnis sebagai berikut.

1. **Arahan Kepala BPPK**
 - Telah diidentifikasi SS dan IKU pada stakeholder dan customer perspectives.
 - Telah ditambahkan layanan yang akan disurvei pada level stakeholder perspective
 - Penambahan menjadi 3 (tiga) SS pada customer perspective dengan 6 (enam) IKU.
2. **Arahan Presiden**
 - Terdapat 2 (dua) IKU yang mendukung arahan Presiden
 - Arahan "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi" (Setjen, Itjen, BPPK): IKU Indeks integritas;
 - Arahan "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM" (Setjen, BPPK): IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM.
3. **Restrukturisasi Sasaran Strategis**
 - Pada customer perspective terdapat fungsi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi;
 - Pada internal proses, dibuat SS yang mendukung pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, yang didukung dengan Manajemen Pengetahuan (MP).

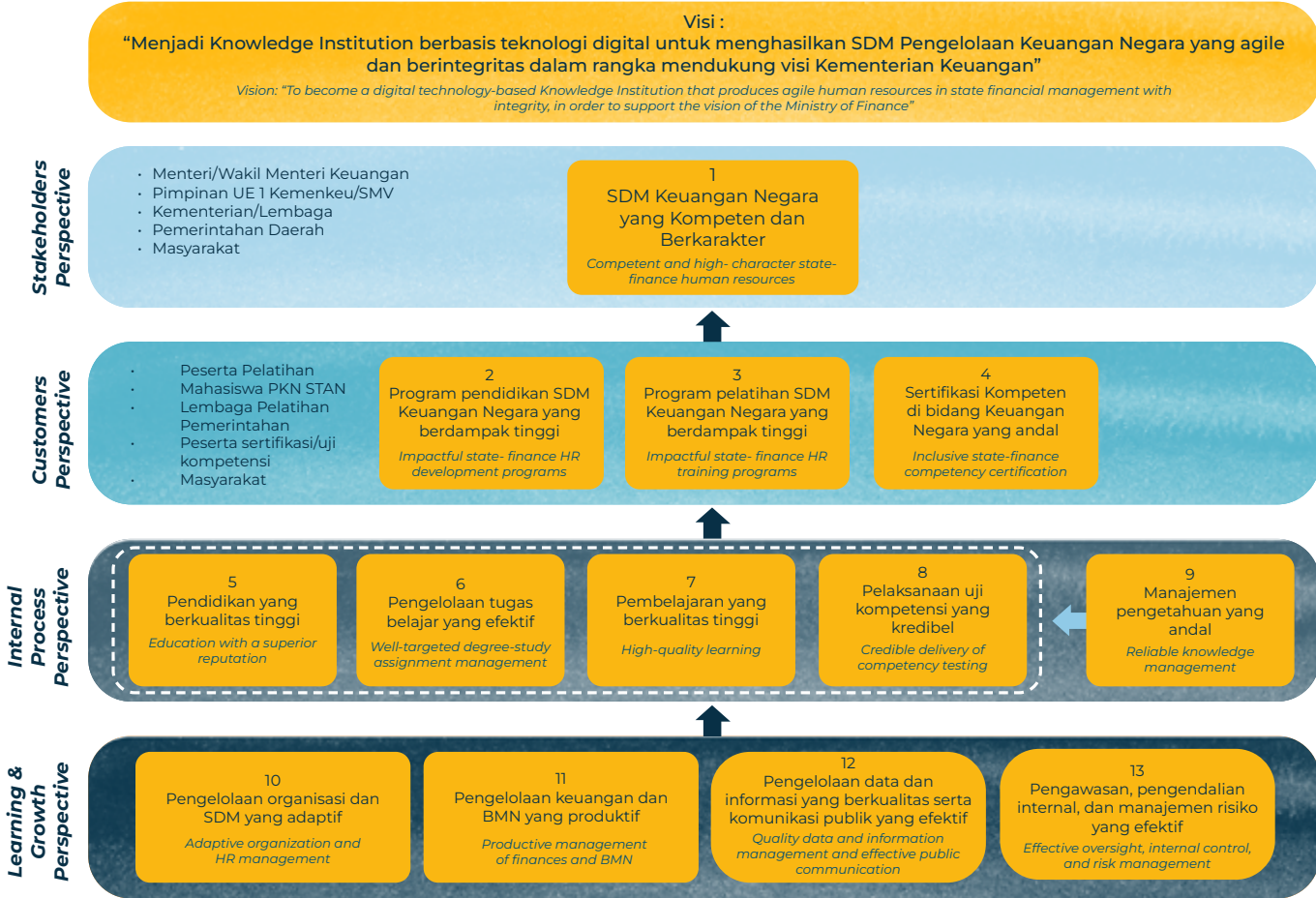
Berdasarkan refinement kinerja, disepakati SS dan IKU BPPK Tahun 2025 yang terangkum dalam Peta Strategi BPPK Tahun 2025 sebagai berikut.

- *Refinement of MoF-Two PKN STAN was conducted on 3 December 2024.*

The Performance Agreement that has been formulated has taken into account leadership directives, changes to the vision and mission, reorganization, and has been aligned with the business process map as follows.

1. **Directives from the Head of FETA**
 - *Strategic Targets (SS) and Key Performance Indicators (KPI) have been identified at the stakeholder and customer perspectives.*
 - *Services to be surveyed have been added at the stakeholder perspective level.*
 - *An increase to 3 (three) Strategic Targets (SS) at the customer perspective with 6 (six) Key Performance Indicators (KPI).*
2. **Presidential Directive**
 - *There are 2 (two) Key Performance Indicators (KPI) supporting the Presidential Directive:*
 - *Directive "Strengthening political, legal, and bureaucratic reform" (Secretariat General, Inspectorate General, FETA): KPI Integrity Index;*
 - *Directive "Strengthening the ideology of Pancasila, democracy, and human rights" (Secretariat General, FETA): KPI Quality Level of Human Resource Management.*
3. **Restructuring of Strategic Targets**
 - *At the customer perspective, there are education, training, and certification functions;*
 - *In the internal process, Strategic Targets have been established to support education, training, and certification, which are supported by Knowledge Management (KM).*

Based on the performance refinement, the FETA Strategic Targets and Key Performance Indicators for 2025 have been agreed upon, as summarized in the FETA 2025 Strategy Map presented below.



Monitoring Kinerja & Risiko

Pemantauan kinerja merupakan aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja sedangkan pembinaan kinerja merupakan aktivitas pemberian bimbingan dan konseling kinerja dalam rangka mencapai target dan meningkatkan kinerja. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja dilakukan secara berjenjang paling sedikit sekali pada setiap triwulan yang dilakukan melalui forum Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO). DKRO merupakan komunikasi formal antara pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di lingkungannya untuk mendiskusikan pencapaian strategi,

Performance and Risk Monitoring

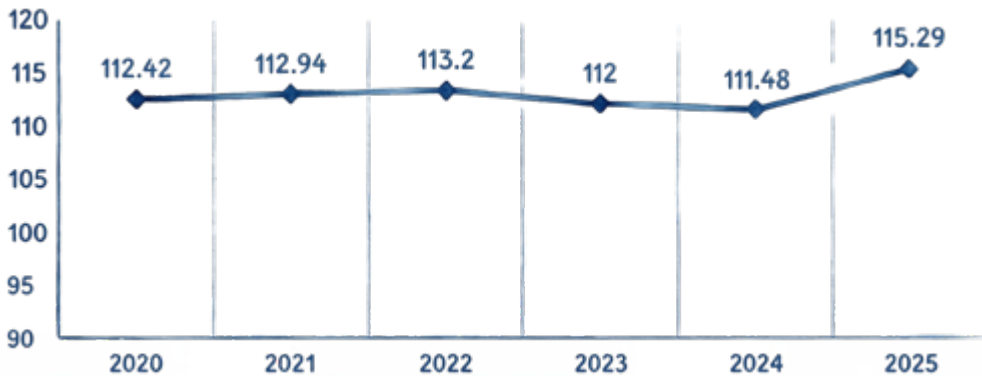
Performance monitoring is a periodic activity conducted to assess progress in performance achievement, while performance development refers to the provision of performance guidance and counseling in order to achieve targets and improve performance. The implementation of performance monitoring and development is carried out in a tiered manner at least once every quarter through the Organizational Performance and Risk Dialogues (DKRO) forum. DKRO is a formal communication forum between the leadership of the Performance Owner Unit (UPK) and officials and employees within its environment to discuss the achievement of organizational strategies, performance,

kinerja, risiko dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Sepanjang tahun 2025, BPPK melaksanakan DKRO sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun pada setiap triwulan.

Pengukuran capaian kinerja BPPK Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen PK. Berdasarkan hasil perhitungan seluruh capaian IKU yang dimiliki oleh BPPK, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPK Tahun 2025 mencapai 115,29. Keseluruhan IKU yang dimiliki oleh BPPK memiliki capaian yang melebihi target.

risks, and action plans in a structured and periodic manner. Throughout 2025, FETA conducted DKRO four times during the year, once in each quarter.

The measurement of FETA's 2025 performance achievement was carried out by comparing the targets and realization of the KPIs established in the Performance Agreement document. Based on the calculation of all KPI achievements owned by FETA, FETA's Organizational Performance Score (NKO) in 2025 reached 115.29. All KPIs owned by FETA achieved results exceeding their targets.



Rincian target dan realisasi untuk masing-masing IKU yang dimiliki oleh BPPK tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Details of the targets and realization for each KPI owned by FETA in 2025 are presented in the following table.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					114,26
1	SDM Keuangan negara yang kompeten dan berkarakter				114,26
1a-CP	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	100,00%	107,78%	107,78	107,78
1b-CP	Indeks integritas	100,00	111,45	111,45	111,45
1c-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan	100,00%	119,07%	119,07	119,07
1d-N	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90,00%	107,78%	119,76	119,76
CUSTOMER PERSPECTIVE					112,89
2	Program pengembangan SDM keuangan negara yang berdampak				110,02
2a-CP	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi	366,00	366,15	100,04	100,04
2b-N	Indeks kualitas program pengabdian kepada masyarakat unggulan	100,00	302,00	302,00	120,00
3	Program pelatihan SDM keuangan negara yang berdampak				108,65
3a-CP	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya	91,00%	96,47%	106,01	106,01
3b-N	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100,00%	111,29%	111,29	111,29
4	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara yang inklusif				120,00
4a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan sertifikasi	100,00	120,00	120,00	120,00
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE					116,31
5	Pendidikan yang bereputasi unggul				115,00
5a-CP	Tingkat kualitas tata kelola BLU PKN STAN	100,00%	110,00%	110,00	110,00
5b-N	Indeks kualitas penelitian	300,00	472,75	157,58	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
6	Manajemen tugas belajar yang tepat sasaran				120,00
6a-N	Tingkat efektivitas beasiswa Kementerian Keuangan	90,00%	112,20%	124,67	120,00
7	Pembelajaran yang berkualitas tinggi				118,75
7a-N	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100,00%	118,75%	118,75	118,75
8	Pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel				108,57
8a-N	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes	4,20	4,56	108,57	108,57
9	Indeks pemenuhan kualitas perangkat tes				1119,21
9a-N	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100,00%	119,21%	119,21	119,21
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					117,41
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				117,28
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	118,05%	118,05	118,05
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100,00	114,00	114,00	114,00
10c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit	100,00%	120,00%	120,00	120,00
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif				120,00
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00	120,00	120,00	120,00
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100,00	120,00	120,00	120,00
12	Pengelolaan data dan informasi yang berkualitas serta komunikasi publik yang efektif				119,95
12a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, & interoperabilitas antar sistem	80,00%	120,00%	150,00	120,00
12b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100,00	119,90	119,90	119,90
13	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif				112,42
13a-CP	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	92,50	103,99	112,42	112,42
Nilai Kinerja Organisasi					115,29



Ikhtisar Keuangan

FINANCIAL HIGHLIGHTS



1.3 Dalam mendukung rencana kerja sepanjang tahun 2025, BPPK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp359.493.842.000,00 (berdasarkan data revisi DIPA terakhir), Dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, BPPK berhasil merealisasikan Rp351.964.121.755,00 atau 97,91% dari pagu anggaran.

Berikut adalah realisasi anggaran BPPK sampai dengan berakhirnya tahun 2025 menurut jenis belanja.

No (1)	Uraian (2)	Pagu (3)	Realisasi (4)	% (5=4/3)
1	Belanja Pegawai	10.135.226.000	9.815.815.653	96,85%
2	Belanja Barang	306.925.370.000	300.015.152.348	97,75%
3	Belanja Modal	42.433.246.000	42.133.153.754	99,29%
Jumlah		359.493.842.000	351.964.121.755	97,91%

In support of its work plan throughout 2025, FETA received a budget allocation of Rp359,493,842,000.00 based on the latest revised Budget Implementation Document (DIPA). Of the allocated budget ceiling, FETA successfully realized Rp351,964,121,755.00, or 97.91% of the budget ceiling.

The following presents FETA's budget realization up to the end of 2025 by type of expenditure.



BPPK Dalam Angka

Feta In Figures



- 1.4**
 - a. Nilai kinerja organisasi: 115,29 dari skala 100
 - b. Tingkat Maturitas Manajemen Pengetahuan: 5 (skala 5)
 - c. Tingkat Implementasi Learning Organization: 95,98
 - d. Jumlah Penelitian yang dipublikasikan: 104 penelitian
 - e. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat: 135 kegiatan
 - f. Jumlah SDM: 1.203 orang
 - g. Jumlah SDM Per Generasi:
 - Baby Boomers: 6 orang
 - Gen X: 405 orang
 - Gen Y: 712 orang
 - Gen Z: 80 orang
 - h. Jumlah Anggaran: Rp. 359.493.842.000,-
 - i. Jumlah Realisasi Anggaran: Rp. 351.964.121.755,-
 - j. Persentase realisasi anggaran: 97,91%
- a. *Organizational performance score: 115.29 out of a scale of 100*
 - b. *Knowledge Management Maturity Level: 5 on a scale of 5*
 - c. *Level of Learning Organization Implementation: 95.98*
 - d. *Number of published research studies: 104 studies*
 - e. *Number of Community Service activities: 135 activities*
 - f. *Total human resources: 1,203 persons*
 - g. *Number of human resources by generation:
 - Baby Boomers: 6 persons
 - Gen X: 405 persons
 - Gen Y: 712 persons
 - Gen Z: 80 persons*
 - h. *Total budget: Rp359,493,842,000*
 - i. *Total budget realization: Rp351,964,121,755*
 - j. *Budget realization percentage: 97.91%*



Peristiwa Penting

Key Milestones

1.5

22 Januari 2025



Penyerahan Hasil Penilaian Akreditasi Program BPSDM Provinsi Sumatera Barat

BPPK menetapkan BPSDM Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi di Bidang Keuangan Negara. Status "Terakreditasi" tersebut diberikan pada Program Pelatihan Teknis Bendahara Pengeluaran Substansi APBD yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan hasil penilaian ini dilakukan oleh Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bapak Bhimantara Widayajala. Hadir menerima penyerahan hasil akreditasi program adalah Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Ibu Desniarti.

Handover of the Program Accreditation Assessment Results for Human Resources Development Agency (BPSDM) of West Sumatra Province

FETA designated BPSDM of West Sumatra Province as one of the Accredited Training Program Providers in the field of State Finance. The "Accredited" status was granted to the Technical Training Program for Expenditure Treasurers on Regional Budget Substance organized by BPSDM of West Sumatra Province. The assessment results were handed over by the Head of the Center for Budget and Treasury Education and Training, Mr. Bhimantara Widayajala. The Head of BPSDM of West Sumatra Province, Ms. Desniarti, was present to receive the program accreditation results.

3 Februari 2025



Serah Terima Hibah BMN Eks Balai Diklat Kepemimpinan kepada Pemerintah Kota Magelang

Bertempat di Pendopo Pengabdian, Rumah Dinas Walikota Magelang, telah dilakukan serah terima hibah barang milik negara (BMN) berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin eks Balai Diklat Kepemimpinan, BPPK dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Magelang. Serah terima hibah tersebut merupakan tindak lanjut perjanjian hibah antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Magelang yang ditetapkan pada 12 September 2023, beserta persetujuan hibah dari Pengguna Barang dan Pengelola Barang. BMN yang dihibahkan meliputi satu bidang tanah seluas 14.861 m², dua puluh unit bangunan, serta 1.715 unit peralatan dan mesin.

Handover of State-Owned Asset Grant from the Former Regional Campus of Leadership Education and Training to the Magelang City Government

Located at Pendopo Pengabdian, the Official Residence of the Mayor of Magelang, a handover was conducted for the grant of State-Owned Assets (BMN) in the form of land, buildings, equipment, and machinery from the former Leadership Training Office of FETA from the MoF to the Magelang City Government. The grant handover was a follow-up to the grant agreement between the MoF and the Magelang City Government established on 12 September 2023, along with grant approvals from the Asset User and Asset Manager. The granted State-Owned Assets comprised one parcel of land covering 14,861 m², 20 building units, and 1,715 units of equipment and machinery.

6 Februari 2025



LOKeR X – Launching Buku Hadiyanto

BPPK merilis Buku Biografi Profesional Hadiyanto: Punggawa Aset Negara dari Inalum hingga Freeport yang disusun oleh Robert Adhi KSP. Buku ini mendokumentasikan tacit knowledge dari awal karier hingga puncak pengabdian Bapak Hadiyanto. Bapak Hadiyanto mengabdikan di Kementerian Keuangan selama lebih dari tiga dekade dan menghadapi tantangan besar-membentuk DJKN dari nol, mengawal regulasi keuangan negara, hingga memastikan sistem pembayaran pemerintah semakin kuat.

LOKeR X – Launching of Hadiyanto's Book

FETA launched the professional biography Hadiyanto: Punggawa Aset Negara dari Inalum hingga Freeport (Hadiyanto: Guardian of State Assets, from Inalum to Freeport), written by Robert Adhi KSP. The book documents tacit knowledge from the beginning of Mr. Hadiyanto's career to the peak of his service. Mr. Hadiyanto served at the MoF for more than three decades and faced major challenges—from building Directorate General of State Assets Management from the ground up, overseeing state finance regulations, to ensuring that the government payment system became increasingly robust.

11 Februari 2025



Kunjungan dari Delegasi Tanzania Revenue Authority (TRA)

Sebagai bagian dari upaya implementasi Knowledge Management (KM) yang merupakan salah satu inisiatif strategis, Tanzania Revenue Authority (TRA) melakukan kunjungan lapangan ke Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 10 hingga 12 Februari 2025. Dalam sesi diskusi mengenai KM, Pusdiklat Pajak berperan sebagai tuan rumah. Kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengetahuan, khususnya mengenai penerapan Knowledge Management dalam bidang perpajakan.

Visit from the Delegation of the Tanzania Revenue Authority (TRA)

As part of efforts to implement Knowledge Management, which is one of the strategic initiatives, the Tanzania Revenue Authority (TRA) conducted a field visit to the Directorate General of Taxes, MoF of the Republic of Indonesia, from 10 to 12 February 2025. In the discussion session on KM, the Center for Tax Education and Training served as host. This activity provided a platform for knowledge sharing, particularly regarding the implementation of Knowledge Management in the field of taxation.

12 Maret 2025



Kunjungan dari Department of Budget and Management (DBM) Philippines ke BPPK

BPPK menerima kunjungan dari Department of Budget and Management (DBM) Philippines. Kedatangan DBM Philippines ini dalam rangka mempelajari reformasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada pertemuan ini Kementerian Keuangan menyampaikan reformasi yang dilakukan di bidang penganggaran dan kebijakan fiskal di Indonesia. Kunjungan ini dihadiri Undersecretary DBM, Wilford Will L. Wong, didampingi oleh John Aries Macaspac dan Andrea Lorraine G. Salvador. Delegasi DBM didampingi oleh perwakilan ADB, Hosung Park.

Visit from the Department of Budget and Management (DBM) Philippines to FETA

FETA received a visit from the Department of Budget and Management (DBM) Philippines. The visit was conducted to study state financial management reforms undertaken by the MoF. At the meeting, the MoF presented reforms implemented in budgeting and fiscal policy in Indonesia. The visit was attended by DBM Undersecretary Wilford Will L. Wong, accompanied by John Aries Macaspac and Andrea Lorraine G. Salvador. The DBM delegation was accompanied by an ADB representative, Hosung Park.

17 Maret 2025



Penguatan Komitmen Kemenkeu dalam Implementasi Manajemen Risiko melalui Sertifikasi GRCE

BPPK menyelenggarakan kegiatan Penguatan Komitmen Kementerian Keuangan dalam Implementasi Risiko melalui Sertifikasi GRCE di Aula DJPK Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut Workshop Persiapan Uji Sertifikasi Governance, Risk, and Compliance for Executive (GRCE). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pimpinan unit kerja dan pejabat fungsional setara di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara komprehensif. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Keuangan III, Ketua BNSP, Ketua LSP, serta pemangku kepentingan terkait.

Strengthening the Ministry of Finance's Commitment to Risk Management Implementation through Governance, Risk, and Compliance for Executive (GRCE) Certification

FETA organized an activity entitled Strengthening the Commitment of the MoF to Risk Implementation through GRCE Certification at the Directorate General of Fiscal Balance Hall of the Ministry of Finance, as a follow-up to the Governance, Risk, and Compliance for Executive (GRCE) Certification Test Preparation Workshop. This activity aimed to enhance the capacity of work unit leaders and equivalent functional officials within the MoF in the comprehensive implementation of governance, risk management, and compliance. The activity was attended by the Vice Minister of Finance III, the Chairperson of BNSP, the Chairperson of LSP, and relevant stakeholders.

8 April 2025



Halal Bihalal BPPK 1446 H

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan acara halal bihalal tahun 2025 bertepatan dengan hari kerja pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai BPPK, termasuk Kepala BPPK dan jajaran pejabat eselon, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana mempererat silaturahmi, saling memaafkan, serta memperkuat sinergi dan kebersamaan antarpegawai di lingkungan BPPK dalam suasana Idul Fitri.

FETA Halal Bihalal 1446 H

The FETA held the 2025 halal bihalal (a post-Eid gathering for mutual forgiveness) event on the first working day after the Eid al-Fitr 1446 H holiday. This activity was attended by all FETA employees, including the Head of FETA and echelon officials, both offline and online. The activity was held as a means to strengthen fellowship, mutual forgiveness, synergy, and togetherness among employees within FETA in the spirit of Eid al-Fitr.

25 April 2025



Bedah Buku "Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan"

Dalam rangka mendorong budaya gemar membaca, meningkatkan literasi informasi, serta menanamkan nilai-nilai resiliensi dalam pendidikan, Politeknik Keuangan Negara STAN menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku bertajuk "Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan" pada Jumat, 25 April 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung N Kampus PKN STAN. Acara bedah buku menghadirkan Ibu Sumiyati sebagai narasumber dan Robert Adhi Ksp selaku penulis buku, dengan dimoderatori oleh Vissia Dewi Haptari, Dosen Lektor PKN STAN.

Book Review of "Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan"

In order to promote a reading culture, improve information literacy, and instill resilience values in education, PKN STAN organized a book review entitled "Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan" (Sumiyati: Heroine of Change, an Inspiration for Women) on Friday, 25 April 2025. The activity was held at the Hall of Building N, PKN STAN Campus. The book review featured Ms. Sumiyati as the resource person and Robert Adhi KSP as the book author, moderated by Vissia Dewi Haptari, Associate Professor at PKN STAN.

30 April 2025



Pelantikan Pejabat Politeknik Keuangan Negara STAN dan Pranata Komputer di Lingkungan BPPK

Kepala BPPK, Bapak Andin Hadiyanto, melantik tiga pejabat struktural dan satu pejabat fungsional yakni Evy Mulyani selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Agus Bandiyono selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN, Mediya selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Fakhruddin selaku Pranata Komputer Sekretariat BPPK. Kegiatan dilaksanakan secara luring yang berlokasi di Ruang D101, Sekretariat BPPK.

Book Review of "Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan"

In order to promote a reading culture, improve information literacy, and instill resilience values in education, PKN STAN organized a book review entitled "Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan" (Sumiyati: Heroine of Change, an Inspiration for Women) on Friday, 25 April 2025. The activity was held at the Hall of Building N, PKN STAN Campus. The book review featured Ms. Sumiyati as the resource person and Robert Adhi KSP as the book author, moderated by Vissia Dewi Haptari, Associate Professor at PKN STAN.

26 Mei 2025



Sosialisasi Anti Korupsi: Karena Masuk Berita Bukan Cita-Cita

Sekretariat BPPK menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi bagi pegawai di lingkungan Sekretariat BPPK. Kegiatan ini dipandu oleh Lighthouse Duta Transformasi Sekretariat BPPK Tahun 2025. Sosialisasi menghadirkan Sekretaris BPPK, Bapak Bambang Juli Istanto, sebagai narasumber, yang menegaskan pentingnya bagi aparatur sipil negara untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ASN, khususnya integritas, dalam mewujudkan budaya antikorupsi.

Anti-Corruption Awareness Session: Making Headlines Is Not an Achievement

The Secretariat of the Agency held an anti-corruption awareness session for its employees. The event was moderated by the 2025 Transformation Ambassadors. Serving as the keynote speaker, the Secretary of the Agency, Mr. Bambang Juli Istanto, emphasized that State Civil Apparatus must consistently uphold core ASN values, particularly integrity, to foster a culture of anti-corruption.

3 Juni 2025



PPATK Pelajari Pengembangan dan Pengelolaan Kemenkeu Learning Centre (KLC)

Dalam rangka memperoleh informasi terkait pengembangan dan pengelolaan Kementerian Keuangan Learning Centre (KLC), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATK (Pusdiklat APU PPT PPATK) melaksanakan kunjungan studi banding ke BPPK pada Selasa, 3 Juni 2025. Pada kesempatan tersebut, BPPK memaparkan

PPATK Studies the Development and Management of the MoF Learning Centre (KLC)

To gather insights regarding the development and management of the Ministry of Finance Learning Centre, The Center for Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Education and Training of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (Pusdiklat APU PPT PPATK) conducted a benchmarking visit to FETA. During the visit, FETA presented the history and evolution of KLC as the core learning management system within the Ministry of Finance.

12 Juni 2025



Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) BPPK dengan tema Menuju KM yang Terintegrasi End-to-End di Kementerian Keuangan

BPPK menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 bertema "Pengembangan Standar Pelayanan di Bidang Manajemen Pengetahuan". Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPPK yang diwakili Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bapak Sugeng Satoto. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Presiden Knowledge Management Society Indonesia (KMSI), Prof. Dr. Ir. Jann Hidayat Tjakraatmadja, M.Eng, yang menyampaikan pentingnya manajemen pengetahuan dalam mendukung adaptasi organisasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Public Consultation Forum on "Towards End-to-End Integrated Knowledge Management in the Ministry of Finance"

FETA held the 2025 Public Consultation Forum under the theme "Developing Service Standards in Knowledge Management." The forum was opened by the Head of the Organization and Internal Compliance Division, Mr. Sugeng Satoto, followed by a presentation from the President of the Knowledge Management Society Indonesia (KMSI), Prof. Dr. Ir. Jann Hidayat Tjakraatmadja, M.Eng, who highlighted the critical role of knowledge management in supporting organizational adaptation and more effective decision-making.

13 Juni 2025



Pelantikan Pejabat Eselon II BPPK

Menteri Keuangan melantik 139 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan pada 13 Juni 2025. Terdapat tujuh orang pejabat di lingkungan BPPK yang turut dilantik pada kesempatan tersebut. Adapun pejabat BPPK yang dilantik yaitu:

1. Bambang Juli Istanto – Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2. Wahyu Kusuma Romadhoni – Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen
3. Bhimantara Widyajala – Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4. Muh. Tunjung Nugroho – Kepala Pusdiklat Pajak
5. Mochamad Mulyono – Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai
6. Albertus Kurniadi Hendartono – Kepala Pusdiklat Keuangan Publik
7. Nana Riana – Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu

Inauguration of FETA Echelon II Officials

The Minister of Finance inaugurated 139 Echelon II officials within the Ministry of Finance on June 13, 2025. Among those sworn in were seven officials from FETA, who are listed below:

1. Bambang Juli Istanto – Secretary of the Agency
2. Wahyu Kusuma Romadhoni – Director of Center for Leadership and Management Education and Training
3. Bhimantara Widyajala – Director of Center for Budget and Treasury Education and Training
4. Muh. Tunjung Nugroho – Director of Center for Tax Education and Training
5. Mochamad Mulyono – Director of Center for Customs and Excise Education and Training
6. Albertus Kurniadi Hendartono – Director of Center for Public Finance Education and Training
7. Nana Riana – Director of Center for Professional Development and Quality Assurance

19 Juni 2025



Pembekalan Integritas Calon Lulusan PKN STAN

Nilai integritas merupakan bagian penting dari kurikulum Pembangunan Karakter di PKN STAN. Dalam rangka menanamkan nilai tersebut, PKN STAN menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Integritas dengan menghadirkan Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK 2019-2024 dan Praktisi Antikorupsi sebagai narasumber. Kegiatan dilaksanakan di Aula Gedung N pada Kamis, 19 Juni 2025 dan diikuti oleh mahasiswa semester 8 sebagai calon lulusan PKN STAN yang akan bekerja di pemerintahan.

Integrity Briefing for Prospective PKN STAN Graduates

Integrity is a cornerstone of the Character Development curriculum at PKN STAN. To instill this value, PKN STAN held an Integrity Briefing featuring Alexander Marwata, Deputy Chairperson of the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2019–2024 term and an anti-corruption practitioner, as the keynote speaker. The event took place in the Hall of Building N on Thursday, June 19, 2025, and was attended by eighth-semester students preparing to graduate and enter public service.

7 Juli 2025



Family Day BPPK Purnawarman

Dalam rangka memperkuat budaya organisasi dan penerapan Three Lines of Defense secara berkelanjutan, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan Family Day 2025 di Lingkungan BPPK Purnawarman. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 4 Juli 2025 dan diikuti oleh 42 (empat puluh dua) peserta yang terdiri dari 12 (dua belas) pegawai, 6 (enam) pasangan pegawai, dan 24 (dua puluh empat) anak dari Pegawai Sekretariat BPPK/Pusdiklat Keuangan Publik/Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

Family Day

To strengthen organizational culture and sustain the implementation of the Three Lines of Defense, the Secretariat of the Agency held the 2025 Family Day for the FETA Purnawarman complex. The one-day event took place on July 4, 2025, with 42 participants, comprising 12 employees, 6 spouses, and 24 children of staff from the Secretariat of the Agency, the Center for Public Finance Education and Training, and the Center for Professional Development and Quality Assurance.

8 Juli 2025



BPSDM Hukum Pelajari Implementasi Pengembangan Kompetensi di Kementerian Keuangan ke BPPK

Dalam rangka memperoleh informasi terkait implementasi Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) melaksanakan kunjungan studi banding BPPK. BPSDM Hukum berkunjung dalam rangka menggali praktik pengembangan kompetensi, khususnya dalam mendukung perluasan fungsi kementerian serta pengembangan kompetensi bagi pemangku kepentingan eksternal.

Legal Human Resources Development Agency (BPSDM Hukum) Studies Competency Development Implementation at FETA

To gain insights into the implementation of the Ministry of Finance Corporate University (MoF Corpu), BPSDM Hukum conducted a benchmarking visit to FETA. The visit aimed to explore best practices in competency development, particularly in supporting expanded ministerial mandates and managing capacity building for external stakeholders.

17 Juli 2025



Seminar SWF Investment as Funding of National Development

Dalam rangka mengintegrasikan teori akademik dengan praktik industri serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pasar global, BPPK berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA), Harvard Business School (HBS), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menyelenggarakan Seminar "SWF Investment as Funding of National Development". Seminar menghadirkan Professor Matt Fibiger (Harvard Business School) yang membahas tolok ukur global peran sovereign wealth fund dalam mendorong perekonomian nasional, Ridha Wirakusumah (CEO Indonesia Investment Authority) yang memaparkan peran investasi INA dalam pembiayaan pembangunan nasional, serta Professor Sari Wahyuni (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) yang menyampaikan perspektif akademik terkait kontribusi INA terhadap perekonomian nasional.

Seminar SWF Investment as Funding of National Development

To integrate academic theory with industry practice and to formulate policy recommendations that are adaptive to the dynamics of the global market, FETA collaborated with the Indonesia Investment Authority (INA), Harvard Business School (HBS), and the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI) to organize the seminar "SWF Investment as Funding of National Development." The seminar featured Professor Matt Fibiger (HBS), who discussed global benchmarks for the role of sovereign wealth funds in driving national economies; Ridha Wirakusumah (CEO of the INA), who presented INA's role in financing national development; and Professor Sari Wahyuni (FEB UI), who offered an academic perspective on INA's contribution to the national economy.

24 Juli 2025



Capacity Building BPPK Triwulan III Tahun 2025

BPPK melaksanakan Capacity Building yang mengangkat tema terkait "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam rangka Mengoptimalkan Pengelolaan Pembelajaran" secara daring. Kegiatan capacity building ini diikuti oleh seluruh pegawai BPPK baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Sindhu Wardhana yang merupakan Kasubbag Manajemen Pengetahuan, Pusat Data dan Informasi pada Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan dan Bapak Yohanes Pangaribuan yang merupakan JF Pengembang Teknologi Pembelajaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

FETA Q3 2025 Capacity Building

On Thursday, 24 July 2025, FETA conducted a virtual Capacity Building session themed "Leveraging Artificial Intelligence to Optimize Learning Management." The webinar was attended by all FETA employees from both headquarters and regional offices. The speakers for the session were Mr. Sindhu Wardhana, Head of the Knowledge Management Subdivision at the Data Center and Financial Information Technology and Intelligence Agency (Pusdatin BaTii), and Mr. Yohanes Pangaribuan, a Learning Technology Developer Specialist at the Center for Budget and Treasury Education and Training.

9 Agustus 2025



Puncak Dies Natalis PKN STAN

PKN STAN telah menyelenggarakan Acara Puncak Dies Natalis PKN STAN yang ke 10. Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan saat itu yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun agenda pada kegiatan tersebut terdiri dari peresmian asrama oleh Menteri Keuangan, dialog interaktif Menteri Keuangan dengan 271 mahasiswa program studi sarjana terapan tingkat akhir, Bazaar UMKM binaan PKN STAN serta kuliah umum mengenai arah kebijakan fiskal dalam membangun bangsa oleh Menteri Keuangan

Dies Natalis PKN STAN Peak Event

On August 9, 2025, PKN STAN held the main event celebrating its 10th anniversary. The celebration was attended by the then-Minister of Finance, Mrs. Sri Mulyani Indrawati, alongside senior leadership from the MoF. The agenda featured the inauguration of the student dormitory, an interactive dialogue between the Minister and 271 final-year applied bachelor's students, an MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) bazaar fostered by PKN STAN, and a public lecture by the Minister on fiscal policy directions for nation-building.

12 Agustus 2025



Wamenkeu Anggito Abimanyu ajarkan Mahasiswa PKN STAN Self Leadership

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bapak Anggito Abimanyu hadir di hadapan 1300 mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN untuk memberikan kuliah umum bertema "Self Leadership" pada tanggal 12 Agustus 2025. Kuliah umum ini merupakan penutup rangkaian kegiatan Dies Natalis 10 PKN STAN

Vice Minister of Finance Anggito Abimanyu Inspires PKN STAN Students on Self-Leadership

The Vice Minister of Finance, Mr. Anggito Abimanyu, delivered a public lecture themed "Self-Leadership" to 1,300 students at the PKN STAN on August 12, 2025. This public lecture served as the closing event for the 10th PKN STAN Anniversary celebration series.

20 Agustus 2025



ACLK KPK Kunjungi BPPK untuk Diskusikan Pengembangan Pembelajaran dan Pengelolaan Tenaga Pengajar

Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran serta pengembangan kompetensi tenaga pengajar di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen (Pusdiklat KM) menerima kunjungan Anti-Corruption Learning Center (ACLK) KPK untuk melaksanakan diskusi dan koordinasi terkait pengembangan pembelajaran dan pengelolaan tenaga pengajar. Kunjungan yang dilakukan oleh ACLK KPK bertujuan untuk menggali informasi terkait pengembangan kurikulum dan silabus, pembelajaran terstruktur, serta penjaminan mutu di lembaga diklat.

KPK ACLC Visits FETA to Discuss Learning Development and Instructor Management

To improve learning quality and develop instructor competency within KPK, FETA, through the Center for Leadership and Management Education and Training, received a benchmarking visit from the KPK Anti-Corruption Learning Center (ACLK). The visit aimed to coordinate and exchange insights regarding curriculum and syllabus development, structured learning methodologies, and quality assurance within training institutions.

21 Agustus 2025



BPSDM Provinsi DKI Jakarta melakukan Benchmarking ke BPPK

BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala UPT Pusdatin Pengembangan SDM Bapak Andhika Karuniawan serta Widyaiswara Ahli Utama Ibu Helena Ras Ulina Sembiring bersama Tim BPSDM melakukan benchmarking ke BPPK. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan budaya berbagi pengetahuan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus melakukan observasi terkait manajemen pengetahuan, community of practice, serta pengelolaan aset pengetahuan melalui Portal KLC Knowledge Management System Kemenkeu.

BPSDM DKI Jakarta Province Conducts Benchmarking Visit to FETA

The Human Resources Development Agency (BPSDM) of DKI Jakarta Province conducted a benchmarking visit to FETA. The delegation was led by Mr. Andhika Karuniawan, Head of the HR Development Data and Information Center, and Mrs. Helena Ras Ulina Sembiring, Senior Widyaiswara, together with the BPSDM team. The visit aimed to foster a knowledge-sharing culture within the DKI Jakarta Provincial Government by observing knowledge management practices, communities of practice, and the management of knowledge assets through the Ministry of Finance's KLC Knowledge Management System Portal.

22 – 23 Agustus 2025



Diseminasi Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2026 Dan Rencana Pembentukan Kemenkeu Center

Bertempat di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2026 dan Rencana Pembentukan Pusat Studi Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Publik. Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Kepala BPPK, Bapak Sudarto, ini menghadirkan lebih dari 150 peserta yang terdiri atas staf ahli Kementerian Keuangan, perwakilan perguruan tinggi, local experts, kantor perwakilan Kemenkeu di daerah, serta mitra strategis lainnya.

Dissemination of 2026 Fiscal Policy Directions and the Plan to Establish the Center for Public Finance Research (CPFR)

On 22–23 August 2025, the Center for Public Finance Education and Training organized a dissemination event on the "2026 Fiscal Policy Directions and the Plan to Establish the Center for Public Finance Research (CPFR)." The event was opened by the Acting Head of FETA, Mr. Sudarto, and brought together over 150 participants, including expert staff from the Ministry of Finance, university representatives, local experts, Ministry of Finance regional offices, and other strategic partners.

16 September 2025



KCOC "Strategi Optimalisasi Potensi dan Mitigasi Tantangan Koperasi Desa Merah Putih"

BDK Balikpapan sukses menyelenggarakan Kemenkeu Corpu Open Class pada tanggal 16 September 2025 dengan tema "Strategi Optimalisasi Potensi dan Mitigasi Tantangan Koperasi Desa Merah Putih untuk Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat." Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas PPKUKM Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Diskusi berfokus pada strategi penguatan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan, kebijakan pembiayaan koperasi melalui PMK Nomor 49 Tahun 2025, serta dukungan perbankan dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah.

KCOC on "Strategies to Optimize the Potential and Mitigate the Challenges of Koperasi Desa Merah Putih"

Balikpapan Regional Campus of Finance Education and Training (BDK Balikpapan) successfully hosted a Ministry of Finance Corporate University (MoF Corpu) Open Class (KCOC) on September 16, 2025. The theme was "Strategies for Optimizing Potential and Mitigating Challenges of Merah Putih Village Cooperatives to Accelerate Development and Public Welfare." The event featured speakers from the East Kalimantan Provincial Industry, Trade, Cooperatives, and MSME Department, the Directorate General of Fiscal Balance, and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Discussions focused on strategies to strengthen village cooperatives as a pillar of the people's economy, cooperative financing policy under Minister of Finance Regulation (PMK) Number 49 of 2025, and local government and banking support to optimize the role of Merah Putih Village Cooperatives across regions.

17-18 September 2025



Rapat Pleno Penguatan Mekanisme dan Penyusunan Perangkat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Keuangan Negara

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM) menyelenggarakan Rapat Pleno Penguatan Mekanisme dan Penyusunan Perangkat Uji Kompetensi JFKN pada 17-18 September 2025 di Jakarta. Rapat pleno melibatkan kolaborasi lintas pihak, termasuk unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta praktisi profesional. Kegiatan ini bertujuan menyusun perangkat uji kompetensi yang valid, andal, dan sesuai dengan kebutuhan substantif pengelolaan keuangan negara.

Plenary Meeting on Strengthening Mechanisms and Developing Competency Assessment Tools for State Finance Functional Positions

The Center for Professional Development and Quality Assurance held a Plenary Meeting on Strengthening Mechanisms and Developing Competency Test Instruments for State Finance Functional Positions on 17-18 September 2025 in Jakarta. The plenary meeting involved cross-sector collaboration, including technical units within the Ministry of Finance, academics from various universities, and professional practitioners. The activity aimed to develop competency test instruments that are valid, reliable, and aligned with the substantive needs of state financial management.

22 September 2025



Pelantikan Pejabat Non Eselon Periode 2025 - 2029 di Lingkungan PKN STAN

Direktur PKN STAN melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan tiga puluh Pejabat Non Eselon Periode 2025-2029 di Lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan di Gedung N Lt.8 Kampus PKN STAN, prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat. Pejabat Non Eselon yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Para Kepala Satuan;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM);
3. Para Ketua Program Studi;
4. Para Sekretaris Program Studi;
5. Para Kepala Laboratorium Program Studi

Inauguration of Non-Echelon Officials for the 2025 - 2029 Term at PKN STAN

On Monday, 22 September 2025, the Director of PKN STAN administered the oath of office and inaugurated 30 Non-Echelon Officials for the 2025-2029 period within the PKN STAN. The oath-taking and inauguration ceremony was held on the 8th floor of Building N, PKN STAN Campus, and proceeded solemnly. The inaugurated Non-Echelon Officials included:

1. Heads of Units;
2. Head of the Center for Research and Community Service;
3. Heads of Study Programs;
4. Secretaries of Study Programs; and
5. Heads of Laboratories.

22-26 September 2025



WCO Pre-Accreditation Workshop for Expert Trainers on AML-CTF

Pusdiklat Bea dan Cukai bersama DJBC menjadi tuan rumah World Customs Organization (WCO) Pre-Accreditation Workshop for Expert Trainers on Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing (AML-CTF) yang diadakan pada tanggal 22-26 September 2025 di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta. Kegiatan yang didukung U.S. Department of State ini merupakan bagian dari Project OCTAGON & TENTACLE, bertujuan untuk menambah jumlah expert trainer yang terakreditasi WCO di bidang AML-CTF. Peserta yang hadir berasal dari 10 negara—Australia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, India, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, dan Papua Nugini—serta satu wakil Indonesia, yaitu Nanang Victor Hambali, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara.

WCO Pre-Accreditation Workshop for Expert Trainers on AML-CTF

The Center for Customs and Excise Education and Training, in collaboration with the Directorate General of Customs and Excise (DGCE), hosted the World Customs Organization (WCO) Pre-Accreditation Workshop for Expert Trainers on Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing (AML-CTF). The event took place from September 22 to 26, 2025, at the Wyndham Casablanca Hotel, Jakarta. Supported by the U.S. Department of State under Project OCTAGON & TENTACLE, the workshop aimed to expand the pool of WCO-accredited expert trainers in AML-CTF. Participants hailed from 10 countries—Australia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, India, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, and Papua New Guinea—alongside one Indonesian representative, Nanang Victor Hambali, Head of the Investigation and Seized Goods Section at the North Sumatra Customs and Excise Regional Office.

1-3 Oktober 2025



23rd WCO Asia/Pacific Regional Office RTC Heads' Meeting

BPPK berkolaborasi dengan DJBC sukses menyelenggarakan 23rd World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Regional Office Regional Training Centres Heads' Meeting pada tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2025 di BDK Denpasar. Kegiatan ini merupakan forum tahunan yang mempertemukan para pimpinan Regional Training Centres (RTCs) di kawasan Asia Pasifik dan bertujuan memperkuat koordinasi serta berbagi praktik terbaik dalam bidang pengembangan kapasitas. Kegiatan dihadiri oleh 32 delegasi yang berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Kamboja, China, Hongkong, India, Iran, Jepang, Korea, Malaysia, dan Thailand.

23rd WCO Asia/Pacific Regional Office RTC Heads' Meeting

FETA, in collaboration with DGCE, successfully hosted the 23rd World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Regional Office Regional Training Centres Heads' Meeting from October 1 to 3, 2025, at BDK Denpasar. This annual forum convenes leaders of Regional Training Centres (RTCs) across the Asia-Pacific region to strengthen coordination and share best practices in capacity building. The meeting was attended by 32 delegates representing various Asia-Pacific nations, including Cambodia, China, Hong Kong, India, Iran, Japan, South Korea, Malaysia, and Thailand.

29 Oktober 2025



FGD Penguatan Peran BPPK sebagai Learning Consultant dalam Kerangka Kemenkeu Corpu

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait peran strategis learning consultant yang perlu diemban oleh BPPK dalam kerangka Corporate University (Corpu), Sekretariat BPPK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Peran BPPK sebagai Learning Consultant dalam Kerangka Kemenkeu Corpu pada hari Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid, luring di ruang rapat gedung F lantai 3 dan daring melalui Teams Meeting yang diikuti oleh perwakilan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat BPPK, Pusdiklat, dan Pusbin JFPM.

FGD on Strengthening FETA's Role as a Learning Consultant within the MoF Corpu Framework

To enhance understanding of the strategic role of learning consultants within the MoF Corporate University (MoF Corpu) framework, the Secretariat of the Agency held a Focus Group Discussion (FGD) on "Strengthening FETA's Role as a Learning Consultant within the MoF Corpu Framework" on Wednesday, October 29, 2025. The hybrid event was attended by official representatives and staff from the Secretariat of the Agency, Training Centers, and Pusbin JFPM.

30 Oktober 2025



Seminar Green Financing for Sustainable Development

Sebagai bagian dari Kegiatan Global Development Learning Network Board (GDLN) Board Meeting pada 30 Oktober 2025, BPPK menyelenggarakan Seminar Green Financing for Sustainable Development. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perkembangan penanganan perubahan iklim pada tingkat global dan implikasinya bagi negara berkembang, serta respons Pemerintah Indonesia dari aspek kebijakan fiskal. Bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Widodo Ramadyanto (Analisis Kebijakan Senior DJSEF Kemenkeu), Mr Terence Wood (Fellow at Crawford School of Public Policy, ANU) dan Ibu Ni Komang Tari Padmawati (Advisory Board Member Malu Dong Community). Peserta terdiri dari para pembuat kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkeu, akademisi di sekitar wilayah Denpasar, serta para perwakilan komunitas dan pegiat isu lingkungan hidup.

Seminar on Green Financing for Sustainable Development

As part of the Global Development Learning Network (GDLN) Board Meeting on October 30, 2025, FETA hosted a seminar titled "Green Financing for Sustainable Development." The seminar aimed to elevate insights into global climate change mitigation trends, their implications for developing nations, and the Indonesian Government's fiscal policy response. Speakers included Mr. Widodo Ramadyanto (Senior Policy Analyst at the Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance), Mr. Terence Wood (Fellow at the Crawford School of Public Policy, ANU), and Mrs. Ni Komang Tari Padmawati (Advisory Board Member of the Malu Dong Community). Attendees included policymakers from central and local governments, Ministry of Finance officials, Denpasar-based academics, as well as environmental community leaders and activists.

4 November 2025



Peluncuran Program KOMPAK Pusdiklat Pajak

Pusdiklat Pajak secara resmi meluncurkan program KOMPAK (Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten). Peluncuran Program KOMPAK diselenggarakan Aula Pusdiklat Pajak, Jalan Sakti Raya No. 1 Kemanggisan, Jakarta Barat. Program Kompak Episode pertama mengangkat tema “Kupas Tuntas Apek Perpajakan Ekonomi Digital”. KOMPAK diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menguatkan ekosistem pajak Indonesia melalui berbagai kegiatan seminar & diskusi lintas stakeholder, kajian kebijakan yang berbasis data dan update regulasi perpajakan, serta menjadi pusat edukasi pajak untuk publik.

Launch of the KOMPAK Program by the Center for Tax Education and Training

The Center for Tax Education and Training officially launched an event titled “Optimal Collaboration Toward Fair and Consistent Taxation” (Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten), abbreviated as KOMPAK. The launch took place at the Auditorium of the Center for Tax Education and Training, Jalan Sakti Raya No. 1, Kemanggisan, West Jakarta. The premiere episode focused on “A Comprehensive Discussion on Tax Aspects of the Digital Economy.” KOMPAK is expected to serve as a broader collaborative platform for various parties to jointly strengthen Indonesia’s tax ecosystem through seminars and cross-stakeholder discussions, data-driven policy studies, tax regulation updates, and public tax education.

5 November 2025



Wisuda PKN STAN Tahun 2025

Bertempat di Gedung Student Center Kampus, PKN STAN menggelar Wisuda untuk para lulusan Program Studi Diploma III dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal 5 November 2025. Dengan mengangkat tema Samorastra, acara wisuda dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara, Plt. Kepala BPPK Sudarto, serta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Total lulusan PKN STAN pada tahun 2025 sebanyak 991 orang yang terdiri dari 271 lulusan reguler dan 720 lulusan alih program dari 6 (enam) program studi jenjang Diploma III dan 3 (tiga) program studi Sarjana Terapan.

PKN STAN Graduation Ceremony

PKN STAN held its graduation ceremony for the Diploma III and Applied Bachelor programs for the 2024/2025 Academic Year at the Campus Student Center on November 5, 2025. Under the theme “Samorastra,” the ceremony was attended by the Minister of Finance, Purbaya Yudhi Sadewa; the Vice Minister of Higher Education, Science, and Technology, Stella Christie; the Vice Minister of Finance, Suahazil Nazara; the Acting Head of FETA, Sudarto; and other senior leaders from the Ministry of Finance. A total of 991 graduates were honored, consisting of 271 regular students and 720 cross-enrollment (alih program) students across 6 Diploma III and 3 Applied Bachelor study programs.

11-12 November 2025



5th WCO RTC Indonesia International Conference 2025

Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai World Customs Organization - Regional Training Center (WCO RTC) berkolaborasi dengan PKN STAN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengadakan 5th WCO RTC Indonesia International Conference. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 11 - 12 November 2025 dan mengambil tema besar yaitu “Transforming Customs: Transparency, Innovation, and Digitalization for Global Trade”. Jumlah peserta konferensi yang hadir adalah 1.288 orang, yang terdiri dari 764 orang hadir pada hari pertama, dan 524 orang pada hari kedua. Adapun peserta yang hadir berasal dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Singapura, Jepang, Malaysia, Tonga, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Nigeria, Rusia, Hongkong, Kamboja, Mongolia dan Sri Lanka.

5th WCO RTC Indonesia International Conference 2025

The Center for Customs and Excise Education and Training, acting as the World Customs Organization - Regional Training Center (WCO RTC), in collaboration with PKN STAN and DGCE, held the 5th WCO RTC Indonesia International Conference. The two-day conference ran from November 11 to 12, 2025, focusing on the overarching theme: “Transforming Customs: Transparency, Innovation, and Digitalization for Global Trade.” The event drew 1,288 participants, with 764 attending on the first day and 524 on the second day. Attendees represented numerous countries, including Indonesia, Singapore, Japan, Malaysia, Tonga, Germany, the United States, Australia, Nigeria, Russia, Hong Kong, Cambodia, Mongolia, and Sri Lanka.

11-13 November 2025



Creditworthiness Academy (CWA) 2025

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan optimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Kementerian Keuangan (c.q Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan), PT Sarana Multi Infrastruktur, dan The World Bank berkolaborasi dalam menyelenggarakan Creditworthiness Academy 2025. Dimulai dengan 15 (lima belas) Pemerintah Daerah (Pemda) dari berbagai wilayah Indonesia, CWA 2025 menjadi langkah awal mendukung pengelolaan keuangan daerah yang optimal dan berkelanjutan yang berfokus pada infrastruktur prioritas dengan alternatif pembiayaan kreatif, pembangunan berkelanjutan, kelayakan kredit, serta manajemen risiko.

Creditworthiness Academy (CWA) 2025

To optimize infrastructure development and deliver tangible benefits to public welfare, the Ministry of Finance through the Center for Budget and Treasury Education and Training, PT Sarana Multi Infrastruktur, and The World Bank collaborated to host the Creditworthiness Academy (CWA) 2025. Commencing with 15 local governments from various regions across Indonesia, CWA 2025 serves as an initial step toward promoting optimal and sustainable regional financial management, focusing on priority infrastructure via creative financing alternatives, sustainable development, creditworthiness, and risk management.

21 November 2025



Seminar “Women Talent Development Program” Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemimpin Perempuan Kemenkeu, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen mengadakan program Talent Mentorship. Melalui program ini, para talenta pemimpin perempuan di Kemenkeu dapat berbagi pengalaman, memberikan inspirasi dan motivasi, agar mampu membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Program tersebut secara khusus diluncurkan melalui Seminar “Women Talent Development Program: Transforming Challenges into Innovations”, yang menghadirkan para tokoh pemimpin perempuan, yaitu Komisaris PT. Telkom, Ibu Ira Noviarti, dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Ibu Rina Widiyani Wahyuningdyah.

“Women Talent Development Program” Seminar by the Center for Leadership and Management Education and Training

In support of women leaders within the MoF, the Center for Leadership and Management Education and Training organized a Talent Mentorship program. The program provides a platform for the Ministry’s female leadership talents to share experiences and offer inspiration and motivation, fostering sustainable leadership. It was officially launched through a seminar titled “Women Talent Development Program: Transforming Challenges into Innovations,” which featured prominent women leaders: Mrs. Ira Noviarti, Commissioner of PT Telkom, and Mrs. Rina Widiyani Wahyuningdyah, Expert Staff for Legal Affairs and Institutional Relations.



11 Desember 2025



SEMBADHA Tahun 2025

Politeknik Keuangan Negara STAN kembali menggelar Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SEMBADHA) Tahun 2025 dengan tema 'Kolaborasi Multisektor untuk Akselerasi Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan' sebagai wujud nyata pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. SEMBADHA Tahun 2025 diselenggarakan dalam tiga rangkaian kegiatan, yaitu Call for Paper, Pameran dan Bazar, serta Seminar Utama yang menjadi puncak acara pada 11 Desember 2025. Bertempat di Gedung N Kampus PKN STAN, Seminar Utama SEMBADHA Tahun 2025 menghadirkan sejumlah narasumber dan perwakilan dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, pemerintah, serta komunitas terkait.

SEMBADHA 2025

PKN STAN once again held the National Seminar on Community Service Outcomes (SEMBADHA) 2025, under the theme "Multisector Collaboration for Accelerating Development and Strengthening the People's Economy," as a tangible expression of The Three Pillars of Higher Education (Education, Research, Community Service). SEMBADHA 2025 comprised three sets of activities: a Call for Papers, an Exhibition and Bazaar, and the Main Seminar, which served as the culminating event on December 11, 2025. Held at Building N of the PKN STAN Campus, the Main Seminar of SEMBADHA 2025 featured a number of speakers and representatives from academia, practitioners, entrepreneurs, government, and related communities.

17 Desember 2025



Capacity Building BPPK Triwulan IV Tahun 2025

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dengan pekerjaan, dan memberikan edukasi tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam menunjang produktivitas dalam bekerja, Capacity Building BPPK Triwulan IV Tahun 2025 mengambil tema ketahanan keluarga dengan judul "Noktah Merah Perkantoran: Awalnya Coba-coba, Lama-lama Kok Bahaya". Kegiatan Capacity Building diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Desember 2025 secara hybrid yaitu luring di Aula Gedung B Lantai 5 BPPK Purnawarman dan daring melalui Ms Teams. Bertindak sebagai narasumber adalah Psikolog Klinis ternama di Indonesia, Tara De Thouars. Acara dibuka oleh sambutan dari Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, Bapak Nana Riana.

FETA Q4 2025 Capacity Building

To foster a healthy work-life balance and provide education on the vital role of family resilience in supporting workplace productivity, the FETA Q4 2025 Capacity Building took on the theme of family resilience, titled "Office Red Flags: What Starts as Casual Can Turn Critical." The event was held on Wednesday, December 17, 2025, via a hybrid format—physically in the Hall of Building B, 5th Floor, FETA Headquarter, and virtually through MS Teams. Renowned Indonesian clinical psychologist Tara De Thouars served as the speaker. The event opened with remarks from the Director of the Center for Professional Development and Quality Assurance, Mr. Nana Riana.



Penghargaan BPPK

BPPK Award

1.6



SILVER AWARD DALAM KATEGORI CULTURE PADA AJANG GLOBAL COUNCIL OF CORPORATE UNIVERSITIES (GCCU) AWARDS

Pada 12 Mei 2025 di Paris, Kementerian Keuangan melalui BPPK kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih Silver Award kategori Culture pada ajang Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan p. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan internasional atas keberhasilan BPPK dalam mengelola dan mengembangkan corporate university secara berkelanjutan. Kategori Culture dalam GCCU Awards diberikan kepada Corpu yang mampu menghidupkan dan mentransformasikan budaya organisasi menjadi kekuatan bersama yang menyatukan, melampaui sekat-sekat perbedaan, serta mendukung strategi dan keberhasilan jangka panjang.

SILVER AWARD IN THE CULTUE CATEGORY AT THE GLOBAL COUNCIL OF CORPORATE UNIVERSITIES (GCCU) AWARDS

On 12 May 2025, in Paris, the Ministry of Finance, through FETA, once again recorded a notable achievement by winning the Silver Award in the Culture category at the 2025 Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards. This award serves as a form of international recognition for FETA's success in sustainably managing and developing its corporate university. The Culture category in the GCCU Awards is bestowed upon Corporate Universities capable of enlivening and transforming organizational culture into a unifying collective strength that transcends differences and supports long-term strategies and success.



PENGHARGAAN DARI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) PADA LAN AWARDS 2025

Acara puncak penghargaan diselenggarakan pada 3 Desember 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Nation Future Learning Forum (NFLF) 2025 yang mengusung tema "Collaborate To Elevate". Melalui ajang ini LAN memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil mendorong transformasi pembelajaran serta pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih 4 (empat) penghargaan yang meliputi:

- **Corporate University Berdampak** Kategori Kementerian/Lembaga
- **Peringkat 3 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi** Kategori Lembaga Pengakreditasi Program oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- **Peringkat 1 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi** Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, BPPK
- **Peringkat 1 Widyaiswara Berprestasi** oleh Leliantika Handitya Deastri, Widyaiswara Muda Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen BPPK

AWARD FROM THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (LAN) AT THE 2025 LAN AWARDS

The National Institute of Public Administration (LAN) once again hosted the 2025 LAN Awards as a form of appreciation for innovations in the competency development of the State Civil Apparatus. The pinnacle of the award ceremony was held on December 3, 2025, at the Bidakara Hotel, Jakarta, as part of the 2025 Nation Future Learning Forum (NFLF) series of events, which carried the theme "Collaborate to Elevate." Through this event, LAN presented awards to ministries, agencies, and local governments that have successfully driven learning transformation and sustainable ASN competency development.

During the event, the FETA successfully secured four (4) awards, which include:

- *Impactful Corporate University in the Ministry/Agency Category.*
- *3rd Place for Outstanding Training Provider Institution in the Program Accrediting Institution Category, awarded to the FETA.*
- *1st Place for Outstanding Training Provider Institution in the Central Government Training Institution Category, awarded to the Leadership and Management Training Center, FETA.*
- *1st Place for Outstanding Widyaiswara (Instructor), awarded to Leliantika Handitya Deastri, Junior Widyaiswara at the Leadership and Management Training Center, FETA*



PENGHARGAAN TOP DIGITAL AWARDS 2025

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) meraih tiga penghargaan pada ajang TOP Digital Awards 2025 yang diselenggarakan oleh oleh Majalah ItWorks dan portal itworks.id di Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025. Penghargaan tersebut meliputi Golden Winner Medallion atas capaian Star 5 selama empat tahun berturut-turut, TOP Leader on Digital Implementation untuk Kepala BPPK, serta TOP Digital Implementation Level Star 5. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas inovasi berkelanjutan BPPK dalam mengimplementasikan teknologi informasi pada proses bisnis pembelajaran.

2025 TOP DIGITAL AWARDS

FETA won three awards at the 2025 TOP Digital Awards, organized by ItWorks Magazine and the itworks.id portal in Jakarta on Thursday, December 4, 2025. These awards included the Golden Winner Medallion for achieving a 5-Star rating for four consecutive years, TOP Leader on Digital Implementation awarded to the Head of FETA, and TOP Digital Implementation Level Star 5. These awards serve as an appreciation for FETA's continuous innovation in implementing information technology within its learning business processes.

PIAGAM PLATINUM DAN DIAMOND DALAM PENERAPAN KANTOR RAMAH LINGKUNGAN

Beberapa unit kerja di Lingkungan BPPK berhasil memperoleh piagam PLATINUM dan Diamond dalam Penerapan Kantor Ramah Lingkungan yang diberikan oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan melalui KEP-46/SJ.7/2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan Periode I. Penghargaan Platinum diberikan kepada kantor di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memperoleh nilai lebih dari 85% dan Diamond diberikan kepada kantor yang memperoleh nilai antara 75% sampai dengan 84,99%. Berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai empat unit kerja di BPPK berhasil memperoleh Piagam PLATINUM sedangkan satu unit kerja berhasil memperoleh piagam DIAMOND.

Adapun rincian penerima penghargaan di Lingkungan BPPK adalah sebagai berikut. **PIAGAM**

PLATINUM

- BDK Denpasar dengan nilai 95,96%
- Sekretariat BPPK dengan nilai 93,33%
- Pusdiklat Bea dan Cukai dengan nilai 90,82%
- BDK Cimahi dengan nilai 89,35%

PIAGAM DIAMOND

- BDK Yogyakarta dengan nilai 79,15%

PLATINUM AND DIAMOND CHARTERS IN THE IMPLEMENTATION OF ECO-FRIENDLY OFFICES

Several working units within FETA successfully obtained PLATINUM and Diamond charters in the Implementation of Eco-Friendly Offices, awarded by the Head of the Bureau of State Property Management and Procurement through Decree KEP-46/SJ.7/2025 concerning the Determination of the Assessment Results of the Implementation of Eco-Friendly Offices within the Ministry of Finance for Period I. The Platinum award is given to offices within the Ministry of Finance that achieved a score of over 85%, while the Diamond award is given to offices that achieved a score between 75% and 84.99%. Based on the assessment by the Evaluation Team, four working units within FETA successfully obtained the PLATINUM charter, while one working unit successfully obtained the DIAMOND charter.

The details of the award recipients within FETA are as follows:

PLATINUM CHARTER

- Denpasar Regional Training Center (BDK Denpasar) with a score of 95.96%
- Secretariat of FETA with a score of 93.33%
- Customs and Excise Training Center with a score of 90.82%
- Cimahi Regional Training Center (BDK Cimahi) with a score of 89.35%

DIAMOND CHARTER

- Yogyakarta Regional Training Center (BDK Yogyakarta) with a score of 79.15%



UNIT DENGAN PROGRES TERBAIK DALAM PROGRAM EMPLOYEE ADVOCACY KEMENKEU 2025

BPPK meraih Penghargaan Employee Advocacy (EA) Champions sebagai unit dengan progres terbaik dalam program Employee Advocacy Kementerian Keuangan 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Bapak Heru Pambudi kepada Sekretaris BPPK, Bapak Bambang Juli Istanto dalam rangkaian pembukaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelola Kehumasan Kementerian Keuangan 2025 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, pada 19 November 2025.

FETA AWARDED FOR BEST PROGRESS IN THE 2025 MINISTRY OF FINANCE EMPLOYEE ADVOCACY PROGRAM

FETA received the Employee Advocacy (EA) Champions Award as the unit with the best progress in the 2025 Ministry of Finance Employee Advocacy program. The award was presented by the Secretary General of the Ministry of Finance, Mr. Heru Pambudi, to the Secretary of FETA, Mr. Bambang Juli Istanto, during the opening of the 2025 Ministry of Finance Public Relations Managers Capacity Building event, held at the Mezzanine Hall of the Djuanda I Building on November 19, 2025.

PPID TINGKAT I KATEGORI INFORMATIF

Berdasarkan hasil monev PPID Tingkat I di Lingkungan kementerian Keuangan dan Keputusan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nomor KEP-13/SJ.6/2025 tentang Pedoman dan Panitia Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I di Lingkungan Kemenkeu, BPPK berhasil memperoleh kualifikasi PPID Tingkat I kategori Informatif.

INFORMATIVE CATEGORY FOR LEVEL I PPID

Based on the monitoring and evaluation results of Level I Information and Documentation Management Officers (PPID) within the Ministry of Finance, and pursuant to the Decree of the Head of the Bureau of Communication and Information Services No. KEP-13/SJ.6/2025 concerning the Guidelines and Committee for the Monitoring and Evaluation of Public Information Disclosure Management for Level I Information and Documentation Management Officers within the Ministry of Finance, FETA achieved the qualification of Level I PPID in the Informative category.



BAB 2

PROFIL BPPK

FETA PROFILE



Visi, Misi dan Tata Nilai *Vision, Mission, and Values*

2.1 VISI

Sebagaimana tertuang dalam KEP-147/PP/2025 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2025–2029, visi BPPK adalah **“Menjadi Knowledge Institution berbasis teknologi digital untuk menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang agile dan berintegritas dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**. Dengan visi ini BPPK berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan negara, baik yang berada di lingkungan Kemenkeu maupun KLDI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

VISION

As stipulated in Decree No. KEP-147/PP/2025 concerning the Strategic Plan of the FETA for 2025–2029, FETA's vision is: “To become a digital technology-based Knowledge Institution that produces agile human resources in state financial management with integrity, in order to support the vision of the Ministry of Finance.” Guided by this vision, FETA is committed to enhancing the competencies of human resources in state financial management, both within the Ministry of Finance and across KLDI throughout Indonesia.

MISI

Sejalan dengan visi yang ditetapkan, berikut ini adalah misi BPPK tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan pendidikan bereputasi unggul dan bertaraf internasional serta pengelolaan tugas belajar yang efektif dan tepat sasaran;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran yang berdampak dalam Kerangka Kementerian Keuangan Corporate University;
3. Mewujudkan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, serta akreditasi program pembelajaran di bidang keuangan negara yang andal;
4. Mewujudkan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara melalui pembinaan jabatan fungsional yang profesional dan adaptif;
5. Memperkuat penelitian di bidang keuangan negara dan sektor keuangan yang didukung manajemen pengetahuan; dan
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi yang andal dan adaptif untuk mendukung kinerja BPPK yang unggul.

MISION

In alignment with the established vision, FETA's mission for 2025–2029 is as follows:

1. *To deliver education of superior reputation and international standards, alongside the effective and well-targeted management of study assignments;*
2. *To deliver impactful learning programs within the framework of the Ministry of Finance Corporate University;*
3. *To deliver reliable competency certification in state finance and the financial sector, as well as the reliable accreditation of state finance learning programs;*
4. *To deliver the management of functional positions in state finance through professional and adaptive functional-position development;*
5. *To strengthen research in state finance and the financial sector, supported by robust knowledge management; and*
6. *To deliver reliable and adaptive management of organizational resources to support FETA's superior performance.*



TATA NILAI

Tata nilai yang berlaku pada BPPK mengacu pada tata nilai yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, nilai-nilai Kementerian Keuangan terdiri dari:

1. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

VALUES

The values upheld at FETA align with those implemented across the Ministry of Finance. Pursuant to the Minister of Finance Decree No. 312/KMK.01/2011, the core values of the Ministry of Finance consist of:

1. Integrity: Thinking, speaking, behaving, and acting properly and correctly, while firmly upholding the code of ethics and moral principles.
2. Professionalism: Working thoroughly and accurately on the basis of optimal competence, with full responsibility and high commitment.
3. Synergy: Building and ensuring productive internal working relationships and harmonious partnerships with stakeholders to produce useful and high-quality outcomes.
4. Service: Providing services that satisfy stakeholders, delivered wholeheartedly, transparently, quickly, accurately, and securely.
5. Excellence: Continuously implementing improvements in all areas to become and deliver the best.



Sejarah BPPK

History of FETA

2.2

PENDIDIKAN JANGKA PANJANG DAN PENDEK PADA MASA SEBELUM BPLK

Sebelum terbentuknya BPLK, Pendidikan dan Pelatihan pegawai Kementerian Keuangan ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal dan dapat digolongkan menjadi Pendidikan yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

LONG-TERM AND SHORT-TERM EDUCATION IN THE PRE-BPLK ERA

Prior to the establishment of the Finance Education and Training Agency (BPLK), the education and training of Ministry of Finance employees were managed independently by each Directorate General. These initiatives can be classified into long-term and short-term education programs.

JANGKA PANJANG / Long-Term

Kursus Djabatan Ajun Akuntan (1952-1956)

Junior Accountant Position Course (1952-1956)

Pendidikan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (1952-1971)

Technical Education in State Financial Management (1952-1971)

Akademi Pajak dan Pabean (1956-1959)

Academy of Taxation and Customs (1956-1959)

Kursus Thesauri Negara (1958)

State Treasury Course (1958)

Kursus Djabatan Pembantu Akuntan (1959)

Assistant Accountant Position Course (1959)

Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (1959-1972)

College of State Finance Studies (1959-1972)

Akademi Thesauri Negara (1960)

State Treasury Academy (1960)

Akademi Djabatan Akuntan (1960-1965)

Accountant Position Academy (1960-1965)

Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (1963)

Financial Audit Service Academy (1963)

Kursus Djabatan Penata Perbendaharaan (1964)

Treasury Administrator Position Course (1964)

Akademi Ajun Akuntan Negara dan Akademi Ajun Akuntan Pajak (1965)

Junior State Accountant Academy and Junior Tax Accountant Academy (1965)

Akademi Perbendaharaan Negara (1965)

State Treasury Academy (1965)

Institut Ilmu Keuangan (1967-1981)

Institute of Finance Studies (1967-1981)

JANGKA PENDEK / Short-Term

Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Pajak

Education and Training at the Directorate General of Taxation

Pendidikan dan Latihan di Direktorat Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah)

Education and Training at the Directorate of Ipeda (Regional Development Levy)

Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Education and Training at the Directorate General of Customs and Excise

Pendidikan dan Latihan di bidang Pengawasan Keuangan Negara

Education and Training in the field of State Financial Oversight



LAHIRNYA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN (BPLK)

BPLK muncul dari semangat untuk menyatukan Lembaga-lembaga pendidikan keuangan negara. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang diikuti dengan SK Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 16 April 1975 maka lahirah BPLK.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut BPLK terdiri dari satu secretariat dan enam pusdiklat yang meliputi:

THE ESTABLISHMENT OF THE FINANCE EDUCATION AND TRAINING AGENCY (BPLK)

BPLK emerged from the initiative to consolidate various state finance education institutions. Pursuant to the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 44 of 1974 concerning the Fundamentals of Departmental Organization, followed by the Minister of Finance Decree No. 405/MK/6/4/1975 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Department of Finance, enacted on April 16, 1975, BPLK was officially established.

Under the Presidential Decree, BPLK comprised one secretariat and six training centers, which included:

Dengan lahirnya BPLK, seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai yang sebelumnya tersebar di berbagai direktorat jenderal kini menjadi satu atap. Dalam perjalanannya organisasi BPLK mengalami beberapa kali perubahan mengikuti perubahan lingkungan maupun tuntutan yang harus dihadapi.

With the inception of BPLK, all employee education and training programs—previously dispersed across various directorate generals—were consolidated under one entity. Over time, the BPLK organization underwent several structural changes in response to evolving environments and the demands it was required to address.



**Sekretariat
Badan
Pendidikan
dan Latihan
Keuangan**
Secretariat



**Pusdiklat
Kebendaharaan
Umum**
*General Treasury
Training Center*



**Pusdiklat
Perpajakan**
*Taxation Training
Center*



**Pusdiklat Bea dan
Cukai**
*Customs and Excise
Training Center*



**Pusdiklat Akuntansi
Negara atau Sekolah
Tinggi Akuntansi
Negara (STAN)**
*State Accountancy Training
Center, or the State College
of Accountancy (STAN)*



**Pusdiklat Ipeda
dan Pegadaian**
*Ipeda and Pawnbroking
Training Center*



**Pusdiklat
Pengawasan**
*Oversight Training
Center*

TERBENTUKNYA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN (BPPK)

Tahun 2001, perubahan organisasi BPLK kembali terjadi dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001. Perubahan nama BPLK berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bukan sekadar permainan kata namun terdapat perubahan makna dimana kata “pelatihan” memiliki cakupan yang lebih luas dan sepadan dengan kata “pendidikan”. Adapun susunan dari BPPK adalah Sekretariat Badan, Pusdiklat Pegawai, Pusdiklat Anggaran, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, dan Pusdiklat Keuangan Umum. STAN secara status quo tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

THE FORMATION OF THE FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING AGENCY (FETA)

In 2001, the organization underwent further transformation with the enactment of the Minister of Finance Decree No. 2/KMK.01/2001. The transition in nomenclature from BPLK to the FETA was not merely a semantic adjustment; it signified a shift in meaning, wherein the concept of “training” acquired a broader scope, commensurate with the concept of “education.” The organizational structure of FETA comprised the Agency Secretariat, the Personnel Training Center, the Budget Training Center, the Taxation Training Center, the Customs and Excise Training Center, and the General Finance Training Center. STAN remained within FETA under a status quo arrangement but was mandated to promptly align with prevailing laws and regulations.

Perubahan selanjutnya kembali terjadi dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang mengubah wajah kelembagaan dimana Pusdiklat Pegawai resmi berganti nama menjadi Pusdiklat Pengembangan SDM. Selain itu, lahir juga unit eselon II baru yang bernama Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Sejak saat itu, BPPK beberapa kali mengalami penyesuaian struktur, yaitu pada tahun 2014, 2015, 2018, dan 2021. Berdasarkan regulasi terakhir yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 struktur organisasi BPPK meliputi:

Subsequent changes occurred with the enactment of the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.01/2008 concerning the Organization and Work Procedures of the Department of Finance, which restructured the institution: the Personnel Training Center was officially renamed the Human Resources Development Training Center. Furthermore, a new Echelon II unit, designated as the State Assets and Fiscal Balance Training Center, was established. Since then, FETA has undergone several structural adjustments, specifically in 2014, 2015, 2018, and 2021. Under the most recent regulation, the Minister of Finance Regulation No. 124 of 2024, the organizational structure of FETA comprises:



Sekretariat Badan
Agency Secretariat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
Center for Leadership and Management Education and Training

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
Center for Budget and Treasury Education and Training

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
Center for Tax Education and Training

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Center for Customs and Excise Education and Training

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
Center for Public Finance Education and Training

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.
Center for Functional Position Development and Quality Assurance

2.3

Struktur Organisasi

Organizational Structure

BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
3. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan pemanfaatan hasil Pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

In accordance with prevailing laws and regulations, FETA is responsible for delivering education, training, and competency certification in the field of state finance, as well as knowledge management. In carrying out those responsibilities, FETA performs the following functions:

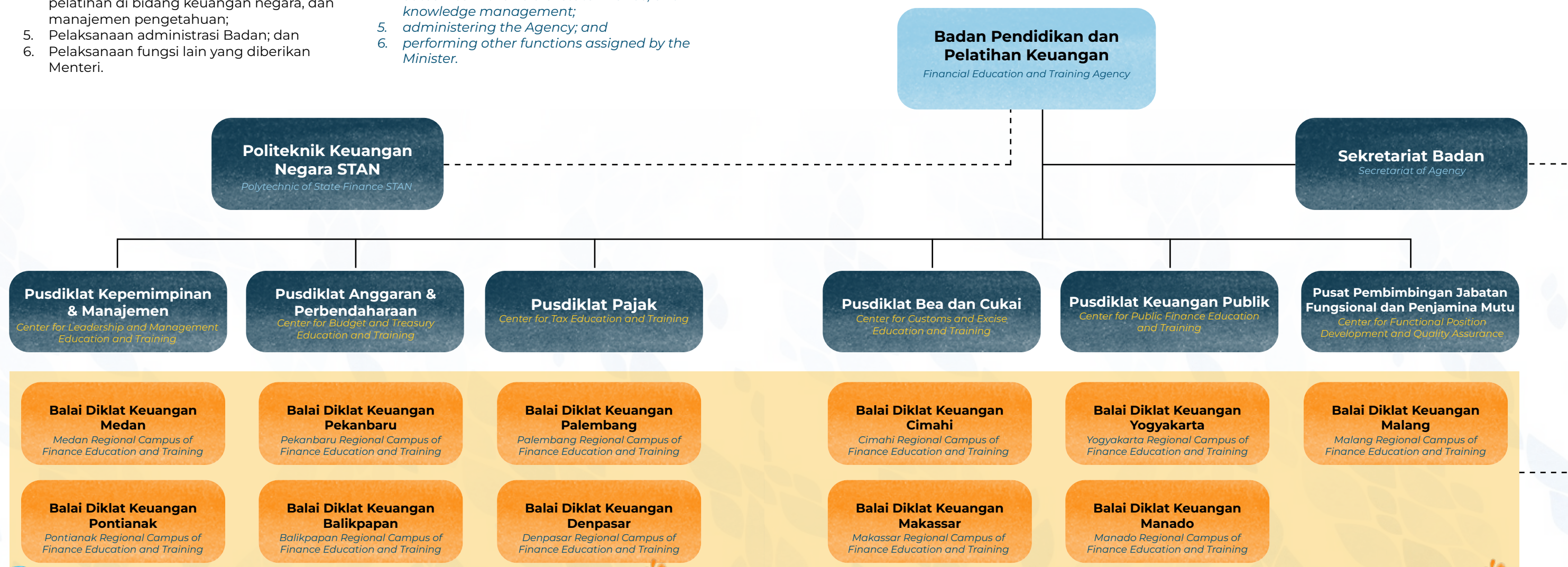
1. *formulating technical policies, plans, and programs for education, training, and competency certification in the field of state finance, as well as knowledge management;*
2. *delivering education, training, competency certification in the field of state finance, and knowledge management;*
3. *conducting the development of functional positions in the field of state finance;*
4. *monitoring, analyzing, evaluating, and reporting on the implementation of education, training, competency certification, functional-position development, and the utilization of education and training outcomes in the field of state finance, and knowledge management;*
5. *administering the Agency; and*
6. *performing other functions assigned by the Minister.*

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pusat maupun Unit Teknis di daerah sesuai dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

All duties and functions are carried out by Central Units and regional Technical Units in accordance with:

1. *Minister of Finance Regulation No. 160/PMK.01/2020 on the Organization and Work Procedures of the State Finance Polytechnic STAN;*
2. *Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.01/2021 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance;*
3. *Minister of Finance Regulation No. 79/PMK.01/2022 on the Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units within the FETA; and*
4. *Minister of Finance Regulation No. 124 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance.*



2.4 Profil Pejabat Profiles of Officials



Dwi Teguh Wibowo

Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
Acting Head of The Financial Education and Training Agency

Lahir di Karanganyar pada tanggal 6 Oktober 1969. Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma III Kepabeanaan dan Cukai di Politeknik Keuangan Negara STAN dan melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia.

Dalam perjalanan kariernya di Kementerian Keuangan, beliau telah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (2017–2023) serta Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan

Hukum Kepabeanaan dan Cukai (2016–2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara sejak tahun 2023. Selain itu, beliau juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mulai April 2026. Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun.

Born in Karanganyar on 6 October 1969. He completed his Diploma III in Customs and Excise at the State Finance Polytechnic (Politeknik Keuangan Negara STAN) and went on to earn a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia.

Throughout his career at the Ministry of Finance, he has held a number of strategic positions, including Head of the Type A Main Customs and Excise Service Office at Tanjung Priok (2017–2023) and Senior Advisor for Customs and Excise Supervision and Law Enforcement (2016–2017).

He currently serves as Special Staff to the Minister of Finance for State Revenue, a position he has held since 2023. In addition, he has also been assigned as Acting Head (Plt.) of Financial Education and Training Agency effective April 2026. In recognition of his service to date, the President of the Republic of Indonesia has awarded him the Satyalancana Karya Satya X, XX, and XXX.



Wahyu Kusuma Romadhoni

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
Secretary of The Financial Education and Training Agency

Lahir di di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1974. Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma III di Program Diploma Keuangan STAN tahun 1995 dan melanjutkan jenjang Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada di tahun 2001 serta meraih gelar Master di bidang Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia tahun 2006.

Mengawali karir di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 1995 dan pada tahun 2006 melanjutkan karirnya di Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (Bappeki) yang kemudian berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Pada tahun 2015, diangkat menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian menjadi Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen pada tahun 2021 hingga 2026. Lulusan terbaik Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tahun 2022 ini, saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun.

Born in Yogyakarta on 20 July 1974. He completed his Diploma III in Finance at the State Finance Polytechnic (Politeknik Keuangan Negara STAN) in 1995 and went on to earn a Bachelor's degree in Economics from the Faculty of Economics, Universitas Gadjah Mada in 2001, followed by a Master's degree in Public Policy from the University of Indonesia in 2006.

He began his career at the Directorate General of Budget in 1995. In 2006, he continued his career at the Center for Financial and International Economic Analysis and Cooperation (Bappekki), which later became the Fiscal Policy Agency (BKF). In 2015, he was appointed Head of the Human Resources Division of the Fiscal Policy Agency. He then served as Head of the Human Resources Development Education and Training Center, which was renamed the Center for Leadership and Management Education and Training, from 2021 to 2026. A distinguished graduate and Best Participant of the National Leadership Training Program (PKN) Level II in 2022, he currently serves as Secretary of the Financial Education and Training Agency.

In recognition of his dedication and long-standing service, the President of the Republic of Indonesia awarded him the Satyalancana Karya Satya X, XX, and XXX.



Heni Kartikawati

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen |
Head of Center for Leadership and Management Education and Training

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1970. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Jenjang pendidikannya berlanjut pada program Master di Nagoya University tahun 2022.

Beliau mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Diangkat menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat BPPK tahun 2026, dan Kepala Bagian Kepegawaian di tahun 2014. Heni Kartikawati kemudian ditunjuk menjadi Kepala Balai Diklat Kepemimpinan tahun 2017, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Sebelum menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Februari 2024 hingga Maret 2026.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X dan XX tahun.

Born in Yogyakarta on 18 December 1970. She earned her bachelor's degree from Gadjah Mada University in 1995 and later pursued a master's degree at Nagoya University, which she completed in 2022.

She began her career at the Ministry of Finance in 1996. In 2012, she was appointed Head of the Organization and Administration Division of the FETA Secretariat, followed by her appointment as Head of the Personnel Division in 2014. In 2017, she became Head of the Center for Leadership Training and subsequently served as Head of the Center for General Finance Education and Training from 2018 to 2024. Prior to her current position as Head of the Center for Leadership and Management Education and Training, she served as Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury for Riau Province, Directorate General of Treasury, from February 2024 to March 2026.

In recognition of her service and dedication, she was awarded the Satyalancana Karya Satya X and XX Years honor by the President of the Republic of Indonesia.



Bhimantara Widyajala

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan |
Head of Center for Budget and Treasury Education and Training

Lahir di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1967. Beliau menamatkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992, menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan meraih gelar Akuntan pada tahun 1995, dan menyelesaikan pendidikan pada the George Washington University di Washington, DC, USA pada tahun 1999 dengan meraih gelar Master of Science in Finance (MSF).

Beliau mengawali karir sebagai Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 1988. Pada awal 2007 memulai tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Surat Berharga Negara, dikukuhkan sebagai Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada tahun 2011, dan mengemban tugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada tahun 2012 dan selanjutnya, beliau dipercaya menjadi Direktur Eksekutif the Asian Development Bank selama 2 periode, yaitu tahun 2013 s.d. 2017. Selain itu, beliau pernah menjabat di berbagai posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya pada Kementerian Keuangan, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Plt. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat Jenderal, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, hingga kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Saat ini beliau dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun.

Born in Surabaya on 29 March 1967. He earned a Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law, University of Indonesia, in 1992. In 1995, he completed the Diploma IV program at the State College of Accountancy (STAN), obtaining the Accountant designation. He later pursued graduate studies at The George Washington University in Washington, D.C., United States, where he earned a Master of Science in Finance (MSF) in 1999.

He began his career as an Auditor at the Inspectorate General of the Ministry of Finance in 1988. In early 2007, he was appointed Acting Director of Government Securities and was officially inaugurated as Director of Government Debt Securities at the Directorate General of Debt Management in 2011. In 2012, he served as Secretary of the Directorate General of Debt Management. From 2013 to 2017, he served two terms as Executive Director of the Asian Development Bank. He has also held various Pratama High Leadership Echelon II positions within the Ministry of Finance, including Strategic Planning Expert Reviewer, Acting Head of the Center for Financial Professions Development, Apparatus Resources Expert Reviewer at the Secretariat General, Director of Transfer Capacity and Implementation, Director of Regional Financing and Economy, and Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance.

He is currently entrusted to serve as Head of the Center for Budget and Treasury Education and Training. In recognition of his service and dedication, the President of the Republic of Indonesia has awarded him the Satyalancana Karya Satya X, XX, and XXX Years honors





Edward Hamonangan Sianipar

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak |
Head of Center for Tax Education and Training

Memulai karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Maret 1990. Dalam bidang pendidikan, beliau meraih gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia.

Selama lebih dari tiga dekade mengabdikan, beliau telah menempati sejumlah posisi strategis di DJP, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, serta sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Pada tahun 2026, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Sebagai wujud apresiasi atas dedikasinya, ia telah dianugerahi Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun oleh Presiden Republik Indonesia.

He began his career as a Civil Servant Candidate (CPNS) at the Directorate General of Taxes on 1 March 1990. In terms of education, he earned a Master's degree in Public Administration from the University of Indonesia.

Over more than three decades of service, he has held a number of strategic positions within the Directorate General of Taxes (DGT), including Head of Regional Office, Senior Advisor for Taxation Supervision and Law Enforcement, and Head of the Center for Tax Data and Document Processing (PPDDP). In 2026, he was appointed Head of the Center for Tax Education and Training.

In recognition of his dedication, he has been awarded the Satyalancana Karya Satya (Long Service Medal) for 10, 20, and 30 years of service by the President of the Republic of Indonesia.



Mochamad Mulyono

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai |
Head of Center for Custom and Excise Education and Training

Lahir di Batu, Malang pada tanggal 12 Agustus 1969. Menyelesaikan pendidikan Diploma III Kepabeanaan dan Cukai dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1991, kemudian meraih gelar Sarjana Manajemen dari STIA LAN/Universitas Palembang pada tahun 2003, dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2006. Gelar Doktor Ilmu Manajemen diperoleh dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019.

Beliau mengawali karier di Kementerian Keuangan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Desember 1989. Selama lebih dari tiga dekade, beliau telah mengemban berbagai tugas strategis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Bea dan Cukai di Sorong dan Juanda, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, hingga Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanaan dan Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian di Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tanggal 13 Juni 2025, Beliau dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Atas dedikasi dan pengabdian selama lebih dari 35 tahun di Kementerian Keuangan, beliau dianugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun.

Born in Batu, Malang, on 12 August 1969. He completed the Diploma III program in Customs and Excise at the College of State Accountancy (STAN) in 1991. He later earned a Bachelor of Management degree from STIA LAN/University of Palembang in 2003 and a Master of Management degree from Sriwijaya University in 2006. In 2019, he obtained a Doctorate in Management Science from the State University of Jakarta.

He began his career at the Ministry of Finance as a civil servant candidate on 1 December 1989. Over more than three decades of service, he has held various strategic positions within the Directorate General of Customs and Excise, including Head of the Section of Enforcement and Investigation, Head of the Customs and Excise Offices in Sorong and Juanda, Head of the Division of Internal Compliance, Head of the Subdirector of Customs Registration, and Head of the Division of Human Resources Development at the Secretariat of the DGCE.

On 13 June 2025, He was officially inaugurated as Head of the Center for Customs and Excise Education and Training at the FETA, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

In recognition of his dedication and more than 35 years of service at the Ministry of Finance, the President of the Republic of Indonesia awarded him the Satyalancana Karya Satya X, XX, and XXX Years honor.



Ganti Lis Ariyadi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik |
Head of Center for Public Finance Education and Training

Lahir di Cilacap pada tanggal 2 Januari 1976. Menyelesaikan jenjang Sarjana dari Universitas Jenderal Soedirman di tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan pada Flinders University of South Australia pada tahun 2007 dengan meraih gelar Master of Education (Leadership and Management).

Sejumlah jabatan yang pernah diemban beliau diantaranya Kepala Bidang Pengelolaan Beasiswa, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2017, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mulai dari tahun 2021 s.d. 2024.

Sebelum mengemban amanat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik, beliau sempat menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum pada September 2024 s.d. Juni 2025 dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Sekretariat Jenderal pada Juni 2025 s.d. Maret 2026.

Atas pengabdian dan dedikasi beliau, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X dan XX tahun.

Born in Cilacap on 2 January 1976. He earned his bachelor's degree from Jenderal Soedirman University in 1998. In 2007, he completed a Master of Education (Leadership and Management) at Flinders University of South Australia in 2007.

He began his leadership career at the Ministry of Finance when he was appointed Head of the Division Scholarship Management at the Center for Leadership and Managerial Training, FETA, in 2017. He then served as Head of the Division of Organization and Administration from 2021 to 2024.

Prior to assuming his current position as Head of the Center for Public Finance Education and Training, he served as Head of the Center for General Finance Education and Training from September 2024 to June 2025, followed by his appointment as Expert Reviewer of State Assets Management at the Secretariat General from June 2025 to March 2026.

In recognition of his service and dedication, the President of the Republic of Indonesia awarded him the Satyalancana Karya Satya X and XX Years honor.



Nana Riana

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu |
Head of Center for Professional Development and Quality Assurance

Lahir di Majalengka pada tanggal 8 Agustus 1973 dan menyelesaikan pendidikan Diploma IV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2005, setelah sebelumnya meraih gelar Sarjana Administrasi Niaga dari STIA-LAN Bandung pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan studi ke Australia dengan memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Monash University, Melbourne pada tahun 2008, dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang Finance dari Victoria University, Melbourne, pada tahun 2018.

Bergabung dengan Kementerian Keuangan sejak tahun 1995, beliau telah menjalani berbagai penugasan strategis. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi pada beberapa posisi di Direktorat Surat Utang Negara hingga Kepala Subdirektorat di Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta merangkap sebagai Direktur pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN V) sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) untuk penerbitan sukuk negara.

Pada tanggal 13 Juni 2025, Bapak Nana Riana dilantik sebagai Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Born in Majalengka on 8 August 1973, Mr. Nana earned a Bachelor of Business Administration from STIA-LAN Bandung in 1998 and later completed the Diploma IV program in Accountancy at the College of State Accountancy (STAN) in 2005. He subsequently pursued graduate studies in Australia, earning a Master of Applied Finance from Monash University, Melbourne, in 2008 and in 2018, he obtained a Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Finance from Victoria University, Melbourne.

Since joining the Ministry of Finance in 1995, he has held various strategic positions, particularly in the field of Islamic financing and government securities management. His career has included several Section Head positions within the Directorate of Government Debt Securities, culminating in his appointment as Head of the Subdirector of Islamic Financing at the Directorate General of Budget Financing and Risk Management, and concurrently as Director of the State Sharia Securities Issuing Company (SBSN V), a Special Purpose Vehicle (SPV) established for the issuance of government sukuk.

On 13 June 2025, He was inaugurated as Head of the Center for Professional Development and Quality Assurance at FETA, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.





Evy Mulyani

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN |
Director of Polytechnic of State Finance STAN

Lahir di Bandung pada tanggal 18 April 1976, beliau menyelesaikan pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta pada tahun 1999. Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance dari Nanzan University Japan pada tahun 2004, dan gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari Deakin University, Australia pada tahun 2014.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1996. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif, Pusat Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2015 dan sebagai Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, Badan Kebijakan Fiskal (2018-2019). Pada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 2021- 2023 beliau dipercaya sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada 2 November 2023 beliau dilantik sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.

Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X dan XX tahun.

Born in Bandung on 18 April 1976, Ms. Evy completed the Diploma IV program at the College of State Accountancy (STAN), Jakarta, in 1999. She later earned a Master of Business Administration (MBA) in Finance from Nanzan University, Japan, in 2004, followed by a Doctor of Philosophy (Ph.D.) from Deakin University, Australia, in 2014.

She began her career at the Ministry of Finance in 1996. In 2015, she was appointed Head of the Division of Inclusive Finance Policy at the Fiscal Policy Agency. She subsequently served as Head of the Division of International Economic Analysis and Investor Relations at the Fiscal Policy Agency from 2018 to 2019. In 2020, she was appointed Head of the Bureau of Cooperation and Public Relations at the Ministry of Education and Culture. From 2021 to 2023, she served as Assistant Director for Academic Division at the Polytechnic of State Finance STAN. On 2 November 2023, she was inaugurated as Director of the Polytechnic of State Finance STAN.

In recognition of her dedicated service, the President of the Republic of Indonesia awarded her the Satyalancana Karya Satya X and XX Years honor.





BAB 3

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES



Profil Sumber Daya Manusia

Human Resources Profile



3.1

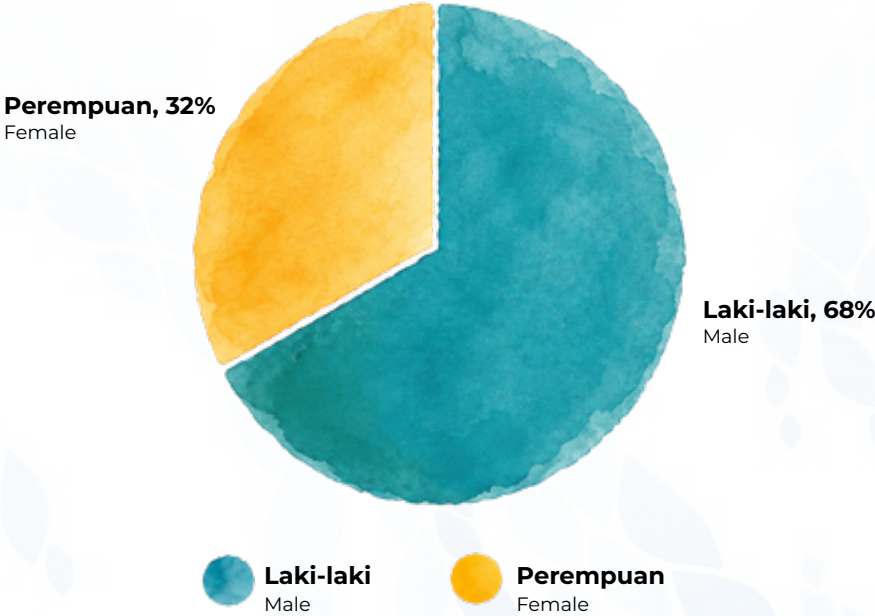
Komposisi SDM BPPK Berdasarkan Unit Kerja

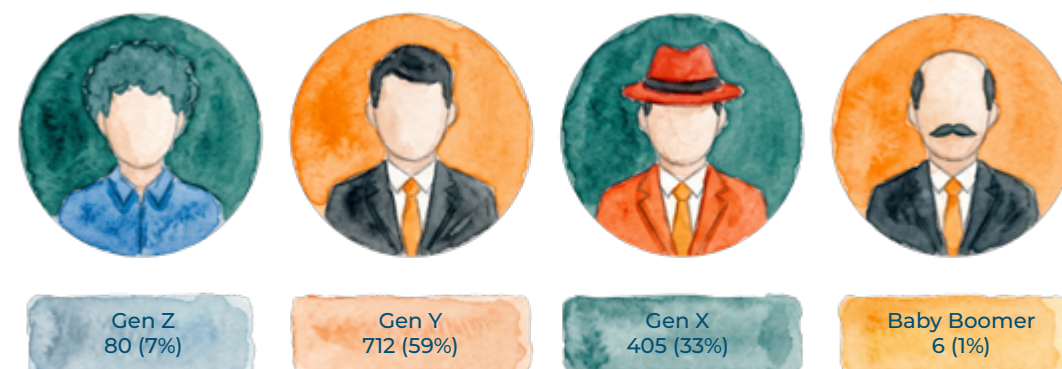
Composition of FETA Human Resources by Work Unit

No	Unit	Jumlah Pegawai
	Sekretariat Badan	215
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen	99
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	97
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak	96
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai	73
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik	77
	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu	70
	Politeknik Keuangan Negara STAN	249
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan	17
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pekanbaru	18
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang	19
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi	19
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta	26
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang	29
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar	20
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak	18
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balikpapan	24
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar	19
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado	18

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPPK Per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.203 Pegawai, yang terdiri dari 813 pegawai laki-laki (68%) dan 390 pegawai perempuan (32%). Jumlah pegawai BPPK per 31 Desember 2025 turun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yaitu sebanyak 1.235 pegawai. Penurunan jumlah pegawai BPPK sejalan dengan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menerapkan pertumbuhan negatif jumlah SDM (minus growth). Dari sisi komposisi generasi, pegawai BPPK masih didominasi oleh generasi milenial (kelahiran 1983-1997) yang berjumlah 712 orang atau sekitar 59,1% dari total pegawai. Generasi X menempati urutan berikutnya dengan 405 pegawai (33,7%), di posisi ketiga adalah geberasi Z sebanyak 80 pegawai (6,7%). Generasi Baby Boomer menempati posisi terakhir yakni sebanyak 6 pegawai (0,5%).

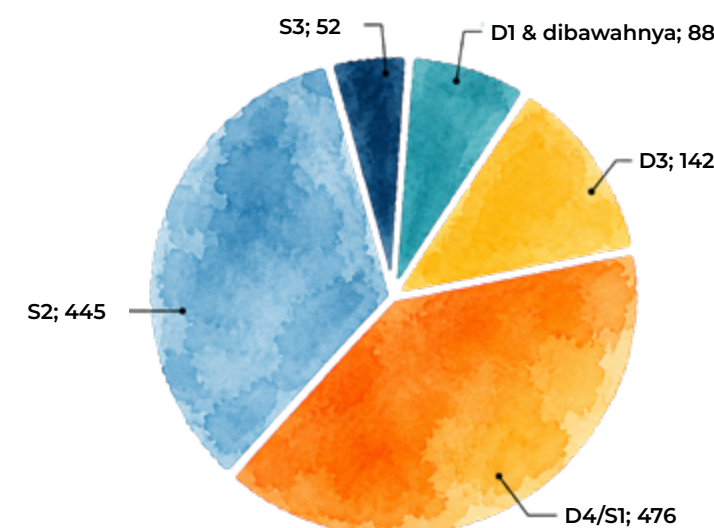
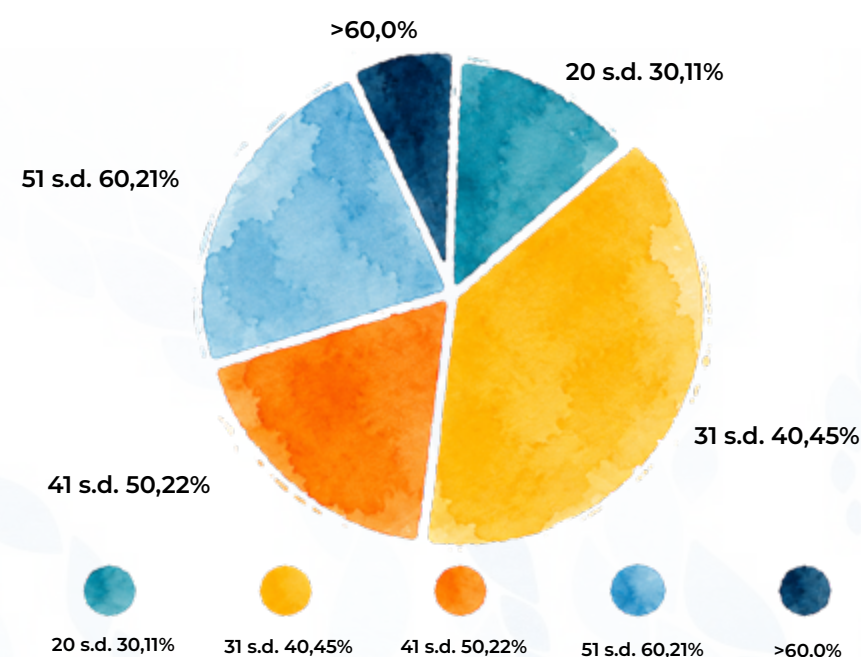
The number of Civil Servants (PNS) within FETA as of 31 December 2025 totaled 1,203 employees, consisting of 813 male employees (68%) and 390 female employees (32%). The number of FETA employees as of 31 December 2025 declined compared to the same period in 2024, which stood at 1,235 employees. The decrease in the number of FETA employees is in line with the Human Resources management policy that applies negative growth in the number of personnel (minus growth). In terms of generational composition, FETA employees are still dominated by the millennial generation (born 1983–1997), numbering 712 people or about 59.1% of total employees. Generation X comes next with 405 employees (33.7%), and in third place is Generation Z with 80 employees (6.7%). The Baby Boomer generation occupies the last position with 6 employees (0.5%).





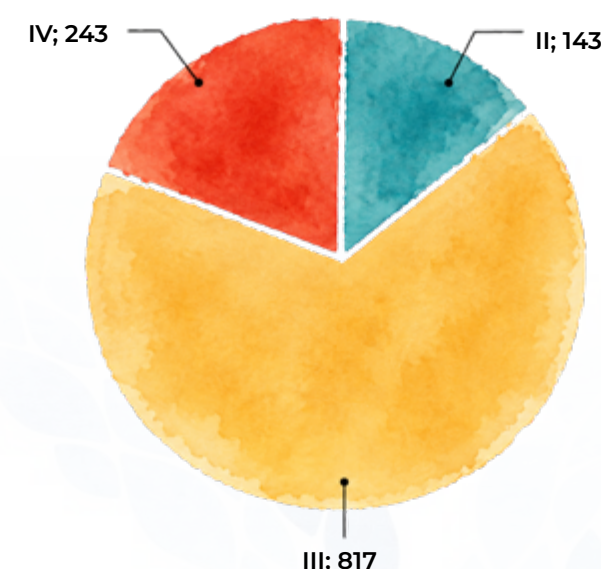
Berdasarkan rentang usia, pegawai BPPK didominasi oleh pegawai dengan kelompok usia antara 31 s.d. 40 tahun yang terdiri dari 541 pegawai (45%). Pegawai dengan kelompok usia antara 41 s.d. 50 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak kedua dengan jumlah 268 pegawai (22%), pegawai dengan kelompok usia antara 51 s.d. 60 tahun terdiri dari 256 pegawai (21%). Adapun jumlah pegawai BPPK dengan rentang usia 20 s.d. 30 tahun adalah 132 pegawai (11%) dan terdapat 6 pegawai dengan kelompok usia diatas 60 tahun

By age range, FETA employees are dominated by those in the 31 to 40 years age group, consisting of 541 employees (45%). Employees in the 41 to 50 years age group represent the second-largest group with 268 employees (22%), while employees in the 51 to 60 years age group consist of 256 employees (21%). Meanwhile, the number of FETA employees in the 20 to 30 years age range is 132 employees (11%), and there are 6 employees in the over-60 age group.



Dari sisi jenjang pendidikan, sebanyak 40% pegawai BPPK merupakan lulusan S1/D4, sementara 37% lainnya telah menempuh pendidikan S2. Komposisi ini bergerak dinamis sejalan dengan peningkatan kualitas SDM. Adapun pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S3 tercatat sebanyak 52 pegawai.

In terms of education level, 40% of FETA employees are graduates of the Bachelor's/Diploma IV (S1/D4) level, while another 37% have completed Master's (S2) education. This composition moves dynamically in line with the improvement in human resources quality. Employees who have completed Doctoral (S3) education are recorded at 52 employees.



Berdasarkan golongan kepangkatan, golongan III mendominasi komposisi pegawai BPPK dengan jumlah 817 pegawai (68%). Sementara itu, pada golongan IV tercatat sebanyak 243 pegawai (20%) dan golongan II sebanyak 143 pegawai (12%). Ke depannya, porsi pegawai golongan II diperkirakan akan terus menurun, seiring dengan peningkatan kualitas SDM yang ada dan terbatasnya penerimaan pegawai golongan II.

By rank group, Group III dominates the composition of FETA employees with 817 employees (68%). Meanwhile, Group IV is recorded at 243 employees (20%) and Group II at 143 employees (12%). Going forward, the proportion of Group II employees is expected to continue to decline, in line with the improvement in the quality of existing human resources and the limited recruitment of Group II employees.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management

3.2

MANAJEMEN TALENTA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2025, manajemen talenta merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM untuk mencari, mengelola, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi pegawai terbaik untuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan pelaksanaan manajemen talenta adalah guna memenuhi kebutuhan pengisian jabatan. Adapun tahapan pelaksanaan manajemen talenta di BPPK adalah sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan talenta;
2. Identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta;
3. Penetapan talenta;
4. Pengembangan talenta;
5. Penempatan talenta; dan
6. Pemantauan dan evaluasi talenta

Berdasarkan analisis kebutuhan talenta, terdapat 2 (dua) jabatan administrator di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang telah/ akan kosong pada tahun 2025 dan 2026 yakni:

1. Kepala Balai Diklat Keuangan Medan; dan 58
2. Kepala Balai Diklat Keuangan (terdapat jabatan yang akan kosong karena mutasi jabatan administrator pada Tahun 2026).

Pengisian kedua jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang dilaksanakan pada periode Juli s.d Desember 2025. Berdasarkan serangkaian tahapan manajemen talenta yang telah dilewati, dari 20 (dua puluh) calon talenta yang sebelumnya telah diusulkan oleh pimpinan unit masing-masing, ditetapkan 1 (satu) orang talenta ready untuk mengisi jabatan kosong.

TALENT MANAGEMENT

Pursuant to Minister of Finance Regulation Number 38 of 2025, talent management is a series of human resources management activities to identify, manage, develop, retain, and evaluate the best employees to be prepared as future leadership candidates according to organizational needs. The objective of implementing talent management is to meet the needs of position fulfillment. The stages of talent management implementation at FETA are as follows:

1. Talent needs analysis;
2. Talent identification, assessment, and mapping;
3. Talent designation;
4. Talent development;
5. Talent placement; and
6. Talent monitoring and evaluation

Based on the talent needs analysis, there are 2 (two) administrator positions within the FETA that have become or will become vacant in 2025 and 2026, namely:

1. Head of the Regional Campus of Finance Education and Training Medan; and
2. Head of the Regional Campus of Finance Education and Training (there is a position that will become vacant due to the transfer of an administrator position in 2026)

The filling of these two positions is carried out through the talent management mechanism implemented during the period of July to December 2025. Based on the series of talent management stages that have been completed, out of 20 (twenty) talent candidates previously proposed by their respective unit leaders, 1 (one) ready talent was designated to fill the vacant position.

TUGAS BELAJAR MANDIRI

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan di lingkungan Kementerian Keuangan namun tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan organisasi, pengelolaan tugas belajar di Kementerian Keuangan diatur dengan peraturan tersendiri. Pada tanggal 29 Mei 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 6 September 2024.

Pengertian tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier. Sesuai dengan PMK Nomor 34 Tahun 2024 tugas belajar dibagi menjadi dua, yaitu tugas belajar mandiri dan tugas belajar dibiayai. Tugas belajar mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan tugas belajar. PNS yang akan menempuh Tugas Belajar Mandiri harus mengajukan penerbitan Surat Tugas Belajar Mandiri secara berjenjang. Pada Tahun 2025, terdapat 31 pegawai BPPK yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Tugas Belajar Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penerbitan Surat Tugas Belajar Mandiri Tahun 2025	Jenjang Level		Jumlah Pegawai Number of Employees	
	S1	Bachelor's	21 Pegawai	21 Employees
Number of Self-Funded Study Assignment Letters Issued in 2025	S2	Master's	17 Pegawai	17 Employees
	S3	Doctorate	5 Pegawai	5 Employees

SELF-FUNDED STUDY ASSIGNMENT

To meet the need for employee competency development through the education pathway within the Ministry of Finance while still taking into account organizational dynamics and needs, the management of study assignments at the Ministry of Finance is governed by a separate regulation. On 29 May 2024, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia enacted Minister of Finance Regulation (PMK) Number 34 of 2024 concerning the Management of Study Assignments for Civil Servants within the Ministry of Finance. This regulation came into effect on 6 September 2024.

A study assignment is defined as an assignment given by the Personnel Development Officer or an officer who receives delegated authority to a Civil Servant to enhance competency in support of career development. In accordance with PMK Number 34 of 2024, study assignments are divided into two types, namely self-funded study assignments and funded study assignments. A self-funded study assignment is a study assignment financed independently by the Civil Servant undertaking the study assignment. A Civil Servant who will undertake a Self-Funded Study Assignment must apply for the issuance of a Self-Funded Study Assignment Letter through a tiered process. In 2025, there were 31 FETA employees who applied for the issuance of a Self-Funded Study Assignment Letter, with details as follows:

TUGAS BELAJAR DIBIYAI

Tugas Belajar Dibiayai adalah tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar. Pada tahun 2025 terdapat 45 pegawai BPPK yang berstatus sebagai pegawai tugas belajar dibiayai dengan rincian sebagai berikut.

FUNDED STUDY ASSIGNMENT

A Funded Study Assignment is a study assignment financed by a Scholarship Provider. A Scholarship Provider is a party that provides and/or manages the financing of a Study Assignment. In 2025, there were 45 FETA employees with the status of funded study assignment employees, with details as follows.

Jumlah Pegawai Tugas Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Number of Study Assignment Employees by Education Level

Jenjang Level		Jumlah Pegawai Number of Employees	
DIII	Diploma IV	4 Pegawai	4 Employees
DIV	Diploma IV	1 Pegawai	1 Employees
S2	Master's	31 Pegawai	31 Employees
S3	Doctorate	9 Pegawai	9 Employees

Jumlah Pegawai Tugas Belajar Berdasarkan Penyelenggara Beasiswa

Number of Study Assignment Employees by Scholarship Provider

Jenis Beasiswa Type of Scholarship	Jumlah Pegawai Number of Employees	DIII	DIV	S2	S3
LPDP	31 Pegawai	-	-	23	8
Ministerial Scholarship	8 Pegawai	-	-	8	-
Kazakhstan Government Scholarship	1 Pegawai	-	-	-	1
PKN STAN	5 Pegawai	4	1	-	-

PELATIHAN DI BPPK

Pada tahun 2025, terdapat 5.682 penugasan pelatihan yang telah selesai diikuti oleh pegawai BPPK. Penugasan pelatihan terdiri atas pelatihan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP Reguler) dan AKP Insidental dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut:

TRAINING WITHIN FETA

In 2025, there were 5,682 training assignments completed by FETA employees. Training assignments consist of training resulting from the Training Needs Analysis (Regular TNA) and Incidental TNA, with details as shown in Table 3.5 below:

Jumlah Penugasan Pelatihan di BPPK pada Tahun 2025
Program Individu Insidental Jabatan Mandatori

Number of Training Assignments at FETA in 2025

Pemilik Program Program Owner	Individu Individual	Insidental Incidental	Jabatan Position	Mandatori Mandatory	Strategis Strategic
Pusdiklat KM	108	106	119	1537	90
Pusdiklat AP	164	115	95	-	-
Pusdiklat Pajak	-	-	-	-	-
Pusdiklat BC	22	-	-	15	-
Pusdiklat KNPK	96	-	165	-	-
Pusdiklat KU	172	65	456	1108	51
Pusdiklat KP	43	8	3	1144	-
Total	605	294	838	3804	1411



PELATIHAN DI LUAR BADAN

Selain mengikuti pelatihan di BPPK, beberapa pegawai BPPK juga mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan eksternal (pelatihan di luar badan). BPPK telah melaksanakan 22 program Diklat di Luar Badan (DLB) pada Tahun 2025. Peserta program tersebut berasal dari seluruh unit di lingkungan BPPK dengan total peserta sebanyak 171 pegawai. Berikut ini adalah rincian Diklat Luar Badan yang diikuti oleh pegawai BPPK sepanjang tahun 2025.

EXTERNAL TRAINING PROGRAM

In addition to attending training within FETA, some FETA employees also attended training at external training institutions (training outside the agency). FETA conducted 22 External Training Programs (DLB) in 2025. Participants of these programs came from all units within FETA, with a total of 171 employees. The following are the details of the External Training Programs attended by FETA employees throughout 2025.

No	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Realisasi Peserta
1	Neuro Linguistic Programming NLP Practitioner Certificate	1
2	How to be a government spokesperson	1
3	Drafting contracts	1
4	Pelatihan ADDIE	29
5	Quality Audit	11
6	Pelatihan Program Sertifikasi Organization Development ODC	2
7	Sertifikasi P3K	3
8	Paper Camp SLNA 2025 – Systematic Literature Review & Network Analysis (SLNA) Berbantuan AI	1
9	Penguatan WI	20
10	Workshop Mansoskul Pejabat Fungsional	51
11	Program Sertifikasi	2
12	Design Training People Management Program Certification Program	8
13	Certified Knowledge Manager	2
14	Talent Management Career System	3
15	Pelatihan Marketing Sektor Publik	2
16	Pelatihan dan Sertifikasi Training Need Analysis	13
17	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1
18	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	3
19	Pelatihan dan Sertifikasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Kemnaker RI	5
20	Pelatihan dan Sertifikasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Kemnaker RI	4
21	Certified Knowledge Practitioner	8



BAB 4

ANALISIS KINERJA

PERFORMANCE ANALYSIS



Perumusan Kebijakan Pembelajaran

Learning Policy Formulation

4.1

Sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara, BPPK terus berupaya menyusun strategi pembelajaran yang mampu menjawab tantangan pengembangan SDM Kementerian Keuangan. Upaya tersebut sekaligus bertujuan untuk mewujudkan Kemenkeu sebagai *Learning Organization* melalui pendekatan Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan (LO-PT-KM). LO-PT-KM kemudian menjadi dasar bagi lima pilar strategi pembelajaran, yaitu:

1. Penyiapan Fungsionalisasi melalui Pembentukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM), penyusunan *Learning Path* JF di Bidang Keuangan Negara, dan penguatan pembelajaran *leadership* dan manajerial bagi JF;
2. Penguatan Program Pembelajaran *Cross Function* Tematik dan *Levelling* Pembelajaran melalui redesain program pembelajaran dengan pendekatan tematik lintas fungsi dan tingkat pembelajaran serta intensifikasi pembelajaran tema makro-ekonomi dan geopolitik yang akan diperkuat dengan dibentuknya Pusdiklat Keuangan Publik;
3. Penguatan Karakter, Mental, Budaya, dan *Leadership* melalui integrasi program pembentukan dan penguatan karakter serta penguatan peran Pimpinan Kemenkeu sebagai *Leaders as Teachers*;
4. Inklusivitas Pembelajaran melalui Perluasan Edukasi Keuangan Negara dengan 4 (empat) sasaran utama, yaitu akreditasi program pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara, perluasan pembelajaran bagi pengelola keuangan negara di KLID, perluasan Kemenkeu Corpu *Goes to Campus*, dan optimalisasi *E-Learning Open Access* pada Kemenkeu Learning Center (KLC).
5. Penguatan Pengelolaan Pendidikan melalui Peningkatan Kompetensi Dosen dan Pemutakhiran Kurikulum PKN STAN.

As the institution responsible for competency development in the field of state finance, FETA continuously develops learning policies and strategies to address the evolving human resource development challenges of the Ministry of Finance. This initiative also aims to establish the Ministry of Finance as a Learning Organization through the Integrated Learning and Knowledge Management (LO-PT-KM) approach. LO-PT-KM then serves as the basis for the five pillars of the learning strategy, namely:

1. *Preparation for functionalization by establishing the Center for Professional Development and Quality Assurance (Pusbin JFPM), the development of Functional Position Learning Paths in the field of State Finance, and the strengthening of leadership and management development for functional officers;*
2. *Enhancing cross-functional thematic learning programs and progressive learning pathways through the redesign of learning programs based on cross-functional thematic approaches and progressive learning levels, as well as the intensification of learning on macroeconomic and geopolitical issues, supported by the establishment of the Center for Public Finance Education and Training (Pusdiklat Keuangan Publik).*
3. *Strengthening character, mindset, culture, and leadership through integration of character development and strengthening programs, as well as the enhanced role of Ministry of Finance leaders under the Leaders as Teachers initiative.*
4. *Learning inclusivity through the expansion of state-finance education, with four main targets: accreditation of training and competency-certification programs in state finance, expansion of learning for state-finance managers in KLID, expansion of MoF Corpu Goes to Campus, and optimization of Open-Access E-Learning on the MoF Learning Center (KLC);*
5. *Strengthening of education management at PKN STAN through lecturer competency development and curriculum enhancement.*

4.2

Pengelolaan Pembelajaran Keuangan Negara

Management Of State-Finance Learning

Peran strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara memerlukan dukungan sumber daya manusia yang andal, akuntabel, dan kompeten dalam rangka penyelesaian tugas secara efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dalam mencetak sumber daya manusia dengan kriteria tersebut adalah dengan menyediakan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan organisasi.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, Kemenkeu mengimplementasikan strategi Kemenkeu *Corporate University* (Kemenkeu Corpu) sebagai tema sentral dalam pengembangan kompetensi pegawai. Strategi ini menggeser paradigma lama dari pelatihan yang terfragmentasi menjadi ekosistem pembelajaran yang terintegrasi, di mana pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai organisasi diselaraskan secara langsung dengan target kinerja organisasi serta didukung penuh oleh sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang mumpuni.

Dalam tatanan Kemenkeu Corpu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia terdiri atas pendidikan dan/atau pembelajaran. Pendidikan dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan vokasi oleh Politeknik Keuangan Negara STAN sedangkan pembelajaran dilakukan melalui jalur klasikal dan/atau non klasikal dengan mengutamakan pendekatan Model Pembelajaran Terintegrasi. Model Pembelajaran Terintegrasi merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan empat pilar utama, yaitu belajar mandiri (*self-learning*), pembelajaran terstruktur (*structured learning*), belajar dari orang lain (*social learning/learning from others*), dan pembelajaran praktik di tempat kerja (*learning from experience/learning while working*) yang dikelola secara sistematis serta didukung dengan manajemen pengetahuan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pengembangan kapasitas

The strategic role of the Ministry of Finance in managing state finance requires the support of human resources who are reliable, accountable, and competent in completing tasks effectively and efficiently. One key aspect of producing such human resources is providing learning that aligns with organizational needs.

In line with the spirit of bureaucratic reform and institutional transformation, the Ministry of Finance implements the MoF Corporate University (MoF Corpu) strategy as the central theme of employee competency development. This strategy shifts the old paradigm from fragmented training to an integrated learning ecosystem, in which education, learning, and the application of organizational values are directly aligned with organizational performance targets and fully supported by a capable knowledge management system.

Within the MoF Corpu framework, human resources (HR) competency development consists of education and/or learning. Education is delivered through formal and vocational education pathways by PKN STAN. In contrast, learning is delivered through classroom and/or non-classroom pathways, prioritizing the Integrated Learning Model approach. The Integrated Learning Model combines four main pillars—self-learning, structured learning, social learning (learning from others), and learning from experience (learning while working)—which are managed systematically and supported by knowledge management. This approach ensures that capacity-building does not stop in the classroom but continues and remains relevant to real challenges in the field, so that employee competency gaps are closed in a well-targeted manner.

A significant challenge in advancing employee competencies at the Ministry of Finance is the considerable number of staff requiring development, compounded by the geographical distribution of work units throughout Indonesia. Traditional

tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi terus berkelanjutan dan relevan dengan tantangan riil di lapangan, sehingga mampu menutup celah kompetensi pegawai secara tepat sasaran.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses peningkatan kapasitas pegawai di Kementerian Keuangan adalah besarnya jumlah pegawai yang membutuhkan pengembangan serta lokasi unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembelajaran tatap muka dirasakan belum maksimal karena hanya menyentuh sebagian kecil pegawai. Dengan semangat efisiensi dan efektivitas pembelajaran, lahirlah *Modern E-Learning*.

Modern E-Learning merupakan alat utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan ini hadir untuk menjawab tantangan pengembangan kapasitas pegawai secara masif dengan bantuan TIK. Tujuannya adalah menghasilkan SDM Kemenkeu yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif, berdampak nyata, dan mudah diakses. Pada pelaksanaannya, *modern e-learning* tidak hanya berupa pembelajaran via KLC, tapi bisa juga melalui virtual meeting dan *knowledge sharing* di seluruh unit.

PEMBELAJARAN DI BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan atau yang disingkat dengan nama Pusdiklat AP mempunyai tugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pusdiklat AP menyelenggarakan fungsi terutama melaksanakan pengelolaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan. Dengan stakeholder utamanya adalah pegawai Kementerian Keuangan (terutama

face-to-face training has demonstrated limited effectiveness, as it only benefits a small subset of employees. In order to enhance the efficiency and effectiveness of learning, Modern E-Learning has been implemented.

Modern e-learning serves as a key instrument for human resource development. This policy was introduced to address the challenge of developing employee capabilities at scale through the effective use of information and communication technology. Its goal is to develop competitive Ministry of Finance human resources through an efficient, relevant, applicable, genuinely impactful, and easily accessible learning process. In practice, modern e-learning is not limited to learning via KLC but also includes virtual meetings and knowledge sharing across all units.

LEARNING IN BUDGET AND TREASURY

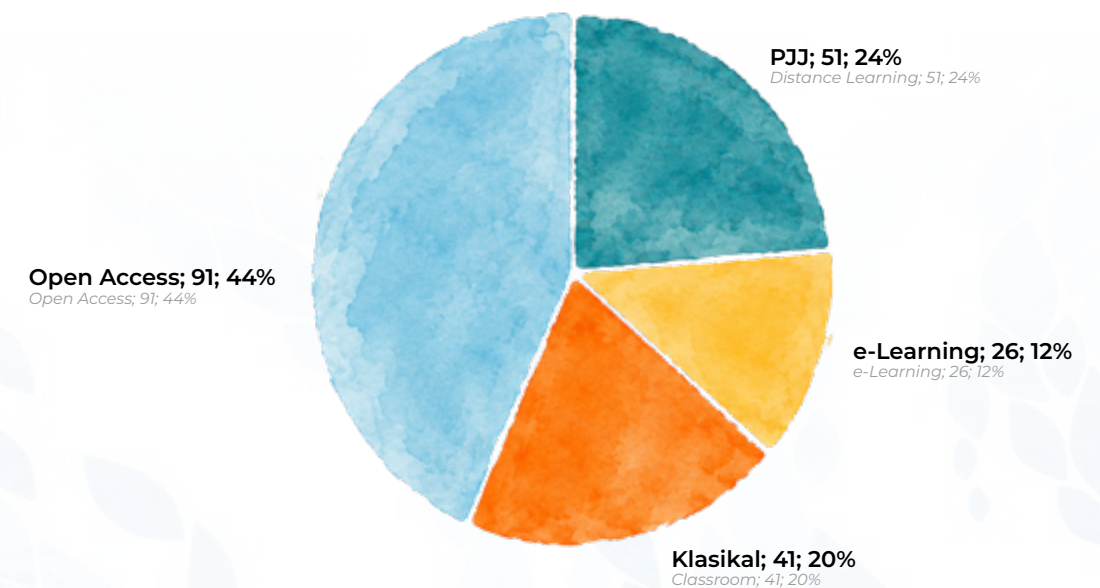
The Center for Budget and Treasury Education and Training (Pusdiklat AP) is mandated to develop and oversee training programs related to state finance in the areas of budgeting, treasury, and fiscal balance, in accordance with the technical policies established by the Head of the Agency. The Center for Budget and Treasury Education and Training primarily manages technical and/or functional training and knowledge management related to state finance in budgeting, treasury, and fiscal balance. Its main stakeholders are Ministry of Finance employees (especially Directorate General of Budget (DJA), the Directorate General of Treasury (DJPB), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and

DJPB, DJA dan DJPK) serta pegawai di pemerintah daerah. Proses pelatihan dilakukan dengan berbagai metode, yakni klasikal, PJJ, *E-Learning*, *Blended Learning* dan *Open Access*.

Selama tahun 2025 terdapat 118 program pembelajaran reguler yang dilaksanakan, dengan program pembelajaran terbanyak dilakukan secara PJJ sebanyak 51 program, klasikal sebanyak 41 program, *e-learning* reguler sebanyak 26 program dan *e-learning* open access sebanyak 91 program. Pembelajaran digital masih menjadi pilihan utama dalam kegiatan pembelajaran karena memudahkan Pusdiklat untuk menjangkau peserta secara luas. pengelolaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan. Dengan *stakeholder* utamanya adalah pegawai Kementerian Keuangan (terutama DJPB, DJA dan DJPK) serta pegawai di pemerintah daerah. Proses pelatihan dilakukan dengan berbagai metode, yakni klasikal, PJJ, *E-Learning*, *Blended Learning* dan *Open Access*.

regional government employees. The training process uses various methods: classroom, distance learning (PJJ), E-Learning, Blended Learning, and Open Access.

In 2025, a total of 118 regular educational programs were implemented. The majority comprised distance learning (PJJ) with 51 programs, classroom-based sessions with 41 programs, regular e-learning with 26 programs, and open-access e-learning with 91 programs. Digital learning remains the primary choice because it enables the training center to reach a broad audience.



Adapun program unggulan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

The flagship program of The Center for Budget and Treasury Education and Training in 2025 was as follows.

Pelatihan Creditworthiness Academy

Banyaknya kebutuhan dan perminatan Pemerintah daerah akan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur sehingga para pejabat pemerintah daerah diharapkan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mampu melakukan penilaian mandiri kelayakan kredit yang terstruktur, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kelayakan pinjaman, dan menerapkan rencana aksi untuk meningkatkan kelayakan pinjaman dan kapasitas pinjaman Pemerintah Daerah. Target peserta untuk program unggulan ini adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang telah siap, hampir siap, dan/atau memiliki minat untuk melakukan pinjaman dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah.

Pelatihan diselenggarakan pada Selasa s.d. Kamis, 11 s.d. 13 November 2025 pukul 08.30 sampai dengan selesai. Kegiatan diselenggarakan secara luring di Istana Ballroom I 4th Floor, Sari Pacific Jakarta – Autograph Collection Jl. M.H. Thamrin No.6, Jakarta Pusat 10.

Peserta pelatihan merupakan perwakilan Pemerintah Daerah (Kepala Badan Perencanaan, Sekretaris Kab./Kota, bahkan Bupati), Pasra peserta sangat antusias pada sesi diskusi selama pelatihan. Hal ini menunjukkan relevansi materi yang disampaikan dengan ekspektasi/kebutuhan Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi, pelatihan dinilai telah berhasil meningkatkan kompetensi dalam penilaian kelayakan kredit mandiri dan penyusunan rencana aksi pembiayaan daerah terbukti 65,8% peserta mengalami peningkatan nilai post-test. Peserta memberikan indeks kepuasan (dalam skala 5) yang sangat tinggi yakni kepuasan atas penyelenggara sebesar 4,74 dan kepuasan atas pengajar sebesar 4,80. Hal-hal yang diapresiasi peserta diantaranya adalah kualitas materi, Adaptasi Self-Assessment Toolkit khas Indonesia sehingga dapat memberikan wawasan praktis dan global serta terbukti membantu peserta dalam menghasikan rencana aksi implementatif bagi pembiayaan infrastruktur daerah.

Creditworthiness Academy Training

Given the substantial need among regional governments for loans to finance infrastructure development, regional government officials are expected to have the human resources to conduct a structured self-assessment of creditworthiness, identify the key factors affecting loan eligibility, and implement action plans to improve loan eligibility and borrowing capacity. The target participants for this flagship program are regional government officials who are ready, nearly ready, or interested in borrowing for regional infrastructure development.

The training was held on Tuesday–Thursday, 11–13 November 2025, from 08:30 AM until completion. It was conducted in person at the Istana Ballroom I, 4th Floor, Sari Pacific Jakarta – Autograph Collection, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Central Jakarta.

Participants were representatives of regional governments (Heads of Planning Agencies, Regency/City Secretaries, and even Regents). They were highly enthusiastic during the discussion sessions, indicating the material's relevance to regional governments' expectations and needs. Based on the evaluation, the training was assessed as having successfully improved competencies in self-assessing creditworthiness and preparing regional financing action plans, as evidenced by 65.8% of participants improving their post-test scores. Participants gave very high satisfaction indices (on a 5-point scale): 4.74 for the organizer and 4.80 for the instructors. Participants appreciated the quality of the material and the adaptation of an Indonesia-specific Self-Assessment Toolkit, which provided both practical and global insights and proved helpful in producing implementable action plans for regional infrastructure financing.

PEMBELAJARAN DI BIDANG PERPAJAKAN

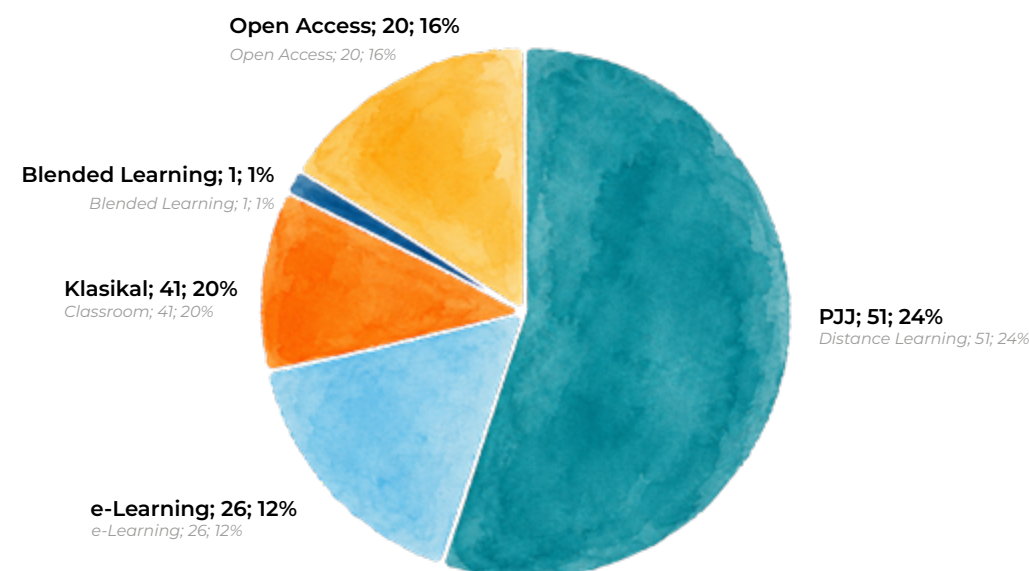
Dalam rangka mendukung salah satu misi Kementerian Keuangan yaitu “mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusdiklat Pajak menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang khususnya diperuntukkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan aparatur negara lainnya yang berhubungan erat dengan perpajakan. Sebagai penyelenggara pembelajaran di Bidang Perpajakan, stakeholder utama Pusdiklat Pajak adalah para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, karena kompetensi perpajakan merupakan kompetensi yang juga dibutuhkan oleh Unit Eselon I lain maupun instansi/Kementerian lain, maka stakeholder Pusdiklat Pajak juga dapat berasal dari Unit Eselon I lain dan/atau Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Institusi lainnya.

Selama tahun 2025, metode pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak adalah klasikal, pelatihan jarak jauh (PJJ), e-learning, workshop, dan blended learning (klasikal-PJJ). Jumlah program pembelajaran yang dimiliki oleh Pusdiklat Pajak pada tahun 2025 mencapai 128 program pembelajaran baik yang diselenggarakan di Pusdiklat Pajak ataupun di Balai Diklat. Pelatihan Jarak Jauh merupakan metode yang mendominasi program pembelajaran dengan 71 program (55%). E-learning regular dan e-learning open access menjadi program pembelajaran terbanyak kedua dengan masing-masing 20 program. Berikut ini adalah komposisi program pembelajaran di Pusdiklat Pajak sepanjang tahun 2025.

LEARNING IN TAXATION

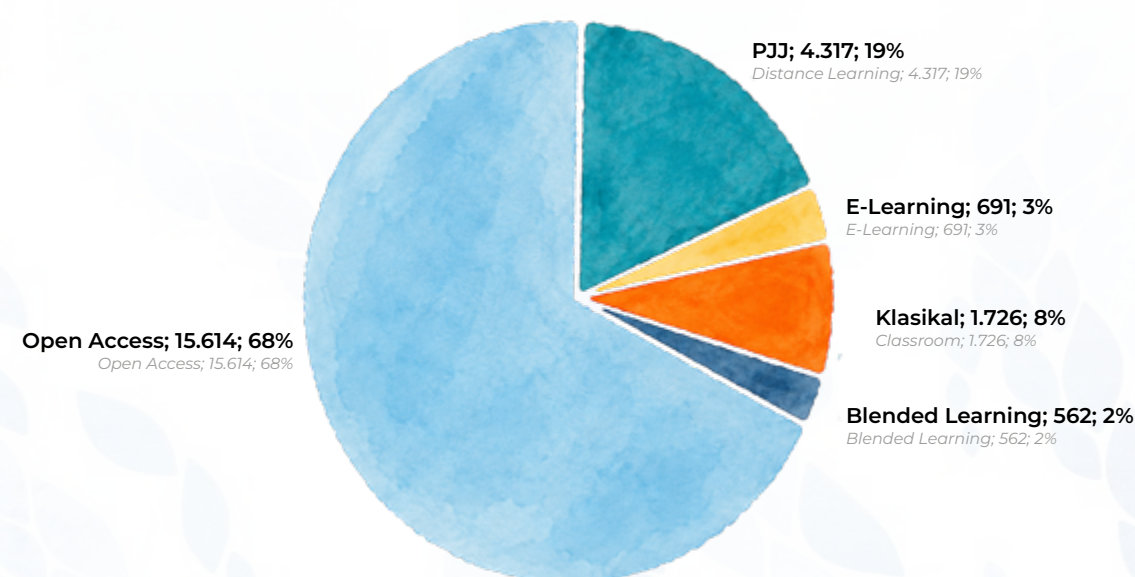
To support one of the Ministry of Finance's missions—“to achieve maximum, equitable state revenue that supports the national economy”—FETA, through Center for Tax Education and Training (Pusdiklat Pajak), conducts various competency-development activities, particularly for employees of the Directorate General of Taxes and other state apparatus closely connected with taxation. As the organizer of tax learning, the primary stakeholders of Center for Tax Education and Training are employees of the Directorate General of Taxes. However, tax competency is also needed by other Echelon I Units and other agencies/ministries. Therefore, stakeholders may also include other Echelon I Units and/or Ministries, Agencies, Regional Governments, and other Institutions.

In 2025, Center for Tax Education and Training offered learning methods including in-person, training, distance learning (PJJ), e-learning, workshops, and blended learning (classroom-PJJ). A total of 128 learning programs were held in 2025, conducted both at Center for Tax Education and Training and at the Regional Campus of Finance Education and Training (Balai Diklat). Distance learning was the dominant method, with 71 programs (55%). Regular e-learning and open-access e-learning were the second most common, each with 20 programs. The following is the composition of learning programs in Center for Tax Education and Training throughout 2025.



Dari aspek realisasi peserta, metode open access merupakan pemberi kontribusi terbesar di Pusdiklat Pajak dengan 15.614 peserta atau sebesar 68% dari jumlah keseluruhan realisasi peserta pembelajaran. Di peringkat kedua adalah PJJ dengan realisasi sebesar 4.317 peserta (19%). Secara keseluruhan, pembelajaran digital masih mendominasi pelaksanaan pembelajaran di bidang perpajakan baik dari sisi program maupun realisasi peserta.

From the perspective of participant realization, the open-access method accounted for the largest share at the Center for Tax Education and Training, with 15,614 participants, or 68% of total learning participants. In second place was distance learning with 4,317 participants (19%). Overall, digital learning still dominates the delivery of learning in taxation, both in terms of programs and participant realization.



Potensi kebutuhan pembelajaran instansi pemerintah daerah terkait pajak daerah sangatlah besar. Kebutuhan tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh Pusdiklat Pajak dikarenakan keterbatasan sumber daya pembelajaran khususnya tenaga pengajar. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mencetak tenaga pengajar pada unit pengguna yang kompeten melalui program *Training of Trainer* (ToT). Sejalan dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang keuangan Negara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah didorong untuk dapat mandiri dalam melaksanakan pembelajaran melalui akreditasi program pembelajaran. Persyaratan teknis pengajuan akreditasi antara lain program pelatihan telah diselenggarakan pada 1 (satu) tahun terakhir dan ketersediaan tenaga pengajar di Bidang Keuangan Negara. Hal inilah yang mendorong lahirnya program unggulan di Pusdiklat Pajak, yakni **Training of Trainers (ToT) Pajak Daerah**. Adanya ToT akan mendukung penyediaan tenaga pengajar yang menjadi sub unsur penilaian akreditasi program dengan salah satu indikator penilaian Training of Trainer (ToT) Substansi.

The potential demand for learning programs among local government institutions in the area of regional taxation is substantial. However, this demand has not been fully met by the Tax Education and Training Center due to limitations in learning resources, particularly in terms of instructors.

One of the key strategies to address this challenge is to develop competent instructors within user units through a Training of Trainers (ToT) program. In line with Head of the FETA Regulation No. 2 of 2023 concerning Guidelines for the Accreditation of Technical Training Programs in the field of State Finance, government education and training institutions are encouraged to achieve greater self-reliance in delivering learning programs through program accreditation. The technical requirements for accreditation include, among others, that the training program has been delivered within the last year and that qualified instructors in the field of state finance are available. This requirement has driven the development of a flagship program at the Tax Education and Training Center, namely the Regional Tax Training of Trainers (ToT) program.

The ToT program is expected to support the provision of instructors, which constitutes a sub-component of the program accreditation assessment, particularly under the Training of Trainer (ToT) substance indicator.



Training of Trainers (ToT) Pajak Daerah

Program unggulan Pusdiklat Pajak pada tahun 2025 adalah “Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Daerah melalui Kegiatan *Training of Trainers* dan/ atau *Learning Consultant*”. Program ini bertujuan untuk mencetak calon pengajar yang berkompeten di bidang perpajakan daerah yang kemudian menjadi DUTA SAKTI (Siap Aksi Kembangkan KompeTensi). Pelatihan unggulan Pusdiklat Pajak pada tahun 2025 terdiri dari topik jurusita pajak daerah, pemeriksa pajak daerah, serta Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Target peserta untuk program unggulan ini adalah pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Program unggulan Pusdiklat Pajak tidak hanya diselenggarakan di Pusdiklat Pajak namun juga di Balai Diklat yakni Balai Diklat Keuangan Denpasar dan Balai Diklat Keuangan Makassar. Berikut ini adalah jadwal penyelenggaraannya sepanjang tahun 2025.

Jadwal Penyelenggaraan Program Unggulan Training of Trainers Pajak Daerah

Schedule for the Regional Tax Training of Trainers Flagship Program

No.	Nama Pelatihan Unggulan	Akt.	Tanggal Penyelenggaraan	Lokasi	Metode
1	Training of Trainer Jurusita Pajak Daerah	I	8-12 Desember 2025	Pusdiklat Pajak	Klasikal
2	Training of Trainer Pemeriksa Pajak Daerah	I	8-12 Desember 2025	Pusdiklat Pajak	Klasikal
3	Training of Trainer Pemeriksa Pajak Daerah	II	8-12 Desember 2025	BDK Makassar	Klasikal
4	Training of Trainer Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	I	15-19 Desember 2025	Pusdiklat Pajak	Klasikal
5	Training of Trainer Jurusita Pajak Daerah	II	15-19 Desember 2025	BDK Denpasar	Klasikal
6	Training of Trainer Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	II	15-19 Desember 2025	BDK Makassar	Klasikal
7	Training of Trainer Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	III	15-19 Desember 2025	Pusdiklat Pajak	Klasikal

Regional Tax Training of Trainers (ToT)

The Center for Tax Education and Training flagship program in 2025 was “Strengthening the Capacity of Regional Tax Management HR through Training of Trainers and/or Learning Consultant Activities.” The program aims to develop competent prospective instructors in regional taxation who then become DUTA SAKTI (Ready to Act, Develop Competency). This flagship training program covered regional tax bailiffs, regional tax auditors, and the Assessment of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The target participants for this flagship program were regional government employees.

The Center of Tax Education and Training Center implemented this flagship program not only at its main campus but also at the Regional Finance Education and Training Centers (BDK) in Denpasar and Makassar.

The following is the 2025 schedule:

Dari target awal sejumlah 228 peserta, realisasi peserta yang mengikuti program unggulan di Pusdiklat Pajak adalah 236 peserta dimana 205 peserta merupakan pegawai BPSDM (86,9%) dan 31 peserta lainnya merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota (13,1%). Dari hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan, ToT Pajak Daerah dipandang sebagai progam strategis yang relevan untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pajak daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Narasumber yang dihadirkan juga dinilai kompeten serta mampu menjembatani teori dan praktik lapangan. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan diantaranya terkait proses penetapan peserta yang belum sepenuhnya firm sejak awal serta pelaksanaan di akhir tahun anggaran menyebabkan waktu persiapan terbatas.

PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Selaras dengan visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, dan Misi Kementerian Keuangan yaitu:

- Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif, serta mendorong transformasi ekonomi.
- Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional.
- Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberik dampak bagi kesejahteraan rakyat.
- Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko.
- Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi (Budaya Kemenkeu Satu) untuk akselerasi transformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

From an initial target of 228 participants, these flagship programs reached 236 participants, of whom 205 were Human Resources Development Agency (BPSDM) employees (86.9%) and 31 were Regency/ City Government employees (13.1%). Based on the learning evaluation, the Regional Tax ToT was viewed as a strategic program that helps build regional tax HR capacity to optimize regional revenue. The resource persons were also assessed as competent and able to bridge theory and field practice. However, there remains room for improvement, including a participant-selection process that was not fully established from the outset and implementation at the end of the fiscal year, which left limited preparation time.

LEARNING IN CUSTOMS AND EXCISE

In line with the Ministry of Finance's vision of becoming a State Finance Manager to realize an Indonesian Economy that is Productive, Competitive, Inclusive, and Equitable, and its mission to:

- Formulating and managing proactive, adaptive fiscal, financial-sector, and economic policies that drive economic transformation.
- Achieving maximum, equitable state revenue that supports the national economy.
- Improving the quality of state expenditure that benefits public welfare.
- Enhancing accountability and innovation in the management of treasury, state assets, and financing and risk.
- Realizing the management of organizational resources and information technology (the Kemenkeu Satu (One Ministry of Finance) Culture) to accelerate the Ministry of Finance's bureaucratic transformation.



Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai sebagai Unit Eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memiliki visi yaitu menjadi Pusdiklat di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka di Dunia dalam rangka Mendukung Visi BPPK Menghasilkan SDM Keuangan Negara yang Unggul dan Beretika, dan misi yaitu:

1. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University.
2. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University.
3. Melaksanakan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.
4. Meningkatkan kerja sama dengan institusi-institusi terbaik di tingkat regional maupun internasional.

Stakeholders utama Pusdiklat Bea dan Cukai berasal dari Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga National Single Window, selain juga berasal dari Pegawai Kementerian Keuangan, Perwira TNI Angkatan Udara (TNI AU), Pegawai Customs Administration negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, lembaga mitra kerja sama lainnya seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Format Pembelajaran Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2025 bervariasi mulai dari Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), Pelatihan Klasikal, *E-Learning*, Pelatihan

The Center for Customs and Excise Education and Training, as an Echelon II Unit under FETA, is tasked with overseeing training and competency certification related to state finance in customs and excise, based on the technical policy established by the Head of the Finance Education and Training Agency. Its vision is to become a world-leading customs and excise training center in support of FETA's vision of producing superior, ethical state-finance human resources, with the following missions:

1. *Strengthening high-impact training for state-finance human resources in customs and excise within the Ministry of Finance Corporate University framework.*
2. *Realizing reliable state-finance knowledge management in customs and excise within the Ministry of Finance Corporate University framework.*
3. *Implementing a digital-based governance system and optimal resource management.*
4. *Enhancing cooperation with the best institutions at the regional and international levels.*

The main stakeholders of Center for Customs and Excise Education and Training are employees of the Directorate General of Customs and Excise and the Indonesia National Single Window Agency, as well as Ministry of Finance employees, Indonesian Air Force officers, Customs Administration officers from Asia-Pacific countries, and other partner institutions such as the Indonesian Migrant Worker Protection Board.

The Center for Customs and Excise Education and Training's 2025 learning formats varied, from distance learning, in-person training, e-learning, international training, open-access e-learning (accessible to ASN of ministries/agencies and the general public), to blended

Internasional, E-Learning Open Access (Dapat diakses ASN Kementerian/ Lembaga dan masyarakat umum), Pelatihan Blended Learning (Kombinasi E-learning dan/atau PJJ, dan Pelatihan Klasikal). Rumpun pembelajaran kepabeanan dan cukai meliputi rumpun pengawasan, teknis dan fasilitas kepabeanan, teknis dan fasilitas cukai, dukungan manajerial kepabeanan dan cukai, dan dukungan teknis kepabeanan dan cukai lainnya.

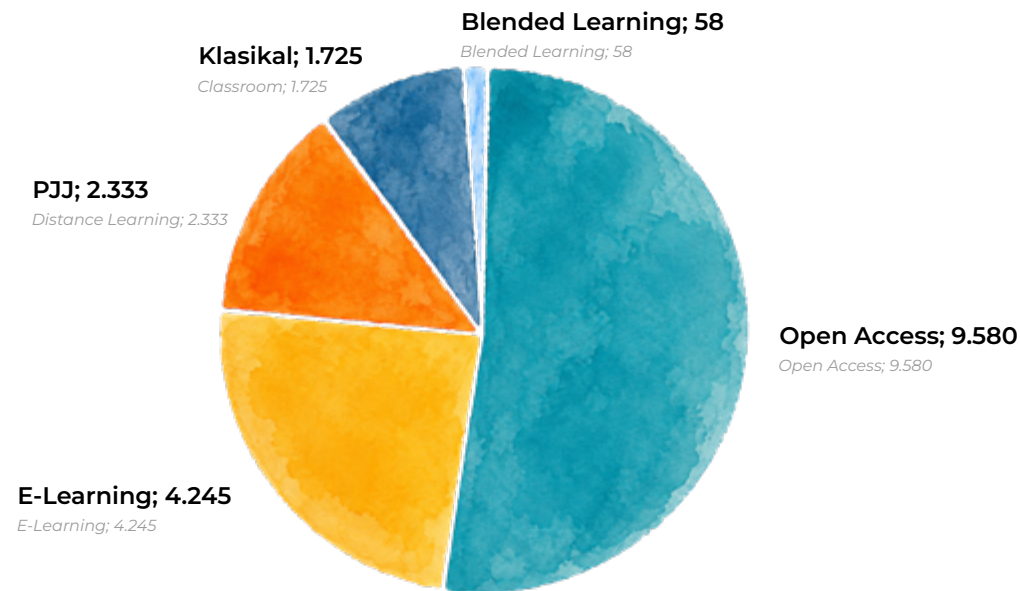
Sepanjang tahun 2025, Pusdiklat Bea dan Cukai telah menyelenggarakan 175 program pembelajaran dengan total 18.123 peserta. Program tersebut dilaksanakan melalui lima metode pembelajaran, yaitu Klasikal, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), *E-Learning*, *Open Access*, dan *Blended Learning*. Variasi metode ini menunjukkan komitmen Pusdiklat dalam menyediakan pembelajaran yang adaptif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Secara komposisi program, dari total 175 program pembelajaran yang diselenggarakan pada tahun 2025, metode PJJ menjadi metode dengan jumlah penyelenggaraan terbanyak, yaitu 64 program (36,6%), diikuti metode Klasikal sebanyak 44 program (25,1%), *Open Access* sebanyak 33 program (18,9%), *E-Learning* sebanyak 31 program (17,7%), *Blended Learning* sebanyak 2 program (1,1%), serta KCOC sebanyak 1 program (0,6%). Dominasi metode PJJ menunjukkan bahwa pembelajaran daring terstruktur menjadi strategi utama dalam menjangkau peserta secara luas dengan tetap menjaga kualitas proses pembelajaran. Sementara itu, metode klasikal tetap dipertahankan untuk mendukung pelatihan teknis yang memerlukan praktik langsung dan interaksi intensif.

learning (a combination of e-learning and/or distance learning and in-person training). The customs and excise learning clusters cover customs enforcement cluster; customs technical and facilitation cluster; excise technical and facilitation cluster; customs and excise managerial support cluster; and other customs and excise technical support cluster.

Throughout 2025, the Center for Customs and Excise Education and Training conducted 175 learning programs with a total of 18,123 participants. These programs were delivered through five methods: classroom (in-person), distance learning, e-learning, open access, and blended learning. This variety reflects the Center's commitment to providing adaptive, flexible learning suited to organizational needs.

By program composition, of the 175 programs held in 2025, distance learning was the most frequent method with 64 programs (36.6%), followed by classroom (in-person) with 44 programs (25.1%), open access with 33 programs (18.9%), e-learning with 31 programs (17.7%), blended learning with 2 programs (1.1%), and MoF Corpu Open Class with 1 program (0.6%). The dominance of distance learning shows that structured online or e-learning has become the main strategy for reaching participants widely while maintaining learning quality. Classroom or in-person learning, meanwhile, is retained to support technical training requiring hands-on practice and intensive interaction.



Apabila ditinjau dari jumlah peserta, metode *Open Access* memberikan kontribusi terbesar dengan 9.580 peserta (52,9% dari total peserta). Hal ini menunjukkan tingginya minat terhadap pembelajaran mandiri yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Metode *E-Learning* menjangkau 4.245 peserta (23,4%), sedangkan PJJ diikuti oleh 2.333 peserta (12,9%). Adapun metode Klasikal diikuti oleh 1.725 peserta (9,5%) dan *Blended Learning* sebanyak 58 peserta (0,3%). Data ini menunjukkan bahwa transformasi digital learning telah berjalan secara optimal, dengan lebih dari 75% peserta mengikuti pembelajaran melalui metode non-klasikal.

Dari sisi efektivitas penyelenggaraan, rata-rata jumlah peserta per program menunjukkan bahwa metode *Open Access* dan *E-Learning* memiliki daya jangkauan yang tinggi dan bersifat scalable, dengan rasio peserta yang jauh lebih besar dibandingkan metode klasikal. Namun demikian, metode klasikal

By number of participants, the open access method contributed the most with 9,580 participants (52.9% of total participants), reflecting strong interest in flexible, anytime-accessible self-learning. E-learning reached 4,245 participants (23.4%), while distance learning was attended by 2,333 participants (12.9%). Classroom (in-person) method was attended by 1,725 participants (9.5%) and blended learning method by 58 participants (0.3%). This data shows that the digital-learning transformation has run optimally, with more than 75% of participants learning through non-classroom methods.

In terms of delivery effectiveness, the average number of participants per program shows that the open access and e-learning methods have high, scalable reach, with a far larger participant ratio than the classroom method. Nonetheless, the classroom method retains strategic

nilai strategis karena memberikan kedalaman pembelajaran dan penguatan keterampilan teknis yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh metode daring.

Berdasarkan lokasi penyelenggaraan, sebanyak 16.501 peserta (91%) mengikuti program yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai di tingkat pusat, sedangkan sisanya tersebar pada berbagai BDK. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pembelajaran yang dikelola oleh Pusat memberikan kontribusi dominan terhadap capaian peserta secara keseluruhan. Di sisi lain, BDK tetap berperan dalam mendukung pemerataan akses pelatihan, khususnya untuk pembelajaran yang membutuhkan dukungan fasilitas wilayah.

Secara keseluruhan, capaian pembelajaran tahun 2025 menunjukkan bahwa Pusdiklat Bea dan Cukai telah berhasil menyelenggarakan program pembelajaran secara efektif, menjangkau peserta dalam jumlah besar, serta mengoptimalkan pemanfaatan metode pembelajaran digital tanpa mengabaikan pembelajaran tatap muka yang bersifat teknis dan aplikatif. Capaian ini mencerminkan kinerja pembelajaran yang adaptif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tahun 2025, Pusdiklat Bea dan Cukai melaksanakan program unggulan berupa *Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility* (*E-Learning Pengantar Green Customs: Penguatan Peran Pegawai DJBC*).

value because it provides learning depth and the strengthening of technical skills that cannot be fully replaced by online methods.

By delivery location, 16,501 participants (91%) attended programs conducted by the Center for Customs and Excise Education and Training at the central level, while the remainder were spread across various Regional Campus of Finance Education and Training. This shows that centrally managed learning digitalization makes the dominant contribution to overall participant achievement. The Regional Campus of Finance Education and Training, meanwhile, continue to play a role in supporting equitable training access, especially for learning that requires regional facility support.

Overall, the 2025 learning achievement shows that the Center for Customs and Excise Education and Training successfully delivered learning programs effectively, reached large numbers of participants, and optimized the use of digital learning methods without neglecting technical, applied face-to-face learning. This reflects adaptive, efficient learning performance aligned with the need to build employee competencies within the Directorate General of Customs and Excise.

In 2025, the Center for Customs and Excise Education and Training carried out a flagship program: Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility (the Green Customs Introduction E-Learning: Strengthening the Role of DJBC Employees).

Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility (E-Learning Pengantar Green Customs: Penguatan Peran Pegawai DJBC)

Program ini dilatarbelakangi kebutuhan akan tersedianya Sumber Daya Manusia DJBC yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan yang diwujudkan dalam berbagai pilihan kebijakan, penegakan hukum dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang mendukung serta selaras dengan *Green Customs Action Plan*. Kejahatan lingkungan, seperti perdagangan ilegal zat perusak ozon, bahan kimia berbahaya atau spesies terancam punah telah berkembang menjadi bisnis kejahatan lingkungan meningkat 5–7% per tahun, jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi global.

World Customs Organization (WCO) telah memasukkan *Green Customs* dalam rencana strategis Tahun 2022–2025 sebagai salah satu focus area dan telah menyusun WCO *Green Customs Action Plan* (GCAP). GCAP merupakan rencana aksi untuk memperkuat kapasitas institusi kepabeanan dalam mengurangi jejak lingkungan, mendukung perdagangan hijau, serta menciptakan kebijakan yang inovatif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

Program *Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility* (E-Learning Pengantar Green Customs: Penguatan Peran Pegawai DJBC) secara resmi diluncurkan melalui *Seminar Soft Launching The First Bilingual E-Learning: Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility* pada tanggal 16 Oktober 2025. Pelaksanaan E-Learning Batch I diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2025 sedangkan

Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility

This program was motivated by the need for Directorate General of Customs and Excise human resources who understand and care about the environment, expressed through various policy choices, law enforcement, and innovations in carrying out duties and functions that support and align with the Green Customs Action Plan. Environmental crimes such as the illegal trade of ozone-depleting substances, hazardous chemicals, or endangered species have grown into an environmental-crime business rising 5–7% per year, far faster than global economic growth.

The World Customs Organization (WCO) included Green Customs in its 2022–2025 strategic plan as a focus area and developed the WCO Green Customs Action Plan (GCAP). The GCAP is an action plan to strengthen customs institutions' capacity to reduce their environmental footprint, support green trade, and create innovative policies to achieve environmental sustainability.

The Introduction to Green Customs program was officially launched through the soft launching Seminar of The First Bilingual E-Learning: Introduction to Green Customs: Empowering Customs Officers for Environmental Responsibility on 16 October 2025. Batch I of the e-learning was held on 21–24 October

batch II dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 31 Oktober 2025. Berdasarkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan terhadap lebih dari 300 peserta (baik batch I dan II) diperoleh hasil tingkat kepuasan sangat baik.

Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) Asia/Pacific

Sebagai RTC Indonesia, Pusdiklat Bea dan Cukai telah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas untuk pegawai administrasi kepabeanan di Kawasan Asia Pasifik selama Tahun 2025 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. WCO ICCW Workshop on Risk Indicators, Data, Intelligence, and Stakeholder Cooperation for Frontline Customs Officer

Program ini bertujuan agar peserta dapat melakukan pengembangan profil dan indikator risiko serta kerja sama antarlembaga dalam pengawasan Perdagangan Satwa Liar secara ilegal (*Illegal Wildlife Trade/ IWT*).

Waktu Penyelenggaraan: 14 – 17 April 2025

Lokasi Penyelenggaraan: Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta

Jumlah Peserta: 27 peserta yang berasal dari Administrasi Kepabeanan dan Imigrasi di kawasan Asia Pasifik, terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang peserta yang didanai oleh WCO dan 6 (enam) orang peserta yang didanai oleh non-WCO. Peserta pelatihan berasal dari Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Tailan, dan Vietnam. Kemudian, pelatihan ini juga diikuti oleh 7 (tujuh) observer dari DJBC dan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Narasumber: 1 (satu) orang fasilitator dari Sekretariat WCO

Sumber Dana: *sharing cost* antara World Customs Organization dan Pusdiklat Bea dan Cukai.

2025, while batch II was held on 28–31 October 2025. Based on the learning evaluation of more than 300 participants (across both batches), the results showed a very high level of satisfaction.

The Customs and Excise Training Center as the World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) Asia/Pacific

As RTC Indonesia, the Center for Customs and Excise Education and Training conducted capacity-building activities for customs administration officers in the Asia-Pacific region during 2025, with details as follows:

a. WCO ICCW Workshop on Risk Indicators, Data, Intelligence, and Stakeholder Cooperation for Frontline Customs Officer

This program aims to enable participants to develop risk profiles and indicators and inter-agency cooperation in monitoring Illegal Wildlife Trade (IWT).

Date: 14–17 April 2025

Location: The Center for Customs and Excise Education and Training, Jakarta

Participants: 27 participants from Customs and Immigration Administrations in the Asia-Pacific region, comprising 21 participants funded by the WCO and 6 funded by non-WCO sources. Participants came from Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam.

The training was also attended by 7 observers from Directorate General of Customs and Excise and the Center for Customs and Excise Education and Training.

Resource Person: 1 facilitator from the WCO Secretariat

Funding Source: Cost-sharing between the World Customs Organization and the Center for Customs and Excise Education and Training.

- b. WCO Pre-Accreditation Workshop for Expert Trainers (ET) on Anti Money Laundering/Counter-Terrorism Financing (AML-CTF)**
Program ini bertujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah jumlah experts yang melakukan kegiatan peningkatan kapasitas atas nama WCO, dengan keahlian khusus terkait penyelenggaraan dan penyampaian materi pelatihan dan mendukung Administrasi Pabean anggota dalam penguatan kapasitas di area AML-CTF. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi pegawai untuk menunjukkan keahlian strategis dan operasional, serta kemampuan bekerja dalam skala internasional.
Waktu Penyelenggaraan: 22 – 26 September 202
Lokasi Penyelenggaraan: Jakarta
Jumlah Peserta: 10 (sepuluh) kandidat WCO Technical Expert yang berasal dari Bea dan Cukai negara Australia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, India, Indonesia, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, dan Papua Nugini.
Narasumber: 3 (tiga) orang fasilitator dari Sekretariat WCO
Sumber Dana: sharing cost antara Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State dan Pusdiklat Bea dan Cukai.
- c. 23rd World Customs Organization - Asia Pacific Regional Training Center (WCO A/P RTC) Heads Meeting**
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
a. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara ROCB A/P, dan seluruh Regional Training Centres di kawasan Asia/Pasifik.
b. Menyelaraskan strategi dan arah pengembangan kapasitas pelatihan kepabeanean dalam rangka mendukung modernisasi administrasi kepabeanean di tingkat global dan regional.

- b. WCO Pre-Accreditation Workshop for Expert Trainers (ET) on Anti Money Laundering/Counter-Terrorism Financing (AML-CTF)**
This program aims to increase the number of experts who conduct capacity-building on behalf of the WCO, with specialized expertise in organizing and delivering training material and supporting member Customs Administrations in strengthening capacity in the AML-CTF area. It also offers an opportunity for employees to demonstrate strategic and operational expertise and the ability to work on an international scale.
Date: 22–26 September 2025
Location: Jakarta
Participants: 10 WCO Technical Expert candidates from the Customs Administrations of Australia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, India, Indonesia, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, and Papua New Guinea.
Resource Persons: 3 facilitators from the WCO Secretariat.
Funding Source: Cost-sharing between the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State, and the Center for Customs and Excise Education and Training.
- c. 23rd World Customs Organization - Asia Pacific Regional Training Center (WCO A/P RTC) Heads Meeting**
The objectives of this event were to:
a. *Strengthen coordination and synergy among the WCO Regional Office for Capacity Building Asia/Pacific and all Regional Training Centres in the Asia/Pacific region.*
b. *Align the strategy and direction of customs-training capacity development in support of the modernization of customs administration at the global and regional levels.*
c. *Serve as a forum for the exchange of experience, learning, and best*

- c. Menjadi wadah pertukaran pengalaman, pembelajaran, dan praktik terbaik (best practices) antar-RTC dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
d. Meningkatkan kontribusi dan peran aktif RTC Indonesia dalam mendukung pengembangan kapasitas kepabeanean yang dikoordinasikan oleh ROCB A/P
Waktu Penyelenggaraan: 1 – 3 Oktober 2025
Lokasi Penyelenggaraan: Balai Diklat Keuangan Denpasar, Bali
Jumlah Peserta: 32 delegasi yang berasal dari WCO Regional Office for Capacity Building Asia/Pacific (ROCB A/P), WCO Vice-Chairperson for the Asia/Pacific Region, Regional Intelligence Liaison Office (RILO) A/P, serta para pimpinan dan perwakilan dari berbagai Regional Training Center (RTC) di Kawasan Asia/Pasifik yaitu RTC Cambodia, RTC China, RTC Hongkong, RTC Indonesia, RTC India, RTC Iran, RTC Jepang, RTC Korea, RTC Malaysia, RTC Thailand. Setiap RTC diwakili oleh Kepala Pusat Pelatihan dan/atau yang bertanggung jawab terhadap bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepabeanean.
Panitia Kegiatan: Pusdiklat Bea dan Cukai, Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanean dan Cukai, Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, dan Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Sumber Dana: Pusdiklat Bea dan Cukai (BPPK)
- d. Training on Small Craft Surveillance System for Asia Pacific Customs Administration Officers**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan antar pegawai dari institusi administrasi pabean di Kawasan Asia/Pasifik dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum terutama dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan

- practices among RTCs in delivering training and HR-development programs.*
d. *Enhance the contribution and active role of RTC Indonesia in supporting customs capacity development coordinated by ROCB A/P*
Date: 1–3 October 2025
Location: Denpasar Regional Campus of Finance Education and Training, Bali
Participants: 32 delegates from the WCO Regional Office for Capacity Building Asia/Pacific (ROCB A/P), the WCO Vice-Chairperson for the Asia/Pacific Region, the Regional Intelligence Liaison Office (RILO) A/P, and the heads and representatives of various Regional Training Centers (RTCs) in the Asia/Pacific region: RTC Cambodia, RTC China, RTC Hong Kong, RTC Indonesia, RTC India, RTC Iran, RTC Japan, RTC Korea, RTC Malaysia, and RTC Thailand. Each RTC was represented by the Director of the Training Center and/or the official responsible for customs HR-capacity development.
Organizing Committee: The Center for Customs and Excise Education and Training; Directorate of International Affairs DGCE; Customs and Excise Regional Office for Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara; Denpasar Medium Customs and Excise Service Office; Ngurah Rai Medium Customs and Excise Service Office; and Denpasar Regional Campus of Finance Education and Training.
Funding Source: The Center for Customs and Excise Education and Training, Financial Education and Training Agency
- d. *Training on Small Craft Surveillance System for Asia Pacific Customs Administration Officers*
This program aims to enhance the knowledge, expertise, and skills of officers from customs administrations in the Asia/Pacific region in carrying out oversight and law-enforcement duties, particularly in inspecting marine conveyances in the form of small craft.

sarana pengangkut laut berupa kapal kecil atau *small craft*.

Waktu Penyelenggaraan: 28 Oktober – 5 November 2025

Lokasi Penyelenggaraan: Lombok
Jumlah Peserta: 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang berasal dari enam belas negara yaitu: Cambodia, Myanmar, Vietnam, Philippines, Fiji, Timor Leste, Bangladesh, Papua New Guinea, Maldives, Sri Lanka, Samoa, Solomon Islands, Vanuatu, Palau, Nauru, dan Indonesia.

Narasumber: WCO, Badan Bahasa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pusdiklat Bea dan Cukai, Direktorat KSIKC, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DIN, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY

Sumber Dana: Hibah Pemerintah Indonesia melalui LDKPI (untuk peserta asing) dan Pusdiklat Bea dan Cukai (untuk peserta Indonesia).

e. 5th WCO RTC Indonesia International Conference : Transforming Customs: Transparency, Innovation, and Digitalization for Global Trade Tujuan Kegiatan:

- Mengembangkan dan menggali pengetahuan, hasil kajian, dan praktik administrasi kepabeanan terbaik yang berkaitan dengan transparansi (transparency) dalam reformasi kepabeanan modern untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kepastian hukum, dan menjamin integritas perdagangan internasional, memperkuat keamanan rantai pasok global dan menanggulangi peredaran barang ilegal;
- Mengembangkan dan menggali pengetahuan, hasil kajian, dan praktik administrasi kepabeanan terbaik yang berkaitan dengan inovasi dan digitalisasi karena menjadi katalis utama dalam transformasi kepabeanan modern untuk menjawab tantangan kompleks perdagangan global yang semakin

Date: 28 October – 5 November 2025

Location: Lombok

Participants: 35 participants from sixteen countries: Cambodia, Myanmar, Vietnam, Philippines, Fiji, Timor-Leste, Bangladesh, Papua New Guinea, Maldives, Sri Lanka, Samoa, Solomon Islands, Vanuatu, Palau, Nauru, and Indonesia.

Resource Persons: World Customs Organization, the Agency for Language Development and Cultivation, the Pancasila Ideology Development Agency, the Center for Customs and Excise Education and Training, Directorate of International Affairs DGCE, Directorate of Enforcement and Investigation, Directorate of Narcotics Interdiction, Tanjung Balai Karimun Customs and Excise Forward Operating Base Type A, and Customs and Excise Regional Office for Central Java and the Special Region of Yogyakarta.

Funding Source: Grant from the Indonesian Government through Indonesian Agency for International Development (for foreign participants) and the Center for Customs and Excise Education and Training (for Indonesian participants).

- e. 5th WCO RTC Indonesia International Conference : Transforming Customs: Transparency, Innovation, and Digitalization for Global Trade**
The objectives of this event were to:
- Develop and explore knowledge, research findings, and best customs-administration practices related to transparency in modern customs reform to build trust, enhance legal certainty, ensure the integrity of international trade, strengthen global supply-chain security, and counter the circulation of illegal goods;*
 - Develop and explore knowledge, research findings, and best customs-administration practices related to innovation and digitalization as the main catalysts in modern customs transformation,*

terintegrasi dan berbasis teknologi, mendorong efisiensi operasional, dan memperkuat kemampuan adaptif administrasi kepabeanan terhadap tren perdagangan baru, seperti e-commerce lintas batas dan ekonomi digital;

c. Mempresentasikan, membagikan, dan mendiskusikan hasil pengembangan ide/gagasan, kajian dan pengalaman yang bernilai nilai tambah melalui karya tulis terpilih yang berkaitan dengan aspek transparansi, inovasi, dan digitalisasi di bidang kepabeanan;

d. Membuka kesempatan yang semakin luas melalui jaringan komunikasi (*networking*) dan kerja sama otoritas kepabeanan antar negara, institusi, dan lembaga akademis dalam rangka pengembangan kegiatan konferensi internasional atau kegiatan sejenis ke depan untuk pengembangan kapasitas SDM kepabeanan berbasis riset dan data;

e. Memberikan alternatif solusi atas tantangan dan peluang administrasi kepabeanan di masa mendatang baik dalam bentuk regulasi, praktik, maupun sistem yang berkaitan dengan aspek transparansi, inovasi, dan digitalisasi di bidang kepabeanan.

Waktu Penyelenggaraan: 11 – 12 November 2025

Lokasi Penyelenggaraan: Daring melalui Zoom Meeting dan Youtube Pusdiklat Bea dan Cukai.

Jumlah Peserta: Jumlah total peserta konferensi yang hadir selama dua hari kegiatan konferensi adalah 800 orang, yang terdiri dari 464 orang hadir pada hari pertama, dan 336 orang pada hari kedua.

Narasumber:

- Oentarto Wibowo, WCO Accredited Expert (Capacity Building and Integrity);
- Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M. Eng., Ph.D., CSCP, CSCA, CPLM (ITS);
- Rudy Rahmaddi, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, DJBC
- Christian Lembke, Technical Officer Digitalization, WCO
- Hua Tong, Technical Attache

in order to address the complex challenges of an increasingly integrated, technology-based global trade, drive operational efficiency, and strengthen customs administrations' adaptive capacity to new trade trends such as cross-border e-commerce and the digital economy;

- Present, share, and discuss the results of value-adding ideas, studies, and experiences through selected papers related to transparency, innovation, and digitalization in customs;*
- Open wider opportunities through networking and cooperation among customs authorities, institutions, and academic bodies for the future development of international conferences or similar activities for research and data-based customs human resources-capacity development;*
- Offer alternative solutions to the future challenges and opportunities of customs administration whether in the form of regulations, practices, or systems related to transparency, innovation, and digitalization in customs.*

Date: 11–12 November 2025

Location: Online via Zoom Meeting and the Center for Customs and Excise Education and Training's YouTube channel.

Participants: The total number of attendees over the two-day conference was 800, comprising 464 on the first day and 336 on the second day.

Resource persons:

- Oentarto Wibowo, WCO Accredited Expert (Capacity Building and Integrity);
- Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D., CSCP, CSCA, CPLM (ITS);
- Rudy Rahmaddi, Director of Customs and Excise Information and Technology, DGCE;
- Christian Lembke, Technical Officer Digitalization, WCO;
- Hua Tong, Technical Attaché SMART Customs Project, WCO;
- Carine Willems, Customs Counsellor of Belgium.

- SMART Customs Project, WCO
6. Carine Willems, Customs
Counsellor of Belgium

Selain materi dari narasumber,
terdapat presentasi dari 16 paper
terpilih.

Sumber Dana: Pusdiklat Bea dan
Cukai

**f. Training on Passenger Assessment
for Asia/Pacific Customs
Administration Officers: Operational
and Managerial Level**

Program ini bertujuan untuk
mencetak pegawai administrasi
pabean di Kawasan Asia/Pasifik
yang memiliki keterampilan
dalam melaksanakan *assessment*
penumpang dan menganalisis tingkat
risiko penumpang dengan tepat
berdasarkan pola perilaku, bahasa
tubuh, *microexpression*, dan dokumen
perjalanan penumpang.

Waktu Penyelenggaraan: 19 - 25
November 2025

Lokasi Penyelenggaraan: Lombok
Jumlah Peserta: 31 (tiga tujuh satu)
orang peserta yang berasal dari
lima belas negara yaitu: Cambodia,
Myanmar, Vietnam, Philippines, Fiji,
Timor Leste, Bangladesh, Papua New
Guinea, Maldives, Sri Lanka, Samoa,
Solomon Islands, Vanuatu, Palau, dan
Indonesia.

Narasumber: WCO, Australian Border
Force (ABF), Badan Bahasa, Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila,
Pusdiklat Bea dan Cukai, Tenaga
Pengkaji DJBC, Direktorat KSIKC, DIN,
KPPBC TIMP A Bogor, KPPBC Manado.

Sumber Dana: Hibah Pemerintah
Indonesia melalui LDKPI (untuk
peserta asing) dan Pusdiklat Bea dan
Cukai (untuk peserta Indonesia).

*In addition to the resource persons'
material, there were presentations of
16 selected papers.*

*Funding Source: The Center for
Customs and Excise Education and
Training, Financial Education and
Training Agency*

- f. *Training on Passenger Assessment for
Asia/Pacific Customs Administration
Officers: Operational and Managerial
Level*

*This program aims to produce customs
administration officers in the Asia/
Pacific region with skills in conducting
passenger assessments and
accurately analyzing passenger risk
levels based on behavioral patterns,
body language, micro expressions, and
travel documents.*

Date: 19–25 November 2025

Location: Lombok

*Participants: 31 participants from
fifteen countries: Cambodia, Myanmar,
Vietnam, Philippines, Fiji, Timor-
Leste, Bangladesh, Papua New
Guinea, Maldives, Sri Lanka, Samoa,
Solomon Islands, Vanuatu, Palau, and
Indonesia.*

*Resource Persons: World Customs
Organization, Australian Border
Force, the Agency for Language
Development and Cultivation, the
Pancasila Ideology Development
Agency, the Center for Customs and
Excise Education and Training, Advisor
to the Director General for Customs
and Excise, Directorate of International
Affairs DGCE, Directorate of Narcotics
Interdiction, Bogor Medium Customs
and Excise Service Office, and Manado
Medium Customs and Excise Service
Office.*

*Funding Source: Grant from the
Indonesian Government through
Indonesian Agency for International
Development or Indonesian AID (for
foreign participants) and the Center
for Customs and Excise Education and
Training (for Indonesian participants).*

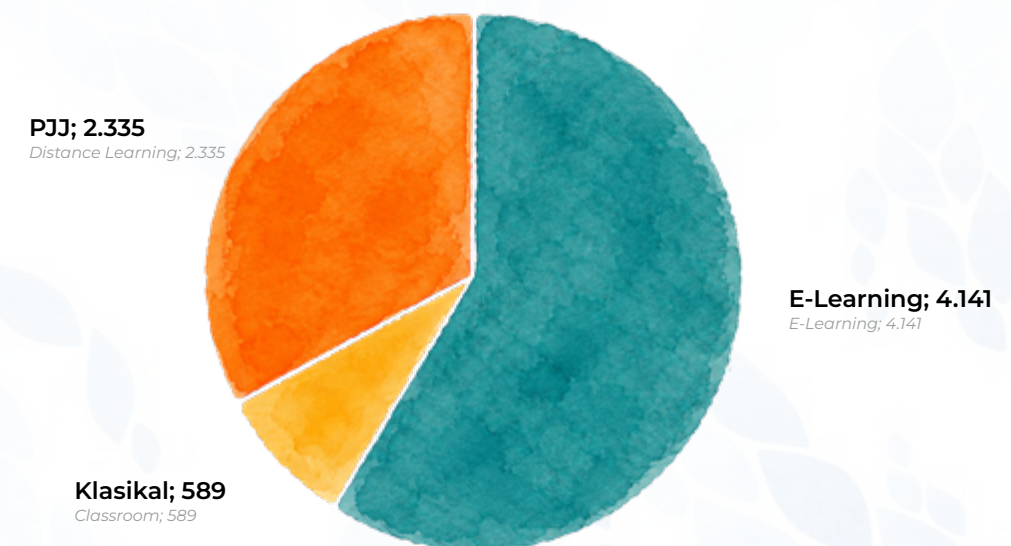
**PEMBELAJARAN DI BIDANG
KEUANGAN PUBLIK**

Dengan mengemban visi menjadi pusat
pendidikan dan pelatihan di bidang
Keuangan Publik yang unggul, inovatif,
dan responsif guna mendukung visi
BPPK “Menjadi Knowledge Institution
berbasis teknologi digital untuk
menghasilkan SDM Pengelolaan
Keuangan Negara yang kompeten dan
berkarakter”, Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Publik (Pusdiklat
KP) berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan, mempunyai tugas membina
pelatihan terkait keuangan negara di
bidang kekayaan negara, pengelolaan
pembiayaan dan risiko keuangan negara,
kebijakan fiskal, sektor keuangan, intelijen
ekonomi dan keuangan, dan bidang
keuangan negara lainnya berdasarkan
kebijakan teknis. Adapun stakeholders/
unit pengguna layanan utama dari
Pusdiklat KP adalah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal
Stabilitas dan Pengembangan Sektor
Keuangan, Direktorat Jenderal Strategi
Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta
Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen
Keuangan

LEARNING IN PUBLIC FINANCE

*By carrying out the vision of becoming
a superior, innovative, and responsive
education and training center in public
finance in order to support FETA's vision
of “becoming a digital technology-based
knowledge institution that produces
competent and characterful state
financial managers,” the Center for
Public Finance Education and Training
(Pusdiklat KP)—pursuant to Minister of
Finance Regulation No. 124 of 2024 on
the Organization and Work Procedures
of the Ministry of Finance—is tasked
with overseeing state-finance training
in state assets, financing and financial-
risk management, fiscal policy, finance,
economic and financial intelligence,
and other state-finance fields, based on
technical policy.*

*Center for Public Finance Education and
Training's main stakeholders/service-user
units are the Directorate General of State
Assets Management, the Directorate
General of Financial Sector Stability and
Development, the Directorate General
of Economic and Fiscal Strategy, the
Directorate General of Budget Financing
and Risk Management, and the Financial
Technology, Information, and Intelligence
Agency.*





Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Pusdiklat KP mencakup 216 program yang diselenggarakan melalui 318 kelas. Dari total tersebut, 211 kelas (66%) dilaksanakan dengan metode *e-learning*, sementara 107 kelas (34%) menggunakan metode non *e-learning*. Kegiatan ini diikuti oleh 7.065 peserta secara keseluruhan. Partisipasi terbesar berasal dari pembelajaran dengan metode *e-learning*, yaitu 4.141 peserta (59%), sedangkan kelas klasikal diikuti oleh 589 peserta dan PJJ diikuti oleh 2.335 peserta. Data ini menunjukkan metode *e-learning* sebagai pendekatan pembelajaran yang signifikan dalam mendukung perluasan jangkauan program pembelajaran.

Sebagai satuan kerja hasil penggabungan penggabungan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) dengan Pusdiklat Keuangan Umum. Pada tahun 2025, Pusdiklat KNPK telah menetapkan Pelatihan Aplikasi SIMAN bagi Pengguna Barang sebanyak 26 Angkatan, sebagai program unggulan 2025, sementara Pusdiklat Keuangan Umum telah menetapkan *Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia Pasific Public Policymakers* sebagai program unggulan 2025.

Namun demikian, dinamika kebijakan nasional membawa perubahan signifikan. Pada Triwulan I Tahun 2025, kedua program unggulan tersebut terpaksa dibatalkan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengenai Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Kedua regulasi tersebut mewajibkan pelaksanaan langkah-langkah efisiensi, termasuk penyesuaian terhadap

In 2025, learning activities at Center for Public Finance Education and Training covered 216 programs delivered through 318 classes. Of this total, 211 classes (66%) were conducted in e-learning, while 107 classes (34%) were conducted in non-e-learning methods. These classes were attended by 7,065 participants overall. The largest participation came from e-learning, with 4,141 participants (59%), while classroom classes were attended by 589 participants and PJJ by 2,335 participants. This data shows e-learning as a significant approach in supporting the expansion of learning programs.

As a work unit formed from the merger of the State Assets and Fiscal Balance Training Center (Pusdiklat KNPK) with the General Finance Education and Training Center: in 2025, State Assets and Fiscal Balance Training Center had designated the SIMAN Application Training for Asset Users (26 batches) as its 2025 flagship program, while the General Finance Education and Training Center had designated the Workshop on the Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia-Pacific Public Policymakers as its 2025 flagship program.

However, national policy dynamics brought significant change. In the first quarter of 2025, both flagship programs had to be canceled in response to Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 1 of 2025 on Spending Efficiency in the Implementation of the 2025 State and Regional Budgets, and Minister of Finance Letter No. S-37/MK.02/2025 on Ministry/Agency Spending Efficiency in the Implementation of the 2025 State Budget. Both regulations require efficiency measures, including adjustments to activities requiring significant budget allocation. As a

penyelenggaraan kegiatan yang memerlukan alokasi anggaran signifikan. Akibatnya, Pelatihan Aplikasi SIMAN bagi Pengguna Barang serta *Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia Pasific Public Policymakers* tidak dapat dilaksanakan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pusdiklat Keuangan Publik melakukan penyesuaian strategi pengembangan program pembelajaran, dari pendekatan berbasis kegiatan (*event-based*) menuju pendekatan yang lebih strategis, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based*). Transformasi ini diarahkan untuk tetap menjaga relevansi dan kontribusi Pusdiklat dalam mendukung penguatan kapasitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Sejalan dengan arah tersebut, Pusdiklat Keuangan Publik menginisiasi pengembangan program unggulan baru yang berfokus pada penguatan ekosistem pengetahuan kebijakan. Salah satu inisiatif strategis yang dikembangkan adalah pembentukan Center for Public Finance Research (CPFR) sebagai platform kolaboratif riset dan pembelajaran di bidang keuangan publik, penyelenggaraan KCOC Financial Sector Deepening Series sebagai platform berbagi pengetahuan dan diskusi strategis antara regulator dan pelaku industri, dan pelaksanaan Seminar on Green Financing For Sustainable Development sebagai suatu rangkaian kegiatan dari Global Development Learning Network (GDLN) Meeting.

Center for Public Finance Research (CPFR)

Center for Public Finance Research (CPFR) merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan untuk memperkuat perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan berbasis pengetahuan (*knowledge-based policy*). CPFR dirancang sebagai platform kolaboratif antara Kementerian Keuangan dan perguruan tinggi negeri, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kebijakan publik dengan

result, the SIMAN Application Training for Asset Users and Workshop on the Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia-Pacific Public Policymakers could not be held. In response, Center for Public Finance Education and Training adjusted its learning program development strategy, moving from an event-based approach to a more strategic, sustainable, knowledge-based one. This transformation was directed at maintaining the relevance and contribution of the training center in supporting the strengthening of fiscal policy and financial-sector capacity.

In line with that strategy, Center for Public Finance Education and Training initiated the development of new flagship programs focused on strengthening the policy-knowledge ecosystem. The new flagship programs were the establishment of the Center for Public Finance Research (CPFR) as collaborative research and learning platform in public finance; the delivery of the KCOC Financial Sector Deepening Series as a platform for knowledge sharing and strategic discussion between regulators and industry players; and the holding of the Seminar on Green Financing for Sustainable Development as part of the Global Development Learning Network (GDLN) Meeting.

Center for Public Finance Research (CPFR)

The Center for Public Finance Research (CPFR) is a strategic initiative designed to strengthen knowledge-based policymaking in the fiscal and financial sectors. The CPFR is designed as a collaborative platform between the Ministry of Finance and state universities, aiming to bridge the gap between public-policy needs and academic research capacity. Through this approach, research findings do not stop at the

kapasitas riset akademik. Melalui pendekatan ini, hasil kajian tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat dimanfaatkan secara langsung dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Secara operasional, CPFR mengembangkan ekosistem pengetahuan yang terintegrasi melalui enam layanan utama, yaitu riset terapan kebijakan, pembelajaran terbuka, edukasi publik, pengembangan studi kasus, publikasi, serta sertifikasi profesi. Pada tahap awal, CPFR difokuskan pada pembentukan kemitraan dengan perguruan tinggi melalui skema pilot project, penyusunan agenda riset prioritas, serta penguatan tata kelola dan mekanisme pendanaan yang transparan dan berkelanjutan. Ke depan, CPFR diharapkan berfungsi sebagai learning and research hub yang berkontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan fiskal yang adaptif, kredibel, dan berbasis bukti empiris, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik kebijakan publik.

KCOC Financial Sector Deepening Series

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan mandat kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk bersama-sama mengembangkan sektor keuangan. Pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menuntut koordinasi yang kuat di antara keempat lembaga tersebut, serta dapat melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

conceptual level but can be used directly in the formulation, implementation, and evaluation of policy.

Operationally, the CPFR develops an integrated knowledge ecosystem through six main services: applied policy research, an open learning approach, public education, case study development, publication, and professional certification. In the initial stage, the CPFR focuses on building partnerships with universities through a pilot-project scheme, setting priority research agendas, and strengthening transparent, sustainable governance and funding mechanisms. In the future, the CPFR is expected to serve as a learning and research hub that tangibly contributes to the development of adaptive, credible, and evidence-based fiscal policies, while strengthening synergy between academia and public policy practice.

KCOC Financial Sector Deepening Series

The enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (Financial Sector Omnibus Law) mandates the Ministry of Finance, the Central Bank of Indonesia, the Financial Services Authority, and the Indonesia Deposit Insurance Corporation to jointly develop the financial sector. Carrying out the mandate referred to in Article 11 requires strong coordination among these four institutions and may involve other relevant ministries/agencies.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, kolaborasi menjadi kunci. Untuk itu, sebuah Forum Pengembangan Sektor Keuangan telah diinisiasi sebagai wadah koordinasi berkala antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan kebijakan dan program. Menyadari kompleksitas produk dan layanan keuangan di era digital, serta pentingnya peran inovasi, Pusdiklat Keuangan Publik menginisiasi program *Financial Sector Deepening Series* (FSDS). Program ini dirancang sebagai *platform* berbagi pengetahuan dan diskusi strategis antara regulator dan pelaku industri dan dengan menggunakan format Kemenkeu *Corpu Open Class* (KCOC) yang merupakan kerja sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Pusdiklat Keuangan Publik. KCOC diharapkan memberikan jangkauan yang lebih luas kepada pegawai internal Kementerian Keuangan maupun kepada *stakeholders* terkait lain yang bersinggungan dengan peran dan fungsi DJSPSK seperti OJK, BI, LPS dan sektor swasta.

Pelaksanaan FSDS Seri 01 diselenggarakan secara daring dalam format Open Class pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan tema “*Gen-Z Financial Level Up: Game Changer di Era Digital*”. Adapun para narasumber yang hadir pada acara ini antara lain. Dr. Adi Budiarto, FCPA (Direktur P4, Ditjen SPSK), Billy Suryajaya (COO Nanovest), Michael Salam (Direktur Bisnis SeaBank), dan Mercy Simorangkir (Ketua Harian AFTECH). Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam kepada para generasi muda Indonesia dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan dan peran strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mengembangkan sektor keuangan serta membuka ruang dialog strategis antara regulator (pusat dan daerah), pelaku usaha, asosiasi, dan generasi muda Indonesia mengenai peluang, tantangan, dan inovasi di sektor keuangan digital. Selain itu, dengan berjalannya KCOC diharapkan mempermudah identifikasi peluang kolaborasi untuk mendorong pendalaman, efisiensi, dan aksesibilitas sektor keuangan di era digital.

To implement the law, collaboration is essential. Thus, a Financial Sector Development Forum was established as a periodic coordination platform for stakeholders to harmonize policies and programs. Recognizing the complexity of financial products and services in the digital era and the importance of innovation, Center for Public Finance Education and Training initiated the Financial Sector Deepening Series (FSDS). This program is designed as a platform for knowledge sharing and strategic discussion between regulators and industry players, using the MoF Corpu Open Class (KCOC) format—a collaboration program between the Finance Education and Training Agency and Center for Public Finance Education and Training. The KCOC is expected to provide a wider channel to reach employees of the Ministry of Finance and other relevant stakeholders connected with the role and function of the Directorate General of Financial Sector Stability and Development, such as the Central Bank of Indonesia, the Financial Services Authority, the Indonesia Deposit Insurance Corporation, and the private sector.

FSDS Series 01 was conducted online in an open-class format on 8 August 2025 with the theme “Gen-Z Financial Level Up: Game Changer in the Digital Era.” The speakers were Dr. Adi Budiarto, FCPA (Directorate General of Financial Sector Stability and Development), Billy Suryajaya (COO of Nanovest), Michael Salam (Business Director of SeaBank), and Mercy Simorangkir (Executive Chair of AFTECH). FSDS Series were expected not only to provide Indonesia’s younger generation, businesspersons, and stakeholders with a deep understanding of the policy direction and strategic role of the government in maintaining stability and developing the financial sector, but also to open space for strategic dialogue among regulators (central and regional), businesses, associations, and Indonesia’s youth on the opportunities, challenges, and innovations in the digital financial sector. The KCOC is also expected to facilitate the identification of collaboration opportunities to drive deeper, more efficient, and more accessible financial services in the digital era.



Financial Sector Deepening Series 02 mengambil tema tentang “Penguatan Peran Pemeringkat Kredit Alternatif Mendorong Inklusi dan Pendalaman Pasar”. Tema ini diangkat untuk dapat memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat (khususnya pelaku UMKM) mengenai Pemeringkat Kredit Alternatif dan perannya dalam membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (*unbanked* dan *underserved*), membuka ruang dialog strategis antara regulator, lembaga jasa keuangan, asosiasi, dan masyarakat mengenai pemanfaatan Pemeringkat Kredit Alternatif, membangun peluang kolaborasi untuk mendorong adopsi Pemeringkat Kredit Alternatif secara lebih luas, serta perlunya dukungan ekosistem lintas para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data, mitigasi risiko, dan tata kelola yang baik.

Webinar diselenggarakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan menghadirkan Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Sudarto, S.E., M.B.A., M.Kom., Ph.D., CA, CGEIT, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan selaku pemberi sambutan, Ibu Masyita Crystallin, Ph.D., dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, sebagai pemberi keynote remark, serta panel diskusi yang terdiri dari perwakilan regulator dan pelaku di industri jasa keuangan. Kegiatan dilaksanakan pada hari 9 Desember 2025 pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB melalui media zoom dan melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Financial Sector Deepening Series 02 took the theme “Strengthening the Role of Alternative Credit Scoring to Drive Inclusion and Market Deepening.” This theme was chosen to provide financial-services industry players and the public (especially MSMEs) with a deep understanding of Alternative Credit Scoring and its role in opening financing access for people and businesses previously unserved by formal financial institutions (the unbanked and underserved); to open strategic dialogue among regulators, financial-services institutions, associations, and the public on the use of Alternative Credit Scoring; to build collaboration opportunities to drive wider adoption of Alternative Credit Scoring; and to highlight the need for cross-stakeholder ecosystem support while attending to data protection, risk mitigation, and good governance

The webinar was conducted online via Zoom Meeting, featuring the Acting Head of the Finance Education and Training Agency, Mr. Sudarto, Ph.D., CA, CGEIT; the Director General of Financial Sector Stability and Development as the opening speaker, Ms. Masyita Crystallin, Ph.D.; and the Chief Executive of the Supervision of Financial-Sector Technology Innovation, Digital Financial Assets, and Crypto Assets at the Financial Services Authority, Mr. Hasan Fawzi, as the keynote speaker. The webinar discussion panel comprises representatives from regulators and the financial services industry. The webinar was held on 9 December 2025 from 09:00 to 12:00 WIB via Zoom and on the YouTube channels of the Directorate General of Financial Sector Stability and Development and the FETA to reach a wider audience.

Seminar on Green Financing For Sustainable Development Series

BMKG mencatat suhu rata-rata pada April 2024 mencapai 27,7°C, tertinggi sejak 1981, dengan kenaikan sekitar 0,9°C dari kondisi normal. Dari perspektif ekonomi, pemanasan global merupakan dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan jika tidak ditangani. Mitigasi perubahan iklim adalah gerakan bersama masyarakat dunia. Oleh karena itu, upaya dan kemajuan dalam pengendalian perubahan iklim perlu terus disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran di tingkat global, nasional, dan regional. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memandang penting untuk menyelenggarakan seminar terkait *green financing*, khususnya dalam rangkaian kegiatan GDLN Meeting, sebagai wadah berbagi pengetahuan dan mendorong kolaborasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan mengenai peran kebijakan fiskal dan instrumen pembiayaan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks penanganan perubahan iklim. *Seminar on Green Financing for Sustainable Development* diselenggarakan secara *hybrid*, pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 09.30-12.30 WITA (08.30-11.30 WIB) sebagai bagian dari *Global Development Learning Network (GDLN) Meeting 2025*, 28-30 Oktober 2025 di Balai Diklat Keuangan Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil pengisian evaluasi penyelenggaraan, terdapat 211 peserta yang berhak memperoleh sertifikat. Peserta terdiri dari pembuat kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, baik di pusat maupun daerah, akademisi (dosen dan mahasiswa) dari perguruan tinggi di sekitar Denpasar dan perwakilan komunitas dan pegiat isu lingkungan hidup.

Seminar on Green Financing For Sustainable Development Series

The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency in Indonesia recorded an average April 2024 temperature of 27.7°C, the highest since 1981. There was an increase of about 0.9°C from normal conditions. From an economic perspective, global warming is a negative impact of economic activity that can hamper growth if unaddressed properly. Climate change mitigation is a global movement. Accordingly, efforts and progress in controlling climate change need to be continuously communicated to raise awareness at the global, national, and regional levels. In line with the movement, the FETA considers the importance of conducting a seminar on green financing, particularly as part of the GDLN Meeting, as a platform for sharing knowledge and encouraging collaboration in support of sustainable development

The seminar was expected to enhance stakeholders' understanding and capacity regarding the role of fiscal policy and financing instruments in supporting the sustainable development agenda, particularly in addressing climate change. The Seminar on Green Financing for Sustainable Development was conducted in a hybrid format on Thursday, 30 October 2025, from 09:30 to 12:30 WITA (08:30–11:30 WIB), as part of the Global Development Learning Network (GDLN) Meeting 2025 held on 28–30 October 2025 at the Regional Campus of Finance Education and Training in Denpasar, Bali. Based on the evaluation, 211 participants were entitled to certificates. Participants consisted of central- and regional-government policymakers, Ministry of Finance officials/ employees (both central and regional), academics (lecturers and students) from universities around Denpasar, and representatives of communities and environmental advocates.

PEMBELAJARAN DI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN

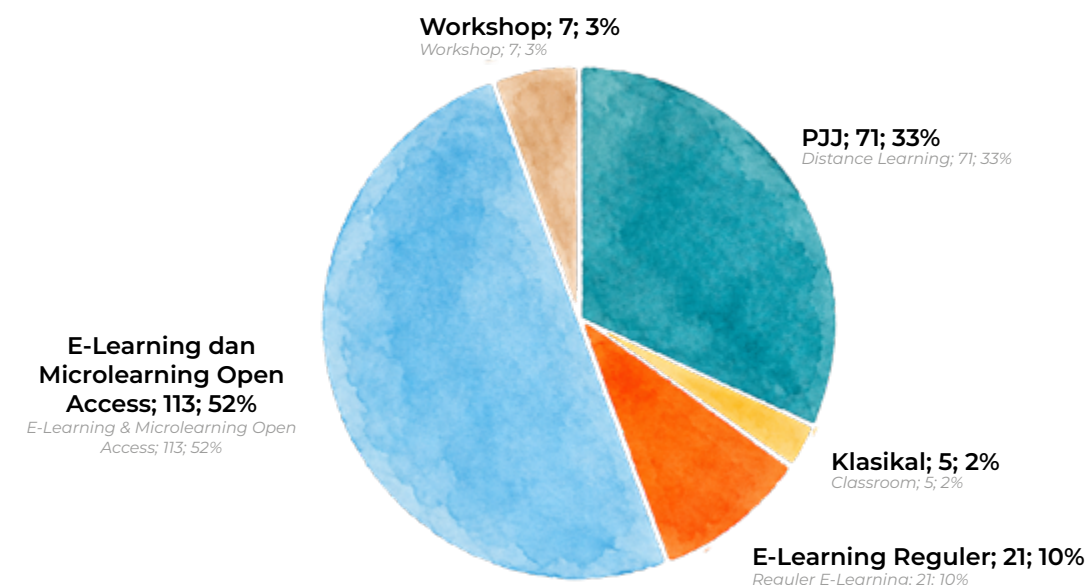
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen (Pusdiklat KM) mempunyai tugas membina pelatihan di bidang kepemimpinan, penjurangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sejalan dengan tugas tersebut Pusdiklat KM menyelenggarakan berbagai program pembelajaran di bidang kepemimpinan dan manajerial bagi para pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan berbagai program pembelajaran tersebut, diharapkan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan semakin memiliki kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tinggi.

Selama tahun 2025 Pusdiklat KM telah menyelenggarakan berbagai program pembelajaran yang diselenggarakan baik di Pusdiklat ataupun di Balai Diklat. Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran, pembelajaran yang dilaksanakan di Pusdiklat KM didominasi oleh pembelajaran digital baik dalam bentuk *e-learning* ataupun pelatihan jarak jauh. Berikut ini adalah komposisi program pembelajaran di bidang kepemimpinan dan manajemen sepanjang tahun 2025.

LEARNING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT

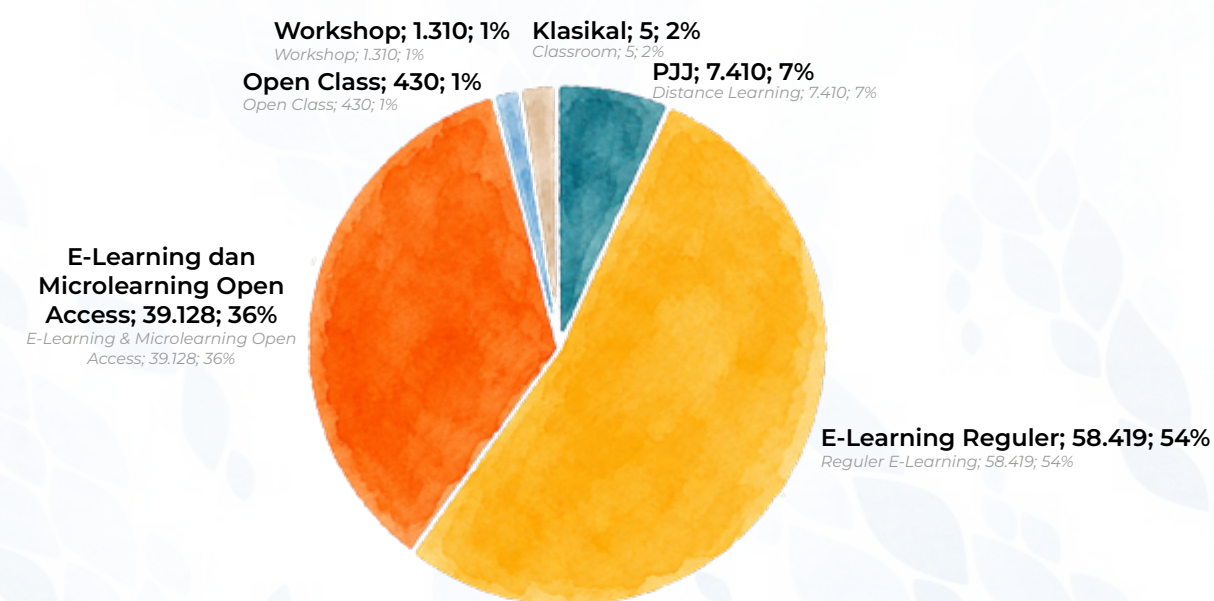
Pursuant to Minister of Finance Regulation No. 124 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance, the Center for Leadership and Management Education and Training (Pusdiklat KM) is tasked with conducting training in leadership, rank progression, character-building, managerial and socio-cultural competency enhancement, learning management, organizational management, HR management, internal oversight and control, and other fields related to good governance, based on the technical policy established by the Head of the Financial Education and Agency. In line with this task, Center for Leadership and Management Education and Training conducts various leadership and managerial learning programs for officials/employees within the Ministry of Finance, so that the Ministry's human resources increasingly possess high managerial and socio-cultural competencies.

During 2025, Center for Leadership and Management Education and Training conducted various learning programs both at the training center and the Regional Campus of Finance Education and Training. Following the budget-efficiency policy, learning at Center for Leadership and Management Education and Training was dominated by digital formats, such as *e-learning* and distance learning. The following is the composition of leadership and management learning programs throughout 2025.



Ditinjau dari jumlah peserta pembelajaran, realisasi peserta pembelajaran di Bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada tahun 2025 adalah sebanyak 107.883 peserta dimana *e-learning* baik reguler ataupun *open access* memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan jumlah realisasi peserta pembelajaran di Pusdiklat KM. Tingginya realisasi peserta *e-learning* salah satunya adalah karena adanya *e-learning* mandatory, yakni *E-Learning* Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi. Berikut ini adalah komposisi realisasi peserta pembelajaran di bidang kepemimpinan dan manajemen pada tahun 2025.

In terms of participation, the number of leadership and management learning participants in 2025 was 107,883, with *e-learning*—both regular and open-access—contributing the most to the overall total participants at Pusdiklat KM. One reason for the high *e-learning* participation is the mandatory *e-learning*, namely the Integrity Strengthening and Corruption Prevention *E-Learning*. The following is the composition of leadership and management learning participants in 2025.



Pada awal tahun 2025, Pusdiklat KM mengusung *E-learning Empowering Leadership for Workplace Well-being* sebagai program unggulan, namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran maka penyelenggaraan program unggulan tersebut dibatalkan. Dalam perjalanan, meskipun tidak terdapat program unggulan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KM pada tahun 2025 namun dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi akan ketersediaan pejabat Administrator yang mempunyai kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja, atau pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manejemen kembali menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Pejabat administrator berperan sebagai penggerak utama yang mentransformasikan kebijakan strategis menjadi aksi operasional yang berdampak nyata. Namun, dinamika lingkungan dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi mengharuskan pejabat administrator untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi kepemimpinan kinerja yang mumpuni. Untuk menjawab kebutuhan ini, Pusdiklat KM sebagai lembaga pelatihan yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pejabat administrator dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial sebagaimana diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 217 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

At the start of 2025, Center for Leadership and Management Education and Training planned the E-Learning Empowering Leadership for Workplace Well-being as its flagship program, but due to the budget-efficiency policy, it was canceled. Although no flagship program was held in 2025 BY Center for Leadership and Management Education and Training, in order to meet the organization's need for administrator officials with collaborative, strategic, performance-oriented, or service-oriented leadership to improve their organizational units' performance, Center for Leadership and Management Education and Training once again held the Administrator Leadership Training.

Administrator Leadership Training

Administrator officials serve as the main drivers who transform strategic policy into operational action with tangible impact. However, environmental dynamics and increasingly high demands for public accountability require administrator officials to possess not only technical competencies but also strong performance leadership skills. To address this need, Center for Leadership and Management Education and Training—as a training institution accredited by the National Institute of Public Administration (LAN RI)—conducted the Administrator Leadership Training.

This training aims to develop administrator officials' competencies to meet the managerial competency standards mandated under Article 217 paragraph (3) of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Servant Management, further regulated in LAN Regulation No. 5 of 2022 on Structural Leadership Training as amended by LAN

LAN Nomor 6 Tahun 2022. Skema pembelajaran terdiri dari pembelajaran mandiri, tatap muka virtual I, *Off Campus/ Action Learning*, dan tatap muka II.

Pada tahun 2025, terdapat tiga angkatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yakni PKA Angkatan XIV, Angkatan XV, dan angkatan XVI. Berikut ini adalah profil peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sepanjang tahun 2025.

Regulation No. 6 of 2022. The learning scheme consists of self-learning, distance learning 1, off-campus/action learning, and distance learning 2.

In 2025, there were three batches of the Administrator Leadership Training (PKA): Batch XIV, Batch XV, and Batch XVI. The following is the participant profile of the Administrator Leadership Training throughout 2025.

Profil Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025

Participant Profile of the 2025 Administrator Leadership Training

No.	Unit Eselon I Echelon I Unit	Angkatan XIV Batch XIV	Angkatan XV Batch XV	Angkatan XVI Batch XVI
1	Setjen	1	-	-
2	DJSEF	1	-	-
3	DJA	-	-	-
4	DJP	10	10	10
5	DJBC	-	6	5
6	DJPB	2	3	5
7	DJKN	7	7	6
8	DJPK	1	-	-
9	DJPPR	-	1	1
10	DJSPSK	-	-	-
11	Itjen	-	-	-
12	BaTii	-	1	-
13	BPPK	-	-	1
		22 Peserta	28 Peserta	28 Peserta

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator telah berjalan dengan baik dan sukses. Para peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam kompetensi manajerial, strategi pengambilan keputusan, dan kemampuan memimpin tim. Namun berdasar evaluasi tatap muka yang dilakukan kepada para peserta, Sebagian besar peserta berpendapat bahwa kedepannya pelatihan dilaksanakan secara klasikal sehingga peserta bisa lebih fokus menerima materi dari para pegajar mengingat waktu pelatihan yang cukup panjang.

Overall, based on the delivery evaluation, the Administrator Leadership Training ran well and successfully. Participants showed significant improvement in managerial competence, decision-making strategies, and team leadership abilities. However, based on the face-to-face evaluation, most participants felt that future training should be conducted in a classroom format so that they can focus better on receiving material from instructors, given the relatively long training period.



Pengelolaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Keuangan Negara Management Of Competency Assessment And Competency Certification In State Finance

4.3

Sesuai dengan PMK 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Secara operasional, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dilaksanakan melalui unit Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu yang memiliki tugas pengelolaan uji kompetensi dan sertifikasi di bidang keuangan negara.

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance No. 124 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance, one of FETA's mandates is to conduct competency certification in state finance. Operationally, the competency certification in the field of state finance is conducted by the Center for Functional Position Development and Quality Assurance, which holds the authority to conduct competency testing and certification in the field of state finance.

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara yang dilaksanakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM) pada tahun 2025 adalah Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Negara (JF AKN) merupakan bagian dari mekanisme manajemen talenta dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

Uji Kompetensi JF AKN dimaksudkan sebagai mekanisme penilaian kompetensi teknis yang terstandar, objektif, dan akuntabel bagi pegawai yang akan diangkat atau dinaikkan jenjangnya dalam JF AKN. Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi instrumen untuk memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, khususnya dalam proses kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

COMPETENCY TESTING FOR FUNCTIONAL POSITIONS IN STATE FINANCE

The Competency Test for Functional Positions in the field of state finance conducted by the Center for Professional Development and Quality Assurance in 2025 was the Competency Test for the State Finance Analyst Functional Position, which is part of the talent management and functional position development mechanism within the Ministry of Finance.

The State Finance Analyst Functional Position Competency Test is intended as a standardized, objective, and accountable mechanism for assessing the technical competencies of employees who will be appointed to or promoted within the State Finance Analyst Functional Position. This competency test serves as an instrument to ensure the implementation of the merit system in human resource management, particularly in the process of promotion within functional positions in the field of state finance.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Negara bertujuan untuk:

1. Mengukur kesesuaian kompetensi teknis peserta dengan standar kompetensi sesuai jenjang jabatan target (Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya).
2. Menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan/atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Negara.
3. Memastikan bahwa pejabat JF AKN memiliki kemampuan dalam:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang keuangan negara;
 - b. Analisis kebijakan dan penyusunan policy brief;
 - c. Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder management).
4. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara melalui ketersediaan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Pada Tahun 2025 telah diselenggarakan 3 (tiga) periode Uji Kompetensi Teknis JF AKN, yaitu Periode Juli, Oktober, dan November 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis JF AKN Tahun 2025

Participant Profile of the 2025 Administrator Leadership Training

No.	Periode	Jumlah Peserta	Jumlah Tulus	Jumlah Tidak Lulus	Rata-Rata Evaluasi	Kategori
1	Juli 2025	25	7	18	3,54	Sangat Baik
2	Oktober 2025	26	16	10	3,78	Sangat Baik
3	November 2025	7	3	4	3,42	Sangat Baik
Total		58	26	32	-	-

The State Finance Analyst Functional Position Competency Test aims to:

1. Measure the alignment of participants' technical competencies with the competency standards for the target position level (First Expert, Junior Expert, and Senior Expert).
2. Ensure objectivity, transparency, and accountability in the appointment and/or promotion process within the State Finance Analyst Functional Position.
3. Ensure that State Finance Analyst Functional Position officials have the ability to:
 - a. formulate policy in the Field of State Finance;
 - b. conduct policy analysis and prepare policy briefs; and
 - c. manage stakeholder relationships (stakeholder management).
4. Support improved quality of state-finance governance through the availability of competent, professional, high-integrity human resources.

In 2025, three periods of the Competency Test for the State Finance Analyst Functional Position were held—in July, October, and November 2025—with details as follows.

UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) merupakan instrumen penjaminan mutu dan standar kompetensi bagi profesi konsultan pajak di Indonesia. Sejalan dengan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas penyelenggaraan sertifikasi profesi, pelaksanaan USKP saat ini berada di bawah tanggung jawab Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.

Penyelenggaraan USKP dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan tenaga profesional di bidang perpajakan yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan yang terus berkembang. USKP diselenggarakan sebagai bagian dari persyaratan formal untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak, yang menjadi dasar legalitas dalam memberikan jasa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan USKP dimaksudkan untuk menilai dan memastikan tingkat pengetahuan, keahlian, serta kompetensi profesional calon konsultan pajak secara objektif dan terstandar. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin kualitas layanan jasa konsultan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendampingan yang profesional, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui praktik perpajakan yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah individu yang bermaksud memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak sebagai salah satu persyaratan untuk menjalankan praktik jasa konsultasi perpajakan secara legal. Peserta umumnya berasal dari latar belakang pendidikan dan/atau profesi yang berkaitan dengan akuntansi, perpajakan, keuangan, maupun bidang lain yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain calon konsultan pajak,

TAX CONSULTANT CERTIFICATION TEST (USKP)

The Tax Consultant Certification Test is a quality assurance and competency standard instrument for the tax consultant profession in Indonesia. In line with the strengthening of work procedure and improving quality of professional certification delivery, the delivery of the Tax Consultant Certification Test is currently under the responsibility of FETA, through the Center for Functional Position Development and Quality Assurance.

The Tax Consultant Certification Test is delivered due to the demand for tax professionals with adequate competence, integrity, and understanding of the continually evolving tax regulations. The Tax Consultant Certification Test is held as part of the formal requirements for obtaining the Tax Consultant Certificate, which is the legal basis for providing tax services in accordance with the laws and regulations.

The Tax Consultant Certification Test objectively assesses the knowledge, expertise, and professional competence of prospective tax consultants using standardized criteria. Its objectives are to ensure the quality of tax-consultant services, increase taxpayer compliance through professional assistance, and support the optimization of state revenue through accountable tax practices that comply with the laws and regulations.

The target participants of The Tax Consultant Certification Test are individuals seeking to obtain a Tax Consultant Certificate as one of the requirements to legally practice tax consultancy services. Participants generally come from educational and/or professional backgrounds related to accounting, taxation, finance, or other relevant fields. In addition to prospective



USKP juga diikuti oleh praktisi perpajakan yang ingin meningkatkan jenjang sertifikasi (Tingkat A, B, atau C) sebagai bentuk pengembangan kompetensi profesional.

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak di bawah koordinasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu. Penyelenggaraan dilakukan secara periodik melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi, pelaksanaan ujian berbasis *Computer-Assisted Test (CAT)*, serta penetapan dan pengumuman hasil ujian.

Materi ujian disusun berdasarkan jenjang sertifikasi, yaitu Tingkat A, B, dan C.

- Tingkat A mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPN dan PPnBM, serta aspek administrasi perpajakan.
- Tingkat B mencakup materi Tingkat A dengan pendalaman pada Pajak Penghasilan Badan, pemotongan dan pemungutan pajak, serta aspek teknis penerapan ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak Badan.
- Tingkat C mencakup keseluruhan materi sebelumnya dengan tambahan pajak internasional, transfer pricing, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), ketentuan perpajakan khusus, dan prosedur penyelesaian sengketa perpajakan.

Struktur materi tersebut dirancang sesuai tingkat kompleksitas kewenangan praktik konsultan pajak pada masing-masing jenjang sertifikasi.

tax consultants, The Tax Consultant Certification Test is also taken by tax practitioners who wish to upgrade their certification level (Level A, B, or C) as a form of professional competency development.

The Tax Consultant Certification Test is organized by the Tax Consultant Certification Committee under the coordination of FETA, through the Center for Functional Position Development and Quality Assurance. It is held periodically through stages of registration and administrative verification, Computer-Assisted Test (CAT)-based examination, and the determination and announcement of results.

The test material is structured by certification level, namely Levels A, B, and C with the details as follow:

- *Level A covers General Provisions and Tax Procedures, Individual Income Tax, VAT and Luxury Goods Sales Tax, and tax administration aspects.*
- *Level B covers Level A material with deeper coverage of Corporate Income Tax, tax withholding and collection, and the technical aspects of applying tax provisions to corporate taxpayers.*
- *Level C covers all previous material with the addition of international taxation, transfer pricing, double taxation avoidance agreements, special tax provisions, and tax-dispute resolution procedures.*

This material structure is designed according to the complexity of the tax-consultant's practice authority at each certification level.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, USKP telah diselenggarakan dalam 4 (empat) periode dengan cakupan wilayah yang luas dan tingkat partisipasi yang tinggi.

1. Periode I (26–28 Mei 2025, Peserta Mengulang) dilaksanakan di 16 kota (24 lokasi). Tingkat A mencatat 1.370 peserta hadir dengan 721 peserta lulus (52,6%), sedangkan Tingkat B mencatat 556 peserta hadir dengan 128 peserta lulus (23,0%).
2. Periode II (19–21 Agustus 2025, Peserta Baru) dilaksanakan di 24 kota (39 lokasi). Tingkat A mencatat 1.997 peserta hadir dengan 417 peserta lulus (20,9%), dan Tingkat B sebanyak 698 peserta hadir dengan 38 peserta lulus (5,4%).
3. Periode III (7–9 Oktober 2025, Peserta Baru) diselenggarakan di 24 kota (44 lokasi). Tingkat A mencatat 1.955 peserta hadir dengan 317 peserta lulus (16,2%), sedangkan Tingkat B mencatat 652 peserta hadir dengan 277 peserta lulus (42,5%).
4. Periode IV (1–3 Desember 2025, Peserta Mengulang) dilaksanakan di 13 kota (15 lokasi). Tingkat B mencatat 1.138 peserta hadir dengan 389 peserta lulus (34,2%), dan Tingkat C sebanyak 175 peserta hadir dengan 128 peserta lulus (73,1%).

Capaian tersebut memberikan kontribusi terhadap ketersediaan konsultan pajak tersertifikasi secara berkelanjutan, memperkuat standar kompetensi profesi di tingkat nasional, serta mendukung terciptanya layanan konsultasi perpajakan yang profesional dan sesuai ketentuan. Distribusi lokasi ujian yang luas turut meningkatkan aksesibilitas sertifikasi dan memperluas basis profesional perpajakan di berbagai daerah.

Throughout fiscal year 2025, the USKP was held in four periods with wide geographic coverage and high participation.

1. *Period I (26–28 May 2025, Repeat Participants) was held in 16 cities (24 locations). For Level A, 1,370 participants attended and 721 passed, resulting in a pass rate of 52.6%. For Level B, 556 participants attended and 128 passed, with a pass rate of 23.0%.*
2. *Period II (19–21 August 2025, New Participants) was held in 24 cities (39 locations). For Level A, 1,997 participants attended and 417 passed, resulting in a pass rate of 20.9%. For Level B, 698 participants attended and 38 passed, with a pass rate of 5.4%.*
3. *Period III (7–9 October 2025, New Participants) was held in 24 cities (44 locations). For Level A, 1,955 participants attended and 317 passed, resulting in a pass rate of 16.2%. For Level B, 652 participants attended and 277 passed, with a pass rate of 42.5%.*
4. *Period IV (1–3 December 2025, Repeat Participants) was held in 13 cities (15 locations). For Level B, 1,138 participants attended and 389 passed, resulting in a pass rate of 34.2%. For Level C, 175 participants attended and 128 passed, with a pass rate of 73.1%.*

These achievements contribute to the continuous provision of certified tax consultants, strengthen the profession's competency standards at the national level, and support the creation of professional tax consultancy services compliant with regulations. The wide distribution of test locations also improves the accessibility of certification and expands the tax professional base across regions.

UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Sertifikasi Ahli Kepabeanan bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai pada PPJK atau badan usaha terkait memiliki kompetensi yang memadai dalam ketentuan dan tata laksana kepabeanan. Keberadaan tenaga yang tersertifikasi mendukung kelancaran proses impor dan ekspor, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, serta memperkuat kualitas layanan jasa kepabeanan. Sasaran peserta SAK adalah masyarakat umum maupun pegawai pada PPJK atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabean, serta individu yang berminat berkarir di bidang ekspor-impor dan logistik kepabeanan.

Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui unit teknis terkait, dengan berpedoman pada PMK Nomor 219/PMK.04/2019 dan Peraturan Kepala BPPK tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Tahapan kegiatan meliputi pendaftaran daring, verifikasi administrasi, pembayaran PNBP sesuai ketentuan, pelaksanaan ujian berbasis *Computer-Assisted Test* (CAT), penetapan kelulusan, serta penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Ujian diselenggarakan secara periodik dan dilaksanakan di Pusdiklat Bea dan Cukai, Balai Diklat Keuangan di lingkungan BPPK, atau lokasi lain yang ditetapkan dalam pengumuman resmi.

Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan (SAK) Periode Oktober Tahun Anggaran 2025 telah diselenggarakan pada 29 Oktober 2025 secara serentak di 12 kota dengan metode *Computer-Assisted Test* (CAT). Dari 973 peserta terdaftar, sebanyak 940 peserta hadir mengikuti ujian, dengan tingkat kehadiran sebesar 96,61%. Berdasarkan penetapan hasil kelulusan, sebanyak 372 peserta dinyatakan lulus atau sebesar 39,57% dari total peserta yang mengikuti ujian. Hasil kelulusan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan

CUSTOMS EXPERT CERTIFICATION TEST

The Customs Expert Certification aims to ensure that employees at Customs Clearance and Forwarding Service Providers (PPJK) or related business entities have adequate competence in customs provisions and procedures. The presence of certified personnel supports smooth import and export processes, increases compliance with customs provisions, and strengthens the quality of customs services. The target participants of the Customs Expert Certification Test are the general public and employees at PPJK or business entities that handle customs obligations, as well as individuals interested in a career in export-import and customs logistics.

The Customs Expert Certification Test is organized by FETA through the relevant technical unit, guided by Regulation of the Ministry of Finance No.219 of 2019 and the Head of FETA Regulation on Guidelines for the Customs Expert Certification Test.

The process includes online registration, administrative verification, payment of applicable non-tax state revenue, a Computer-Assisted Test (CAT), determination of results, and certificate issuance for successful participants.

The examination is held periodically at the Center for Customs and Excise Education and Training, the Regional Campus of Finance Education and Training within FETA, or other locations stated in the official announcement.

The October 2025 Customs Expert Certification Test was held on 29 October 2025 simultaneously in 12 cities using the Computer-Assisted Test (CAT) method. Of the 973 registered participants, 940 attended the examination, resulting in an attendance rate of 96.61%. Based on the test's results, 372 participants passed, or a pass rate of 39.57%. These results were formalized through Decree of the Head of the FETA No. 128/PP/2025 dated 27 November 2025.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-128/PP/2025 tanggal 27 November 2025.

Selain menghasilkan tenaga ahli kepabeanan yang tersertifikasi, penyelenggaraan SAK juga memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui biaya sertifikasi yang dibayarkan peserta. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp2.380.000.000,00 atau 196,53% dari target pendapatan sebesar Rp1.211.000.000. Dari aspek pengelolaan anggaran, penyelenggaraan SAK Tahun Anggaran 2025 mencatat realisasi belanja sebesar Rp358.696.017,00 atau 52,12% dari pagu sebesar Rp688.235.000,00. Capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi peserta, efektivitas penyelenggaraan ujian, serta kontribusi nyata kegiatan sertifikasi terhadap penerimaan negara.

In addition to producing certified customs experts, the Customs Expert Certification Test also contributes to Non-Tax State Revenue through the certification fees paid by participants. Non-Tax State Revenue realization for fiscal year 2025 was Rp2,380,000,000.00, or 196.53% of the revenue target of Rp1,211,000,000. In terms of budget management, the 2025 Customs Expert Certification Test recorded expenditure realization of Rp358,696,017.00, or 52.12% of the ceiling of Rp688,235,000.00. These results show strong participant engagement, effective examination delivery, and the certification program's direct contribution to state revenue.



Pengelolaan Akreditasi

Accreditation Management

4.4

Adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas BPPK dalam melayani kebutuhan pelatihan keuangan negara secara langsung kepada semua stakeholder baik di tingkat pemerintah pusat atupun daerah, mendorong BPPK untuk mengembangkan suatu strategi dalam bentuk Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara. Akreditasi dilaksanakan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara sesuai dengan standar BPPK. Kebijakan ini juga memperluas jangkauan pembelajaran keuangan negara kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengakuan mutu program pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah (LPP).

Pelaksanaan akreditasi terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Praakreditasi
Meliputi:
 - a. Pengajuan permohonan rencana akreditasi program oleh lembaga pelatihan kepada Kepala BPPK;
 - b. Tanggapan dan penunjukan Balai/ Pusdiklat pemilik program;
 - c. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - d. Pelaksanaan self-assessment kesiapan akreditasi;
 - e. Konsultasi hasil self-assessment (minimal kesiapan $\geq 70\%$ dokumen persyaratan untuk lanjut tahap akreditasi);
 - f. Pendampingan (maksimal 6 bulan) apabila lembaga belum memenuhi persyaratan.

Due to limited resources and capacity, FETA cannot directly meet all state-finance training needs at the central and regional levels. To address this, FETA developed a strategy to accredit technical training programs in state finance.

This accreditation ensures that state-finance training delivered by government training providers meets FETA's quality standards. It also expands access to state-finance learning for ministries, agencies, and regional governments by recognizing the quality of training programs delivered by Government Training Providers (LPP).

The accreditation consists of three stages omit, as follows:

1. *Pre-Accreditation Stage*
This Includes:
 - a. *Submission of a program accreditation-plan application by the training institution to the Head of FETA;*
 - b. *Response and program owner designation of Campuses/Centers;*
 - c. *Identification of competency development needs;*
 - d. *An accreditation readiness self-assessment;*
 - e. *Consultation on self-assessment results (minimum readiness of $\geq 70\%$ of required documents to proceed to the accreditation stage);*
 - f. *Mentoring (maximum 6 months), if the requirements have not been fulfilled.*

2. Tahap Pelaksanaan Akreditasi
Meliputi:
 - a. Pemberitahuan persetujuan permohonan akreditasi;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. *Entry meeting;*
 - d. Visitasi (luring atau daring);
 - e. *Exit meeting* dan penandatanganan berita acara;
 - f. Penyampaian dan penetapan hasil penilaian akhir akreditasi oleh BPPK.
3. Tahap Pasca Akreditasi
Meliputi:
 - a. Pembinaan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemilik Program;
 - b. Pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan program terakreditasi;
 - c. Kewajiban lembaga untuk:
 - Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian;
 - Menyelenggarakan minimal 1 program per tahun;
 - Menyampaikan rencana dan laporan pelaksanaan program;
 - Menyediakan data dan dokumen kepada Tim Evaluator;
 - d. Penandatanganan berita acara pemantauan dan evaluasi

Pada tahun 2025, tidak terdapat LPP yang mengajukan proses akreditasi. Adapun pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan adalah pemantauan dan evaluasi terhadap 4 (empat) LPP, yaitu:

1. BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2. BPSDM Provinsi Jawa Barat
3. BPSDM Provinsi Jawa Timur
4. BPSDM Provinsi Sumatera Barat

2. *Accreditation Implementation Stage*
This Includes:
 - a. *Notification of the accreditation application approval;*
 - b. *review of required document completeness;*
 - c. *Entry meeting;*
 - d. *Visitation (in person or online);*
 - e. *Exit meeting and signing of the minutes;*
 - f. *Submission and determination of the final accreditation-assessment results by FETA.*
3. *Post-Accreditation Stage*
This Includes:
 - a. *Guidance by the center for education and training program owner;*
 - b. *Periodic monitoring and evaluation of the accredited programs delivery;*
 - c. *Institutional obligations to:*
 - *follow up on assessment recommendations;*
 - *deliver at least 1 program per year;*
 - *submit program plans and implementation reports; and*
 - *provide data and documents to the Evaluator Team;*
 - d. *Signing of the monitoring and evaluation minutes.*

In 2025, there had not been application by any government training provider (LPP) for the accreditation process.

The accreditation carried out was the monitoring and evaluation of 4 government training providers, namely:

1. *Human Resources Development Agency (BPSDM) of DKI Jakarta Province*
2. *Human Resources Development Agency (BPSDM) of West Java Province*
3. *Human Resources Development Agency (BPSDM) of East Java Province*
4. *Human Resources Development Agency (BPSDM) of West Sumatra Province*

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sepanjang tahun 2025 tersebut.

The following are the details of the monitoring and evaluation conducted throughout 2025

Rincian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Akreditasi Tahun 2025

Details of the 2025 Accreditation Program Monitoring and Evaluation

No.	Kegiatan	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	BPSDM Provinsi Jawa Barat	BPSDM Provinsi Jawa Timur	BPSDM Provinsi Sumatera Barat
1	Entry Meeting	18 Desember 2025	-	22 Desember 2025	23 Desember 2025
2	Penyampaian dokumen penyelenggaraan program pelatihan terakreditasi	18 s.d. 24 Desember 2025	-	22 s.d. 29 Desember 2025	23 s.d. 30 Desember 2025
3	Penilaian Pemantauan dan Evaluasi	18 s.d. 24 Desember 2025	-	23 s.d. 29 Desember 2025	23 s.d. 30 Desember 2025
4	Penyampaian hasil penilaian dan penandatanganan Berita Acara	24 Desember 2025	24 Desember 2025	29 Desember 2025	30 Desember 2025

Hasil Pelaksanaan Akreditasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. BPSDM DKI Jakarta memperoleh nilai sangat baik (94,50–97,31) dan dipersiapkan untuk re-akreditasi tahun 2027.
2. BPSDM Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan dari nilai 77,75 menjadi 92,63 dan berpotensi mengajukan peningkatan peringkat akreditasi pada 2026.
3. BPSDM Jawa Barat tidak menyelenggarakan program terakreditasi pada 2025 sehingga tidak dilakukan penilaian.
4. BPSDM Jawa Timur memperoleh nilai 67,00 untuk satu program, dengan rekomendasi perbaikan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir pada 2026.

The accreditation results were as follows.

1. Human Resources Development DKI Jakarta obtained a very good score (94.50–97.31) and is being prepared for re-accreditation in 2027.
2. Human Resources Development West Sumatra improved significantly, from 77.75 to 92.63, and may apply for an accreditation-rank upgrade in 2026.
3. Human Resources Development West Java did not deliver an accredited program in 2025, so no assessment was conducted.
4. Human Resources Development East Java obtained a score of 67.00 for one program, and was given recommendations for improvement before its accreditation expires in 2026.

Pengelolaan Beasiswa Kementerian Keuangan
Ministry of Finance Scholarship Management

4.5

GAMBARAN UMUM

Pengelolaan Beasiswa Kementerian Keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai melalui mekanisme tugas belajar yang diselenggarakan secara terencana, terstruktur, dan akuntabel. Program beasiswa bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi teknis pegawai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pengelolaan beasiswa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024, yang mengatur tata kelola tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, pada level teknis, program beasiswa Kementerian Keuangan diatur melalui Peraturan Kepala BPPK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Kebijakan Program Gelar Diploma IV, Sarjana, dan Pascasarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Secara administratif, pengelolaan beasiswa meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, seleksi dan penetapan peserta, pengelolaan administrasi dan pembiayaan, pemantauan serta evaluasi perkembangan studi, hingga penyelesaian studi dan penempatan kembali pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

Berikut ini adalah kinerja BPPK dalam rangka pengelolaan beasiswa pada tahun 2025:

- Terlaksananya proses seleksi dan penetapan peserta tugas belajar sesuai rencana kebutuhan organisasi.
- Terlaksananya pemantauan perkembangan studi secara berkala melalui penyampaian laporan perkembangan studi oleh peserta.

OVERVIEW

Scholarship management at the Ministry of Finance is part of employee competency development through a planned, structured, and accountable study assignment scheme. The program helps employees improve their academic qualifications and technical competencies to better support the Ministry's duties.

The Ministry manages its scholarships based on applicable regulations, including Minister of Finance Regulation No. 34 of 2024 on study assignments for civil servants within the Ministry. At the technical level, the program follows Head of FETA Regulation No. 1 of 2023 on the Management of Diploma IV, Bachelor's, and Postgraduate Scholarships within the Ministry of Finance.

The process covers needs planning, participant selection, administration and funding, study progress monitoring, completion of study, and employee redeployment based on organizational needs.

In 2025, FETA achieved the following in scholarship management:

- selected study assignment participants based on organizational needs;
- monitored participants' academic progress through regular study reports;

- Terjaganya tingkat keberhasilan studi yang ditunjukkan dengan capaian akademik sesuai standar yang dipersyaratkan.
- terselesaikannya studi oleh sejumlah peserta tepat waktu serta dilaksanakannya penempatan kembali sesuai ketentuan ikatan dinas.

SELEKSI BEASISWA

Seleksi beasiswa yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terstruktur dan berbasis merit, meliputi tahapan Perencanaan kebutuhan dan penetapan formasi (berkoordinasi dengan UPK dan Biro SDM), pengumuman dan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi substantif (yang dapat mencakup tes potensi akademik, kemampuan bahasa, dan/atau wawancara), hingga penetapan kelulusan dan penerbitan keputusan tugas belajar. Seluruh tahapan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan mengacu pada ketentuan tugas belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 serta selaras dengan kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi.

PERSIAPAN BEASISWA

Program persiapan beasiswa bagi penerima beasiswa ministerial (MINTS) atau Program Keberangkatan atau dikenal dengan sebutan *Pre-Departure* (Predep) dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Dalam rangka mempersiapkan kompetensi karyasiswa untuk dapat diterima dan menjalani studi di luar negeri dan diharapkan mampu menembus dan menimba ilmu di 30 besar universitas dunia (*by subject*).

- *maintained strong study success rates, with participants meeting the required academic standards; and*
- *ensured that participants completed their studies on time and joined the redeployment program in line with service-bond requirements.*

SCHOLARSHIP SELECTION

FETA manages scholarship selection through the Center for Professional Development and Quality Assurance in a structured and merit-based process. The process includes needs planning and quota setting in coordination with the Performance-Owning Units (UPK) and the Bureau of Human Resources, followed by announcement and registration, administrative screening, substantive assessment, and final selection. The substantive assessment may include academic aptitude tests, language tests, and/or interviews.

FETA conducts all stages transparently and accountably, in line with Minister of Finance Regulation No. 34 of 2024 on study assignments and the Ministry's competency development needs.

SCHOLARSHIP PREPARATION

The scholarship preparation program for Ministerial Scholarship (MINTS) recipients, commonly known as the Pre-Departure Program, prepares Ministry of Finance employees for postgraduate study overseas. The program supports the Ministry's vision, mission, and strategic goals by helping awardees gain admission to and succeed at leading universities, preferably those ranked in the world's top 30 by subject.

Program Prakeberangkatan terdiri dari 3 program utama, yaitu:

1. Program Bahasa Inggris
Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi Bahasa Inggris penerima Beasiswa *Ministerial Scholarship* sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam mencari universitas dan menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi Bahasa Inggris serta memenuhi skor kemampuan Bahasa Inggris IELST minimal 7,0 atau iBT minimal 94; memenuhi kebutuhan kompetensi *leadership* peserta pelatihan; dan memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di universitas peringkat 30 besar dunia (*by subject*) dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang studi.
2. Pengembangan Kepemimpinan
Program ini diselenggarakan untuk membekali kompetensi *leadership* bagi para awardee agar dapat menjadi para pemimpin yang berkompeten. Tujuan dari pengembangan kepemimpinan.
 - a. Membentuk mental dan karakter sebagai *driver*/penggerak perubahan.
 - b. Memberikan insight mengenai diri dan mendekatkan dengan pencapaian visi organisasi.
 - c. Memperkuat motivasi internal bagi *change agent* dan *change leader* dalam menyebarluaskan nilai-nilai organisasi.
 - d. Menjelaskan terkait bringing *corporate value to civil servant's performance, how to be an innovative person on bureaucracy system dan adapting premium stakeholder service on public service sector.*
 - e. Menjelaskan kompetensi *personality qualification for next government Leader.*
 - f. Menjelaskan kompetensi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan orang lain,

The Pre-Departure Program consists of three main components:

1. English Language Program

This program improves awardees' English proficiency and prepares them for postgraduate study abroad. It aims to help participants meet university language requirements, with a target score of at least IELTS 7.0 or TOEFL iBT 94. It also supports the leadership and academic competencies needed for admission to top universities.

2. Leadership Development

This program develops the leadership skills and mindset needed by future government leaders. It helps participants build the character of change agents, understand the Ministry's vision, strengthen their motivation to lead change, apply organizational values in public service, innovate within a bureaucratic system, serve stakeholders effectively, work well with others, and become a good leader.

3. Study Preparation

This program equips participants with the skills and documents needed for their study plans and university applications. It covers areas such as research methods, statements of purpose, academic proposals, university applications, statistics for social sciences, academic presentations, cross-cultural communication, and GRE/GMAT preparation.

mengutarakan ide dalam kelompok/tim, *maintain relationship among stakeholders* dan menjadi sosok pemimpin yang baik.

3. Persiapan Studi

Program persiapan ini diselenggarakan untuk membekali para peserta untuk mempersiapkan kemampuan maupun dokumen terkait dengan rencana studi dan/atau pendaftaran ke universitas yang dituju. Program Persiapan Studi ini memiliki tujuan:

- Memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di universitas peringkat 30 besar dunia (*by subject*) dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang studi;
- Dapat diterima serta mampu menjalani proses perkuliahan di kampus peringkat 30 besar dunia (*by subject*) dengan baik.
- Dapat memahami dan/atau menyusun materi antara lain: *Research Method, Statement of Purpose, Writing Academic Proposal, University Application, Statsitic for Social Science, Academic Presentation, Cross Cultural Communication, GRE/ GMAT*

PEMANTAUAN AWARDEE

Pemantauan awardee merupakan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui kemajuan studi akademik pegawai yang sedang menjalani tugas belajar (PNS Tugas Belajar Dibiayai). Laporan ini menjadi salah satu bahan evaluasi pelaksanaan tugas belajar serta dasar penilaian kinerja para penerima tugas belajar. Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan menggunakan metode self-assessment yang dilakukan di setiap semester. Berdasarkan PMK 34/2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan, pemantauan awardees bertujuan untuk:

- Memastikan kelancaran studi termasuk capaian akademik, IPK, progres semester, atau progres penelitian.
- Mengidentifikasi kendala/tantangan studi yang dihadapi peserta dan solusi yang direncanakan.
- Memantau keberadaan dan kondisi peserta di tempat studi selama masa tugas belajar.
- Menjadi dasar penilaian kinerja pegawai dalam rangka tugas belajar yang sedang dijalankan.

Selain itu, terdapat juga mekanisme Laporan Perkembangan Studi (LPS) yang turut menjadi bahan evaluasi keseriusan peserta dalam studi, dasar penilaian kinerja dalam tugas belajar, dan sumber informasi untuk perbaikan dan dukungan akademik bila diperlukan.

PROGRAM RE-ENTRY

Program Pemanfaatan PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai (*Re-entry Program*) yang selanjutnya adalah program pemanfaatan bagi PNS Selesai Tugas Belajar untuk Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan, Tugas Diberhentikan, atau Belajar Dibiayai Tidak Tugas Belajar Mandiri

Diberhentikan, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 34 Tahun 2024, *re-entry program* sebelum penempatan

AWARDEE MONITORING

Awardee monitoring is a regular reporting process used to track the academic progress of civil servants on funded study assignments. The reports help evaluate the study assignment and assess the awardees' performance during their study period.

The monitoring is conducted every semester through self-assessment. Under Minister of Finance Regulation No. 34 of 2024 on the Management of Study Assignments for Civil Servants within the Ministry of Finance, awardee monitoring aims to:

- ensure study success, including academic achievement, GPA, semester progress, and research progress;*
- identify challenges faced by awardees and determine possible solutions;*
- monitor awardees' attendance and condition at their place of study; and*
- support performance assessment during the study assignment.*

The Ministry also uses the Study Progress Report (LPS) to evaluate awardees' commitment to their studies, support performance assessment, and identify any academic assistance they may need.

RE-ENTRY PROGRAM

The Re-entry Program helps civil servants return to work after completing a study assignment, whether funded with (Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan) or without release from duty (Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan), or self-funded with release from duty (Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan). The program ensures that returning employees are redeployed in line with organizational needs.

Under Minister of Finance Regulation No. 34 of 2024, the Re-entry Program



kembali bersifat wajib dan lintas UE 1 serta dikoordinasikan oleh Biro SDM selaku Unit Pengelola SDM di Kemenkeu.

Dalam pelaksanaannya, setiap Unit Eselon I/BLU/SMV berperan sebagai Unit Pengelola Kepegawaian yang mengoordinasikan serta mengirim peserta *Re-Entry Program* dan sebagai Koordinator Unit Pemilik Program yang menyelenggarakan teknis program dan mengoordinasikan mentor untuk setiap program.

FORUM DISKUSI PROGRAM BEASISWA

Dalam rangka menunjang proses transformasi dan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, perlu adanya proses penguatan kapasitas dan kompetensi yang lebih baik bagi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama melalui pendidikan gelar. Salah satu program untuk meningkatkan kompetensi organisasi bagi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan adalah melalui pemberian program beasiswa gelar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sebagaimana tercantum dalam Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS), sehingga para pegawai dapat mengembangkan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pengalamannya.

Untuk menciptakan Kementerian Keuangan yang agile sekaligus adaptif dengan disrupsi teknologi, diperlukan program penyiapan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Sebagai sarana informasi yang valid dan menyeluruh terkait program beasiswa dimaksud, perlu adanya *Scholarship Sharing Session* yang melibatkan pengelola beasiswa, universitas mitra program beasiswa, dan para alumni. Kegiatan ini bukan sekadar acara

is mandatory before redeployment. It applies across Echelon I units and is coordinated by the Bureau of Human Resources as the Ministry's Human Resources Management Unit.

In practice, each Echelon I Unit, Public Service Unit, or Special Machine Vehicle (SMV) serves as the Personnel Management Unit by coordinating and sending participants to the program. They also act as Program-Owner Unit Coordinators by delivering the technical program and assigning mentors for each participant.

SCHOLARSHIP PROGRAM DISCUSSION FORUM

To support bureaucratic transformation and reform, the Ministry of Finance needs to strengthen its employees' capacity and competencies, especially through degree education. One way to do this is by providing degree scholarships aligned with organizational needs under the Civil Servant Competency Development Program (PPKPNS). These scholarships help employees develop their skills, broaden their knowledge, and gain wider professional experience.

To build an agile Ministry that can adapt to technological disruption, employees need access to clear and comprehensive information about scholarship opportunities. For this reason, the Ministry held Scholarship Sharing Sessions involving scholarship managers, partner universities, and alumni.

These sessions are more than ceremonial events. They form part of a broader effort to build a sustainable education and

seremonial, melainkan sebuah inisiatif terpadu untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kolaborasi yang berkelanjutan yang bertujuan untuk:

1. untuk mengakomodasi dan mempersiapkan para calon penerima beasiswa secara matang.
2. untuk menjembatani komunikasi antara calon pendaftar, para alumni penerima beasiswa, dan para pengelola program.
3. melalui pendidikan, diharapkan tercipta sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga membawa misi kemanusiaan, solidaritas global, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional serta kemajuan Indonesia di kancah internasional.
4. untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Acara *Scholarships Sharing Session* ini dikemas dalam kemasan yang santai dan merangkul para generasi muda yang sedang bersemangat untuk mencari beasiswa Kementerian Keuangan. Acara ini lebih dikenal dengan nama *BroSis* atau *Obrolan Beasiswa* dan juga dalam bentuk *Podcast*. Sepanjang tahun 2025 telah terselenggarakan sebanyak 9 kali penyelenggaraan obrolan beasiswa dan dua kali dalam bentuk *Podcast*. Adapun tema kegiatan sebagai berikut:

1. Potensi Tibaikmu bersama MINTS 2025
2. Beasiswa LPDP tahap I Tahun 2025
3. Manaaki New Zealand Scholarship 2025
4. Are You Ready Australia Awards Scholarship
5. Beasiswa KOICA 2025
6. Beasiswa Bersama INSPIRA 88
7. Beasiswa Split-Site Masters Program AAI (SSMP AAI) Tahun 2026
8. INSPIRA 2026, Ready, Set, Study
9. INSPIRA dan Seleksi UPTB Reguler Periode 1 Tahun 2026
10. Beasiswa MINTS GLOBE

collaboration ecosystem. The sessions aim to:

1. *prepare prospective scholarship applicants more effectively;*
2. *connect applicants with scholarship alumni and program managers;*
3. *develop outstanding employees who are academically capable, globally minded, and ready to contribute to national development; and*
4. *support the improvement of Indonesia's human resource quality.*

The sessions are delivered in a relaxed and youth-friendly format for employees interested in Ministry of Finance scholarships. The program is known as BroSis or Scholarship Chat, and some sessions are also delivered as podcasts. In 2025, the Ministry held nine Scholarship Chat sessions and two podcast episodes under the following themes:

1. *Your Best Potential with MINTS 2025*
2. *LPDP Scholarship Stage I 2025*
3. *Manaaki New Zealand Scholarship 2025*
4. *Are You Ready: Australia Awards Scholarship*
5. *KOICA Scholarship 2025*
6. *INSPIRA Joint Scholarship*
7. *AAI Split-Site Masters Program (SSMP AAI) Scholarship 2026*
8. *INSPIRA 2026, Ready, Set, Study*
9. *INSPIRA and Regular Study Assignment Management Unit (UPTB) Selection Period 1, 2026*
10. *MINTS GLOBE Scholarship*



PEMANFAATAN ALUMNI PROGRAM BEASISWA

Pemanfaatan Alumni Program Beasiswa adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk melibatkan, mendayagunakan, serta mengoptimalkan kompetensi, pengalaman, dan jejaring alumni penerima beasiswa guna mendukung peningkatan kualitas program, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penciptaan dampak berkelanjutan bagi organisasi, masyarakat, dan/atau pembangunan nasional.

UTILIZATION OF SCHOLARSHIP PROGRAM ALUMNI

Scholarship alumni utilization refers to the policies, strategies, and activities used to engage alumni and make the most of their competencies, experience, and networks. It aims to improve program quality, strengthen institutional capacity, and create lasting benefits for the organization, society, and national development.



4.6

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pembelajaran

Implementation of Learning Quality Assurance

Penjaminan Mutu Pembelajaran (PMP) di BPPK dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar mutu yang berlaku dan mendukung tujuan strategis peningkatan kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem ini dilaksanakan secara terpadu melalui tiga tahapan utama: perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan penilaian mutu. Ruang lingkup PMP tahun 2025 mencakup seluruh 5 Pusdiklat dan 11 Balai Diklat Keuangan, dengan objek penilaian berupa sampel pelatihan serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Komponen penilaian mencakup AKP, desain dan pengembangan materi, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta sarana-prasarana bagi Pusdiklat; dan penyelenggaraan, evaluasi, serta sarana-prasarana bagi BDK.

Secara umum, hasil PMP menunjukkan mutu pembelajaran yang sangat baik, dengan nilai akhir Pusdiklat berada pada kisaran 96,5–98,0, dan BDK berada pada kisaran 94,6–100, menegaskan konsistensi penerapan standar mutu di seluruh unit BPPK.

Pelaksanaan PMP TA 2025 berlangsung pada 25 Agustus–31 Desember 2025, dimulai melalui entry meeting untuk penyampaian kebijakan dan mekanisme penilaian. Selanjutnya dilakukan visitasi ke seluruh unit pembelajaran pada periode 22 September–31 Oktober 2025, diikuti penilaian terhadap sampel pelatihan sepanjang 1 September–30 November 2025.

FETA conducts Learning Quality Assurance (PMP) to ensure that its learning process meets quality standards and supports competency development across the Ministry of Finance. This program is carried out through three main stages: quality planning, quality control, and quality assessment.

In 2025, Learning Quality Assurance covered all five Centers and eleven Regional Campuses. The assessment reviewed training samples and the completion of follow-up actions from the previous year's recommendations. For the Centers, the assessment covered Learning Needs Analysis (AKP), material design and development, learning delivery, learning evaluation, and facilities and infrastructure. For the Regional Campuses, it covered learning delivery, evaluation, and facilities and infrastructure.

Overall, the 2025 Learning Quality Assurance results showed very strong learning quality. The Centers scored between 96.5 and 98.0, while the Regional Campuses scored between 94.6 and 100. These results show that FETA units consistently applied the required quality standards.

Learning Quality Assurance implementation in 2025 was conducted from 25 August to 31 December 2025, commencing with an entry meeting to communicate the assessment policies and procedures. This was followed by site visits to all learning units from 22 September to 31 October 2025, and assessments of selected training programs conducted from 1 September to 30 November 2025.



Tim Penilai melakukan pemeriksaan dokumen, analisis data pembelajaran, serta penyusunan rekomendasi perbaikan yang dirampungkan pada 17 November–12 Desember 2025. Pelaksanaan PMP ditutup melalui closing meeting dengan masing-masing unit pada 17–24 Desember 2025, dan laporan akhir diselesaikan pada awal Januari 2026.

Hasil PMP menghasilkan berbagai temuan terkait kelengkapan database pengajar, ketertiban dokumen AKP dan KNS, validasi soal, uji coba e-learning, evaluasi pembelajaran, serta manajemen dokumen mutu. Seluruh temuan tersebut disertai rekomendasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan PMP 2025 dinyatakan berjalan tertib, lancar, dan optimal serta memperkuat standarisasi dan kualitas pembelajaran di seluruh unit BPPK

The assessment identified several areas for improvement, including instructor database completeness, Learning Needs Analysis and test paper framework (KNS), question validation, e-learning trials, learning evaluation, and quality document management. Each finding was followed by recommendations for improvement. Overall, the 2025 PMP was completed successfully and helped strengthen the quality of learning and standardization across all FETA units.



Pengelolaan Tes Non Jabatan Fungsional

Management of Non-Functional Position Tests

4.7

Pelaksanaan tes non jabatan fungsional tahun 2025 mencakup berbagai kegiatan seleksi, pemetaan potensi dan kompetensi, serta ujian kedinasan yang diselenggarakan untuk mendukung sistem manajemen talenta dan pengembangan karier ASN. Kegiatan ini meliputi tes untuk kebutuhan rekrutmen, tugas belajar, profiling kompetensi, sertifikasi kemampuan bahasa Inggris, hingga ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas.

Secara umum, penyelenggaraan tes dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu daring (online) dan luring (test center). Pelaksanaan berbasis online digunakan terutama untuk tes dengan jumlah peserta besar dan cakupan nasional, seperti Tes Bahasa Inggris (TBI), English Competency Test (ECT), Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan Ujian Dinas (UD). Sementara itu, pelaksanaan di test center—antara lain di PKN STAN dan Balai Diklat (BDK)—diterapkan pada tes yang memerlukan pengawasan langsung atau kebutuhan teknis tertentu.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tes non jabatan fungsional tahun 2025 berjalan dengan lancar dan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, kesiapan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap pengukuran kompetensi yang terstruktur dan berbasis merit.

In 2025, FETA delivered various non-functional position tests to support talent management and career development within the state civil apparatus. These included recruitment tests, study-assignment tests, competency and potential mapping, English-language certification tests, and rank promotion examinations.

The tests were delivered through two main modes: online and offline. Online testing was used mainly for large-scale and nationwide assessments, such as the English Language Test (TBI), English Competency Test (ECT), Rank Promotion Adjustment Examination (UPKP), and Rank Promotion Examination (UD). Offline testing at test centers, including PKN STAN and regional campuses, was used for assessments that required direct supervision or specific technical arrangements.

Overall, the 2025 testing activities ran smoothly and recorded strong participation. This reflects effective planning, adequate infrastructure, and the Ministry's growing need for structured and merit-based competency assessment.



UJIAN DINAS

Pada tahun 2025 ujian dinas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut.

- Waktu Penyelenggaraan: 11-13 November 2025
- Lokasi Penyelenggaraan: Online
- Peserta terdaftar: 957
- Peserta hadir: 893
- Peserta lulus: 100

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) IV, V, VI

Pada tahun 2025 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) IV, V, VI dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut.

- Waktu Penyelenggaraan: 24-28 November 2025
- Lokasi Penyelenggaraan: Online
- Peserta terdaftar: 4618
- Peserta hadir: 4493
- Peserta lulus: 1611

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PKN STAN

Pada tahun 2025 SPMB PKN STAN dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk SPMB Pendidikan Tinggi (PT) dan SPMB Pendidikan Menengah (PM). Pada SPMB PT dilaksanakan TPA dan TBI, sedangkan SPMB PM dilaksanakan TPA, TBI, dan Psikotest. Rincian penyelenggaraan SPMB sebagai berikut.

1. TPA-PBI SPMB PKN STAN - PT
 - Waktu Penyelenggaraan: 19-21 Agustus 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 2176
 - Peserta hadir: 2121
2. TPA-TBI Psikotest PKN STAN - PM
 - Waktu Penyelenggaraan: 9-11 September 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: test center (PKN STAN, BDK, atau lokasi lainnya)
 - Peserta terdaftar: 1481
 - Peserta hadir: 1437

RANK PROMOTION EXAMINATION (UD)

In 2025, the Rank Promotion Examination was held once, with the following details.

- Date: 11-13 November 2025
- Location: Online
- Registered participants: 957
- Attended: 893
- Passed: 100

RANK PROMOTION ADJUSTMENT EXAMINATION (UPKP) IV, V, VI

In 2025, the UPKP IV, V, and VI were held once, with the following details.

- Date: 24-28 November 2025
- Location: Online
- Registered participants: 4,618
- Attended: 4,493
- Passed: 1,611

PKN STAN NEW STUDENT ADMISSION SELECTION (SPMB)

In 2025, the PKN STAN SPMB was held twice: SPMB for Higher-Education entrants (PT) and SPMB for Secondary-Education entrants (PM). One of the stages at SPMB-PT comprised the Academic Aptitude Test (TPA) and English Language Test (TBI), while one of the stages at SPMB-PM comprised the TPA, TBI, and Psychological Test. Details are as follows.

1. TPA-TBI at PKN STAN SPMB – PT
 - Date: 19-21 August 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 2,176
 - Attended: 2,121
2. TPA-TBI-Psychological Test at PKN STAN SPMB – PM
 - Date: 9-11 September 2025
 - Location: Test center (PKN STAN, BDK, or other locations)
 - Registered participants: 1,481
 - Attended: 1,437

UNIT PENGELOLA TUGAS BELAJAR (UPTB)

Pada tahun 2025 Unit Pengelola Tugas Belajar (UPTB) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Tes yang dilaksanakan pada UPTB terdiri dari TPA dan TBI. Rincian penyelenggaraan UPTB sebagai berikut.

- Waktu Penyelenggaraan: 15 Juli 2025
- Lokasi Penyelenggaraan: test center PKN STAN
- Peserta terdaftar: 104
- Peserta hadir: 104

TES BAHASA INGGRIS (TBI)

Pada tahun 2025 Tes Bahasa Inggris (TBI) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut.

1. TBI PKN STAN
 - Waktu Penyelenggaraan: 15 Juli 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: test center PKN STAN
 - Peserta terdaftar: 104
 - Peserta hadir: 104
2. TBI Profiling Kemenkeu November
 - Waktu Penyelenggaraan: 18-19 November 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 507
 - Peserta hadir: 453
3. TBI Profiling Kemenkeu Desember
 - Waktu Penyelenggaraan: 2-18 Desember 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 9499
 - Peserta hadir: 8477

PSIKOTEST

Pada tahun 2025 psikotest dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut.

1. Psikotest Penilaian Potensi Batch 13 91
 - Waktu Penyelenggaraan: 29 Juli 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: test center PKN STAN
 - Peserta terdaftar: 111
 - Peserta hadir: 108

STUDY ASSIGNMENT MANAGEMENT UNIT (UPTB)

In 2025, the UPTB test was held once, comprising the TPA and TBI. Details are as follows.

- Date: 15 July 2025
- Location: PKN STAN test center
- Registered participants: 104
- Attended: 104

ENGLISH LANGUAGE TEST (TBI)

In 2025, the English Language Test (TBI) was held three times, with details as follows.

1. TBI PKN STAN
 - Date: 15 July 2025
 - Location: PKN STAN test center
 - Registered participants: 104
 - Attended: 104
2. TBI MoF Profiling – November
 - Date: 18-19 November 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 507
 - Attended: 453
3. TBI MoF Profiling – December
 - Date: 2-18 December 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 9,499
 - Attended: 8,477

PSYCHOLOGICAL TEST

In 2025, the psychological test was held twice, with details as follows.

1. Potential Assessment Psychological Test, Batch 13
 - Date: 29 July 2025
 - Location: PKN STAN test center
 - Registered participants: 111
 - Attended: 108

2. Psikotest Penilaian Potensi Batch 14
- Waktu Penyelenggaraan: 5 Agustus 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 112
 - Peserta hadir: 101

ENGLISH COMPETENCY TEST (ECT)

Pada tahun 2025 English Competency Test (ECT) dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali, yang dibagi lagi menjadi ECT Kanwil DJBC Jatim I sebanyak 1 (satu) kali, ECT Pejabat Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 5 (lima) kali, dan ECT Pejabat Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 3 (tiga) kali. Penyelenggaraan ECT dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

1. ECT PKP XXIII
- Waktu Penyelenggaraan: 17 Juli 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 28
 - Peserta hadir: 28
2. ECT Kanwil DJBC Jatim I Batch 2
- Waktu Penyelenggaraan: 23 Juli 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Kanwil DJBC Jatim
 - Peserta terdaftar: 64
 - Peserta hadir: 56
3. ECT PKA XIV
- Waktu Penyelenggaraan: 22 Agustus 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 22
 - Peserta hadir: 22
4. ECT PKP XXIV
- Waktu Penyelenggaraan: 11 September 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 27
 - Peserta hadir: 25
5. ECT PKP XXV
- Waktu Penyelenggaraan: 11 September 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 33
 - Peserta hadir: 30

2. Potential Assessment Psychological Test, Batch 14
- Date: 5 August 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 112
 - Attended: 101

ENGLISH COMPETENCY TEST (ECT)

In 2025, the English Competency Test (ECT) was held 9 times, consisting of ECT for the DGCE East Java I Regional Office (1 time), ECT for Supervisory Leadership Officials (PKP) (5 times), and ECT for Administrator Leadership Officials (PKA) (3 times). Details are as follows.

1. ECT for PKP XXIII
- Date: 17 July 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 28
 - Attended: 28
2. ECT for DGCE East Java I Regional Office, Batch 2
- Date: 23 July 2025
 - Location: DGCE East Java I Regional Office
 - Registered participants: 64
 - Attended: 56
3. ECT for PKA XIV
- Date: 22 August 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 22
 - Attended: 22
4. ECT for PKP XXIV
- Date: 11 September 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 27
 - Attended: 25
5. ECT for PKP XXV
- Date: 11 September 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 33
 - Attended: 30

6. ECT PKA XV
- Waktu Penyelenggaraan: 15 Oktober 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 92
 - Peserta hadir: 28
7. ECT PKA XVI
- Waktu Penyelenggaraan: 24 Oktober 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 28
 - Peserta hadir: 28
8. ECT PKP XXVI
- Waktu Penyelenggaraan: 12 Desember 2025
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 34
 - Peserta hadir: 34
9. ECT PKP XXVII
- Waktu Penyelenggaraan: 12-17 Desember 2015
 - Lokasi Penyelenggaraan: Online
 - Peserta terdaftar: 32
 - Peserta hadir: 32

6. ECT for PKA XV
- Date: 15 October 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 92
 - Attended: 28
7. ECT for PKA XVI
- Date: 24 October 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 28
 - Attended: 28
8. ECT for PKP XXVI
- Date: 12 December 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 34
 - Attended: 34
9. ECT for PKP XXVII
- Date: 12-17 December 2025
 - Location: Online
 - Registered participants: 32
 - Attended: 32



Pendidikan Vokasi Politeknik Keuangan Negara STAN

Vocational Education at the Polytechnic of State Finance STAN (PKN STAN)

4.8

Selain mengelola pembelajaran di bidang Keuangan Negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, BPPK juga mengelola Program Pendidikan Vokasi di bidang keuangan negara melalui Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Sebagai perguruan tinggi, PKN STAN melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Terdapat 9 (sembilan) Program Studi (Prodi) di PKN STAN yang terdiri dari 3 (tiga) Prodi jenjang Program Sarjana Terapan dan 6 (enam) Prodi jenjang Diploma III. Prodi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan;
2. Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan;
3. Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan;
4. DIII Akuntansi;
5. DIII Pajak;
6. DIII Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai;
7. DIII Kepabeanaan dan Cukai;
8. DIII Kebendaharaan Negara; dan
9. DIII Manajemen Aset.

Sepanjang Tahun 2025, terdapat berbagai kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi di PKN STAN. Kegiatan tersebut meliputi pemutakhiran kurikulum, pengembangan dan digitalisasi RPS, peningkatan kapasitas dosen, pengelolaan bahan ajar dan sistem pembelajaran digital, serta penguatan tata kelola akademik. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran.

In addition to managing learning and development in the field of State Finance through education and training, the FETA also oversees vocational education in the field of State Finance through the PKN STAN. As a higher education institution, the PKN STAN carries out the Three Pillars of Higher Education (Tridharma of Higher Education), namely Education and Teaching, Research, and Community Service.

EDUCATION AND TEACHING

The PKN STAN offers nine study programs, comprising three Applied Bachelor's Degree programs and six Diploma III programs, as follows:

1. *Applied Bachelor Program in Public Sector Accounting;*
2. *Applied Bachelor Program in State Finance Management;*
3. *Applied Bachelor Program in Public Asset Management;*
4. *Diploma III Program in Accounting;*
5. *Diploma III Program in Tax;*
6. *Diploma III Program in Land and Property Tax/Valuer;*
7. *Diploma III Program in Customs and Excise;*
8. *Diploma III Program in State Treasury; and*
9. *Diploma III Program in Asset Management.*

Throughout 2025, various activities supported the delivery of vocational education at PKN STAN, including curriculum updating, the development and digitalization of Semester Learning Plans, lecturer capacity building, the management of teaching materials and digital learning systems, and the strengthening of academic governance. All activities were carried out in a planned, coordinated manner as part of efforts to improve learning quality.

Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum serta Instrumen Pembelajaran

1. Pemutakhiran dan Pengembangan Kurikulum
 - a. Membentuk Tim Pemutakhiran Kurikulum untuk memastikan proses pembaruan kurikulum berjalan sistematis dan terarah.
 - b. Kurikulum direviu dan diselaraskan dengan arahan strategis Kementerian Keuangan guna menjaga relevansi institusional.
 - c. Penguatan CPL dan CPMK dilakukan dengan mengintegrasikan Skills of Tomorrow sebagai respons terhadap dinamika kompetensi masa depan.
 - d. Mata kuliah diidentifikasi dan dievaluasi untuk menghindari redundansi serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.
 - e. Roadmap pengembangan kurikulum disusun sebagai panduan transformasi dan digitalisasi kurikulum secara bertahap.
2. Pengembangan dan Implementasi RPS Digital
 - a. RPS Semester Genap dan Gasal TA 2024/2025 dan 2025/2026 disusun, direviu, dan difinalisasi sesuai standar akademik.
 - b. Tim menyusun RPS lintas Unit Eselon I dibentuk sebagai bentuk kolaborasi strategis antarunit.
 - c. Digitalisasi RPS dilaksanakan melalui kerja sama dengan Unit Sistem Informasi, termasuk UAT, piloting, bimbingan teknis, dan coaching clinic.
 - d. RPS ditetapkan melalui Keputusan Direktur dan didistribusikan sebelum perkuliahan dimulai untuk menjamin kesiapan pembelajaran.
 - e. Implementasi RPS Digital dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Curriculum and Learning-Instrument Planning and Development

1. Curriculum Updating and Development
 - a. Forming a Curriculum Updating Team to ensure the curriculum-updating process runs in a systematic and focused manner.
 - b. Reviewing and aligning the curriculum with the Ministry of Finance's strategic directives to maintain institutional relevance.
 - c. Strengthening graduate learning outcomes (CPL) and course learning outcomes (CPMK) by integrating Skills of Tomorrow in response to future competency dynamics.
 - d. Identifying and evaluating courses to avoid redundancy and ensure alignment with organizational needs.
 - e. Developing a curriculum-development roadmap as a guide for the gradual transformation and digitalization of the curriculum.
2. Development and Implementation of Digital Semester Learning Plans
 - a. Preparing, reviewing, and finalizing Semester Learning Plans (RPS) for both semesters of Academic Years 2024/2025 and 2025/2026 in accordance with academic standards.
 - b. Establishing cross-Echelon I Semester Learning Plan (RPS) drafting teams as a form of strategic inter-unit collaboration.
 - c. Digitalizing Semester Learning Plans in collaboration with the Information Systems Unit, including user acceptance testing (UAT), piloting, technical guidance, and coaching clinics.
 - d. Establishing Semester Learning Plans through a Director's Decree and distributing them before lectures begin to ensure learning readiness.
 - e. Conducting periodic evaluations of Digital Semester Learning Plans implementation to ensure its effectiveness and sustainability.

3. Perencanaan dan Evaluasi Plotting Pengajar
 - a. Plotting pengajar internal dan eksternal dikoordinasikan lintas program studi secara terstruktur.
 - b. Penyediaan pengajar dilakukan melalui kolaborasi dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - c. Seleksi dan wawancara calon pengajar eksternal dilaksanakan untuk menjamin kualitas akademik.
 - d. Kesesuaian kompetensi pengajar dengan mata kuliah yang diampu dievaluasi secara akademik.
 - e. Linimasa plotting semester berikutnya disusun sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dosen

1. Program Pengembangan Kompetensi dan Pedagogi
 - a. Workshop pengembangan pedagogi dosen diselenggarakan dengan melibatkan narasumber dari perguruan tinggi nasional.
 - b. Program upskilling pedagogi dirancang sebagai skema pengembangan kompetensi berkelanjutan.
 - c. Blueprint e-learning terkait pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah disusun untuk implementasi tahun 2026.
2. Sertifikasi dan Penguatan Karier Akademik Dosen
 - a. Kebutuhan sertifikasi dosen diidentifikasi beserta dukungan anggarannya.
 - b. Dosen didampingi dalam proses percepatan kenaikan jabatan akademik.
 - c. Rekomendasi senat terkait usulan kenaikan jabatan akademik ditindaklanjuti secara administratif dan substansial.

3. *Instructor Plotting Planning and Evaluation*
 - a. *Coordinating the assignment of internal and external instructors across study programs in a structured manner.*
 - b. *Providing instructors through collaboration with Echelon I Units within the Ministry of Finance.*
 - c. *Conducting selection and interviews of prospective external instructors to ensure academic quality.*
 - d. *Evaluating the alignment between instructors' competencies and the courses they teach from an academic perspective.*
 - e. *Developing a timeline for instructor assignments for the subsequent semester as part of continuous improvement efforts.*

Lecturer Development and Capacity Building

1. *Competency and Pedagogy Development Program*
 - a. *Conducting pedagogical development workshops for lecturers featuring resource persons from national higher education institutions.*
 - b. *Designing a pedagogical upskilling program as a continuous competency development initiative.*
 - c. *Preparing an e-learning blueprint on the use of AI in academic writing for implementation in 2026.*
2. *Lecturer Certification and Academic-Career Strengthening*
 - a. *Identifying lecturer certification requirements, including the associated budgetary support.*
 - b. *Supporting lecturers in accelerating the process of academic rank promotion.*
 - c. *Following up on senate recommendations regarding academic-rank promotion proposals administratively and substantively.*

3. Penilaian Kinerja dan Apresiasi Dosen
 - a. Penilaian kinerja dosen dilaksanakan mencakup aspek pendidikan, penelitian, pengabdian, dan layanan akademik lainnya.
 - b. Dosen berprestasi ditetapkan sebagai bentuk apresiasi dan penguatan budaya akademik.
4. Koordinasi Penugasan Dosen
 - a. Penugasan dosen sebagai narasumber, pengajar, dan peserta forum strategis dikoordinasikan secara terintegrasi.
 - b. Calon pengajar tamu dipetakan dan dianalisis untuk memperkaya perspektif pembelajaran.

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dosen

1. Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Aset Intelektual
 - a. Aset intelektual dikelola dan dikendalikan mutunya melalui Knowledge Management System.
 - b. Panitia Penjaminan Mutu Aset Intelektual dibentuk untuk memastikan standar kualitas publikasi.
 - c. Jumlah publikasi dan pemanfaatan aset intelektual meningkat signifikan sepanjang 2025.
 - d. Pengelolaan manajemen pengetahuan berkontribusi pada capaian institusi dalam Knowledge Management Awards 2025
2. Pengembangan Bahan Ajar dan Studi Kasus
 - a. Buku referensi, modul, dan bahan ajar berbasis studi kasus disusun dan direviu secara akademik.
 - b. Bahan ajar diintegrasikan dengan LMS untuk mendukung pembelajaran berbasis kasus (case-based learning).
 - c. Bahan ajar digital dan microlearning dikembangkan secara kolaboratif dengan prinsip akses terbuka.

3. *Lecturer Performance Assessment and Appreciation*
 - a. *Conducting lecturer performance evaluations covering education, research, community service, and other academic service activities.*
 - b. *Recognizing outstanding lecturers as a means of appreciation and strengthening academic culture.*
4. *Lecturer Assignment Coordination*
 - a. *Coordinating lecturer assignments as resource persons, instructors, and participants in strategic forums through an integrated approach.*
 - b. *Identifying and assessing prospective guest lecturers to enrich learning perspectives.*

Knowledge Management and Learning-System Development

1. *Intellectual-Asset Management and Quality Assurance*
 - a. *Managing intellectual assets and ensuring their quality through the Knowledge Management System.*
 - b. *Establishing an Intellectual Asset Quality Assurance Committee to ensure the quality standards of publications.*
 - c. *Increasing the number of publications and the utilization of intellectual assets significantly throughout 2025.*
 - d. *Contributing to the institution's achievement in the Knowledge Management Awards 2025 through effective knowledge management practices.*
2. *Development of Learning Materials and Case Studies*
 - a. *Academically developing and reviewing reference books, modules, and case-based learning materials.*
 - b. *Integrating learning materials with the Learning Management System (LMS) to support case-based learning.*
 - c. *Developing digital learning materials and microlearning content collaboratively based on open-access principles.*

3. Pengembangan dan Optimalisasi LMS
 - a. E-learning institusi diluncurkan dengan pengembangan modul pembelajaran digital tematik.
 - b. Pemanfaatan LMS meningkat signifikan sepanjang tahun 2025.
 - c. Laporan optimalisasi LMS disusun sebagai dasar pengembangan arsitektur pembelajaran digital.
 - d. Produksi konten digital didukung melalui fasilitas studio dan integrasi sistem pembelajaran.

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN

Pada tahun 2025, PKN STAN kembali mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari:

1. SPMB-PM yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan jenjang pendidikan menengah/ sederajat.SPMB-PM dilaksanakan dengan tahapan berikut.
 - a. Pengumuman seleksi
 - b. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi
 - c. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - d. Seleksi Lanjutan I (Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris, dan Tes Psikologi)
 - e. Seleksi Lanjutan II (Tes Kesehatan dan Kebugaran)
 - f. Seleksi Lanjutan III (Tes Wawancara)

Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur pada setiap tahapan. Rangkaian tahapan dimulai sejak tanggal 28 Juni 2025 yang ditandai dengan pengumuman seleksi pada website PKN STAN. Adapun hasil seleksi SPMB-PM telah diumumkan pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan hasil sebagai berikut.

3. *Development and Optimization of the Learning Management System*
 - a. *Launching the institution's e-learning platform through the development of thematic digital learning modules.*
 - b. *Increasing the utilization of the LMS significantly throughout 2025.*
 - c. *Preparing an LMS optimization report as a basis for the development of the digital learning architecture.*
 - d. *Supporting digital-content production through studio facilities and learning-system integration.*

PKN STAN New Student Admission Selection (SPMB)

In 2025, the PKN STAN once again conducted its new student admission process, which consisted of the following admission pathways:

1. *SPMB for Secondary-Education entrants (PM), an admission pathway intended for graduates of secondary education or its equivalent. SPMB-PM was conducted in the following stages:*
 - a. *Selection announcement*
 - b. *Registration and Administrative Selection*
 - c. *Basic Competency Selection (SKD)*
 - d. *Advanced Selection I (Academic Aptitude Test, English Language Test, and Psychological Test)*
 - e. *Advanced Selection II (Medical Examination and Physical Fitness Test)*
 - f. *Advanced Selection III (Interview)*

The selection process was conducted using an elimination system at each stage. The admission process commenced on 28 June 2025 with the announcement of the selection on the Polytechnic of State Finance STAN website. The results were announced on 24 October 2025, with the following outcomes.

Hasil Kelulusan Seleksi SPMB-PM Tahun 2025

2025 SPMB-PM Selection Results

No.	Program Studi	Jalur Penerimaan			Total
		Reguler	Afirmasi Kewilayahan	Penerbitan	
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan	61	20	39	120
2	Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan	37	21	22	80
3	Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan	249	19	32	300
Total		347	60	93	500

2. SPMB-PT yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan jenjang pendidikan tinggi. SPMB-PT dilaksanakan dengan tahapan, yaitu:
 - a. Pengumuman seleksi
 - b. Seleksi Administrasi dan Pendaftaran;
 - c. Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa Inggris;
 - d. Tes Psikologi; dan
 - e. Tes Wawancara

Hasil kelulusan seleksi SPMB-PT adalah sebagai berikut

2. *SPMB for Higher-Education entrants (PT), new-student admission selection for higher-education graduates. SPMB-PT was conducted in the following stages:*
 - a. *Selection announcement*
 - b. *Registration and administrative screening;*
 - c. *Academic Aptitude Test and English Language Test;*
 - d. *Psychological Test; and*
 - e. *Interview.*

The results were as follows.

Hasil Kelulusan Seleksi SPMB-PT Tahun 2025

2025 SPMB-PT Selection Results

Program Studi	Tatap Muka	Blended Learning
Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan	125	29
Diploma III Akuntansi	62	7
Diploma III Kebendaharaan Negara	21	3
Diploma III Kepabeanan dan Cukai	22	0
Diploma III Manajemen Aset	2	0
Diploma III Pajak	158	11
Diploma III PBB/Penilai	17	0
Total	407	50

PENELITIAN

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh PKN STAN adalah pelaksanaan penelitian. Sepanjang tahun 2025 terdapat 178 penelitian yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) di PKN STAN yang terdiri dari 8 penelitian yang merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dimulai sejak 2024 dan 170 penelitian yang diajukan tahun 2025. Dari 172 penelitian yang telah selesai sampai dengan berakhirnya tahun 2025, terdapat 22 penelitian internal, 94 penelitian kolaborasi, dan 62 penelitian mandiri.

Untuk mengukur kualitas penelitian di PKN STAN, terdapat IKU indeks kualitas penelitian dimana realisasi IKU diukur berdasarkan artikel hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional bereputasi. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat 104 artikel yang terbit pada jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional bereputasi yang terdiri dari:

Rincian Hasil Penelitian Tahun 2025 yang Dipublikasikan

Details of Published 2025 Research Output

No.	Kategori	Jumlah
1	Scopus Q1	1
2	Scopus Q2	4
3	Scopus Q3	3
4	Scopus Q4	3
5	WoS	0
6	Sinta 1	0
7	Sinta 2	14
8	Sinta 3	19
9	Sinta 4	60
Total		104

RESEARCH

Research is one of the core functions carried out by the PKN STAN. Throughout 2025, a total of 178 research projects were managed by the Center for Research and Community Service (PPPM) of the PKN STAN, consisting of 8 projects that were continuations of research initiated in 2024 and 170 projects proposed in 2025. Of the 172 research projects completed by the end of 2025, 22 were internal research projects, 94 were collaborative research projects, and 62 were independent research projects.

To measure research quality at the PKN STAN, a Key Performance Indicator (KPI) on research quality is used. The KPI is measured based on research articles published in accredited national journals and reputable international journals. As of 31 December 2025, a total of 104 articles had been published in accredited national journals and reputable international journals, consisting of:

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program pengabdian kepada masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unggulan dan non-unggulan (reguler) berdasarkan hasil penilaian laporan pengabdian kepada masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2025 total kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah 154 program, dimana 135 program telah selesai dan 19 program lainnya masih berjalan. Dari 135 program yang sudah selesai, 19 program merupakan PkM Kolaborasi; 4 Program kolaborasi dengan DPMD Jawa Timur tentang pendampingan persiapan audit, 3 program kolaborasi dengan DJBC tentang pendampingan ekspor, 5 program kolaborasi dengan DPMD Karanganyar tentang pendampingan BUM Desa, 2 program kolaborasi dengan DPMD Musi Rawas tentang pendampingan BUM Desa, dan 5 program tentang pemanfaatan dana idle BUM Desa.

COMMUNITY SERVICE

Community service programs are divided into two: flagship and non-flagship (regular), based on the assessment of community-service reports. By the end of 2025, total Community Service (PkM) activities numbered 154 programs, of which 135 were completed and 19 were still ongoing. Of the 135 completed programs, 19 were collaborative PkM: 4 collaborative programs with the East Java DPMD on audit-preparation assistance, 3 collaborative programs with DJBC on export assistance, 5 collaborative programs with the Karanganyar DPMD on village-enterprise (BUM Desa) assistance, 2 collaborative programs with the Musi Rawas DPMD on village-enterprise assistance, and 5 programs on the utilization of idle village-enterprise funds.



Learning Organization

Learning Organization

4.9

Dalam rangka meningkatkan kemampuan merespon perubahan dan beradaptasi di lingkungan yang penuh ketidakpastian pada tingkat nasional dan global, Kemenkeu melaksanakan implementasi Organisasi Pembelajar atau Learning Organization (LO). LO merupakan organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar (dalam hal ini adalah SDM Kemenkeu) agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu.

Setiap unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan harus mengimplementasikan Learning Organization. Kegiatan implementasi LO oleh seluruh Unit Eselon I dilaksanakan sepanjang tahun, dengan diasistensi oleh BPPK. Implementasi LO dilaksanakan melalui penerapan sepuluh komponen LO sesuai KMK 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kemenkeu yang terdiri atas: Strategic Fit and Management Commitment; Learning Function Organization; Learners; Knowledge Management Implementation; Learning Value Chain; Learning solutions; Learning spaces; Learners' performance; Leaders' Participation In Learning Process; dan Feedback.

Dalam rangka implementasi LO di lingkungan Kemenkeu tahun 2025, telah dilakukan pengukuran tingkat implementasi LO tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan KMK-2/MK.11/2023 tentang Perubahan Kedua atas

To improve the Ministry of Finance's capacity to respond to change and adapt to uncertainty at both the national and global levels, the Ministry has implemented the Learning Organization (LO) initiative. A Learning Organization (LO) is an organization that systematically facilitates learning among its members, in this case the Ministry of Finance's human resources, enabling them to continuously develop and transform in support of the Ministry's organizational performance.

Each Echelon I Unit within the Ministry of Finance and each non-Echelon organizational unit directly accountable to the Minister of Finance is required to implement the Learning Organization (LO). The implementation of the LO by all Echelon I Units was carried out throughout the year under the guidance of FETA. The LO was implemented through the adoption of the ten Learning Organization components stipulated in Minister of Finance Decree Number 283/KMK.011/2021 concerning the Implementation of the Learning Organization within the Ministry of Finance, namely: Strategic Fit and Management Commitment; Learning Function Organization; Learners; Knowledge Management Implementation; Learning Value Chain; Learning Solutions; Learning Spaces; Learners' Performance; Leaders' Participation in the Learning Process; and Feedback

As part of the implementation of the Learning Organization (LO) within the Ministry of Finance in 2025, the 2025 LO implementation assessment was conducted in accordance with Minister of Finance Decree Number KMK-2/MK.11/2023 concerning the Second Amendment to the Measurement of

pengukuran tingkat implementasi LO. Metode pengukuran yang digunakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari metode survei, self-assessment, dan penilaian komite.

Pengukuran tingkat implementasi LO tahun 2025 telah dimulai sejak bulan September s.d. November 2025 yang didahului dengan survei dan self assessment. Selanjutnya dilakukan validasi self assessment, pendalaman/wawancara, dan penilaian komite LO. Setelah semua proses pengukuran dilakukan, dan hasil pengukuran diolah datanya, dilakukan penyusunan laporan tingkat implementasi LO pada bulan Desember 2025.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai total implementasi LO di BPPK adalah 95,98. Rincian nilai BPPK pada tiga metode penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai pengisian survei (bobot 30%) adalah 95,60;
2. Nilai validasi self assessment (bobot 30%) adalah 100,00; dan
3. Nilai dari penilaian komite LO (bobot 40%) adalah 95,81.

the Level of Learning Organization Implementation. The assessment employed the same methodology as in previous years, consisting of surveys, self-assessments, and committee evaluations.

The 2025 LO implementation assessment was conducted from September to November 2025, beginning with surveys and self-assessments. This was followed by the validation of self-assessment results, in-depth interviews, and evaluations by the Learning Organization Committee. Upon completion of all assessment stages and data processing, the 2025 Learning Organization implementation assessment report was prepared in December 2025.

The assessment results indicate that FETA achieved an overall Learning Organization (LO) implementation score of 95.98. The breakdown of FETA's scores under the three assessment methods is as follows:

1. *Survey score (30% weighting): 95.60;*
2. *Self-assessment validation score (30% weighting): 100.00; and*
3. *Learning Organization Committee evaluation score (40% weighting): 95.81.*





Knowledge Management

Knowledge Management

4.10

Sebagai organisasi yang terus melakukan transformasi, Kementerian Keuangan memiliki segudang data dan pengetahuan, baik yang bersifat eksplisit maupun tacit (melekat pada individu pegawai). Agar pengetahuan tersebut tidak hilang, maka Kementerian Keuangan melakukan serangkaian proses manajemen pengetahuan, yaitu identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebaran, pemanfaatan, dan pemantauan pengetahuan, secara terstruktur dan sistematis. Organisasi mendukung pemelajar untuk melakukan proses manajemen pengetahuan dengan cara memberikan penugasan dan mendorong inisiatif yang tercermin dalam 6 sub komponen berikut.

a. Identifikasi.

Organisasi menentukan pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu untuk didokumentasikan sebagai aset intelektual. Aset intelektual adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi.

b. Dokumentasi.

Organisasi melakukan kegiatan pendokumentasian pengetahuan (knowledge capture) untuk menghasilkan aset intelektual. Aset intelektual ini dapat dituangkan dalam bentuk audio, visual, dan/atau audiovisual.

c. Pengorganisasian.

Organisasi menata aset intelektual dan melakukan penjaminan mutu. Penataan aset intelektual ini dapat dilakukan dengan cara katalogisasi, klasifikasi, penyusunan abstraksi, dan pemberian indeks.

As an organization undergoing continuous transformation, the Ministry of Finance possesses a wealth of data and knowledge, both explicit and tacit (embedded within individual employees). To ensure that this knowledge is not lost, the Ministry of Finance carries out a structured and systematic knowledge management process consisting of the identification, documentation, organization, dissemination, utilization, and monitoring of knowledge. The organization supports learners in carrying out the knowledge management process by assigning responsibilities and encouraging initiatives, as reflected in the following six sub-components.

a. Identification

The organization identifies knowledge that meets specific criteria to be documented as intellectual assets. Intellectual assets are knowledge that has been collected and documented in a form that facilitates understanding, sharing, and application by others, thereby providing value to both employees and the organization.

b. Documentation

The organization carries out knowledge capture activities to produce intellectual assets. These intellectual assets may be presented in audio, visual, and/or audiovisual formats.

c. Organization

The organization organizes intellectual assets and performs quality assurance. This process may include cataloguing, classification, abstract preparation, and indexing.

d. Penyebarluasan.

Organisasi menyediakan aset intelektual pada sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system/KMS).

e. Penerapan.

Organisasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengaplikasian atau pemanfaatan aset intelektual oleh pengguna KMS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

f. Pemantauan.

Organisasi memastikan kesesuaian antara aset intelektual yang terdapat dalam KMS dengan kebutuhan penggunanya.

d. Dissemination

The organization makes intellectual assets available through the Knowledge Management System.

e. Implementation

The organization provides opportunities for KMS users to apply and utilize intellectual assets in support of their respective duties and functions.

f. Monitoring

The organization ensures that the intellectual assets available in the KMS remain aligned with users' needs.

Pada tahun 2025, kembali dilakukan pengukuran Tingkat Maturitas Manajemen Pengetahuan dengan menggunakan pendekatan Asian Productivity Organization Knowledge Management Framework (APO KM Framework) dengan kriteria maturitas level 1 (reaction) s.d. level 5 (maturity). Dari pengukuran yang dilakukan melalui 42 pertanyaan, diperoleh hasil bahwa manajemen pengetahuan di BPPK berada pada level 5 (maturity) dengan skor 205 dari nilai maksimal 210. Hal ini menunjukkan bahwa BPPK telah mengimplementasikan manajemen pengetahuan secara optimal.

In 2025, the Knowledge Management Maturity Level was once again measured using the Asian Productivity Organization Knowledge Management Framework (APO KM Framework), which defines five maturity levels ranging from Level 1 (Reaction) to Level 5 (Maturity). Based on the assessment, which consisted of 42 questions, FETA achieved Level 5 (Maturity) with a score of 205 out of a maximum possible score of 210. This result demonstrates that FETA has implemented knowledge management at an optimal level.



Whistle Blowing System

Whistle Blowing System

4.11

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kemenkeu bagi pelapor yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkeu Republik Indonesia. Pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kemenkeu akan merahasiakan identitas diri Pelapor sebagai whistleblower. Kemenkeu menghargai informasi yang dilaporkan. Fokusnya adalah kepada materi informasi yang dilaporkan saja. Tata Cara Pelaporan ada 9 (sembilan) tahapan yang sudah tercantum pada home page www.wise.kemenkeu.go.id. Sepanjang tahun 2025, terdapat 24 (dua puluh empat) aduan masuk melalui WISE Kemenkeu dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh BPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Whistleblowing System (WISE) is an application provided by the Ministry of Finance to facilitate the reporting of alleged violations occurring within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Reporters can submit reports without concern that their identities will be disclosed, as the Ministry of Finance ensures the confidentiality of whistleblowers' identities. The Ministry values every report submitted and focuses on the substance of the information provided. The reporting procedure consists of nine stages, which are available on the WISE homepage. Throughout 2025, FETA received 24 reports through WISE, all of which were followed up in accordance with the applicable regulations.

Keterbukaan Informasi Publik

Public Information Disclosure

4.12

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPPK sebagai badan publik terus berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan bahwa BPPK merupakan bagian dari Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dengan Sekretaris BPPK sebagai PPID Tingkat I BPPK.

PPID di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang secara operasional unit pengelola layanan informasi Publik di PPID Tingkat I BPPK dilaksanakan oleh Subbagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama pada Bagian Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Kerja Sama.

OVERVIEW OF PUBLIC INFORMATION SERVICE POLICY

As a public institution, FETA is committed to fulfilling the public's information needs by providing services in accordance with established service standards. In accordance with Minister of Finance Decree Number 300 of 2025 on the Appointment of Information and Documentation Management Officers within the Ministry of Finance, FETA was established as part of the Ministry of Finance's Information and Documentation Management Officer (PPID), with the Secretary of FETA appointed as the Level I PPID of FETA.

The PPID within the Ministry of Finance performs their functions in accordance with the applicable laws and regulations. Operationally, the Public Information Services Unit at the Level I PPID of FETA is administered by the Subdivision of Communication, Information Services, and Cooperation of the Division of Knowledge Management, Communication, and Cooperation.

STRUKTUR PERANGKAT PPID TINGKAT I BPPK

Petugas layanan PPID di lingkungan BPPK terdiri dari:

1. Sekretariat Badan sebagai unit pengelola layanan informasi publik PPID Tingkat I BPPK;
2. Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai unit pengelola layanan informasi Publik PPID Tingkat II BPPK;
3. Seluruh Balai Diklat Keuangan di lingkungan BPPK sebagai unit pengelola layanan informasi Publik PPID Tingkat III BPPK; dan
4. Seluruh Pusat di lingkungan BPPK sebagai penyedia dan pengelola informasi.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE LEVEL I PPID OF FETA

The PPID service officers within FETA consist of:

1. *Secretary of the Agency as the public information services management unit Level I PPID of FETA;*
2. *PKN STAN as the public information services management unit Level II PPID of FETA;*
3. *All Regional Campus of Finance Education and Training in FETA as the public information services management unit Level III PPID of FETA; and*
4. *All Center within FETA as the information providers and managers.*





GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan layanan informasi, BPPK menyediakan beberapa kanal yang dapat digunakan untuk mengelola pertanyaan, memberikan bantuan atas pertanyaan yang diberikan oleh pemohon informasi dan memberikan laporan untuk peningkatan pelayanan. Kanal tersebut terdiri atas:

1. Call Center 134, dan
2. Aplikasi Kemenkeu PRIME yang dapat diakses melalui website BPPK dan Kemenkeu Learning Center (KLC).

Selain melalui kanal sebagaimana dimaksud, BPPK juga mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, melalui pemanfaatan KLC sebagai Learning and Knowledge Management System yang menyediakan pembelajaran dan dokumen pengetahuan untuk mendukung pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara yang tidak hanya dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan, namun dapat pula diakses oleh masyarakat umum. Melalui pemanfaatan KLC tersebut,

OVERVIEW OF PUBLIC INFORMATION SERVICE IMPLEMENTATION

In providing public information services, FETA offers several communication channels to manage inquiries, provide assistance in responding to inquiries submitted by information applicants, and provide feedback for service improvement. These channels include:

1. *Call Center 134, and*
2. *The MoF PRIME application, accessible via FETA website and MoF Learning Center (KLC).*

In addition to these channels, FETA also supports the implementation of public information disclosure through the use of KLC as a Learning and Knowledge Management System that provides learning and knowledge documents to support competency development in state finance, accessible not only to Ministry of Finance employees but also to the general public. By using KLC, public

diharapkan masyarakat dapat memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance.

is expected to have the opportunity to participate in various public initiatives, while encouraging the creation of clean and good governance.

STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPPK TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, PPID Tingkat I BPPK menerima dan memproses layanan permohonan informasi publik yang masuk melalui aplikasi e-PPID, e-mail ppidbppk@kemenkeu.go.id, permohonan informasi publik yang diteruskan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku PPID Kementerian 101 Keuangan serta melayani dengan terbuka jika ada pemohon yang datang secara langsung. Selain melalui kanal PPID dimaksud, permintaan informasi terkait BPPK juga dilayani melalui Call Center 134, dan melalui aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Kemenkeu PRIME yang dapat diakses pada KLC dan website BPPK.

Permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Tingkat I BPPK pada tahun 2025 sejumlah total 33 (tiga puluh tiga) pemohon, dengan komposisi topik permohonan sebagai berikut:

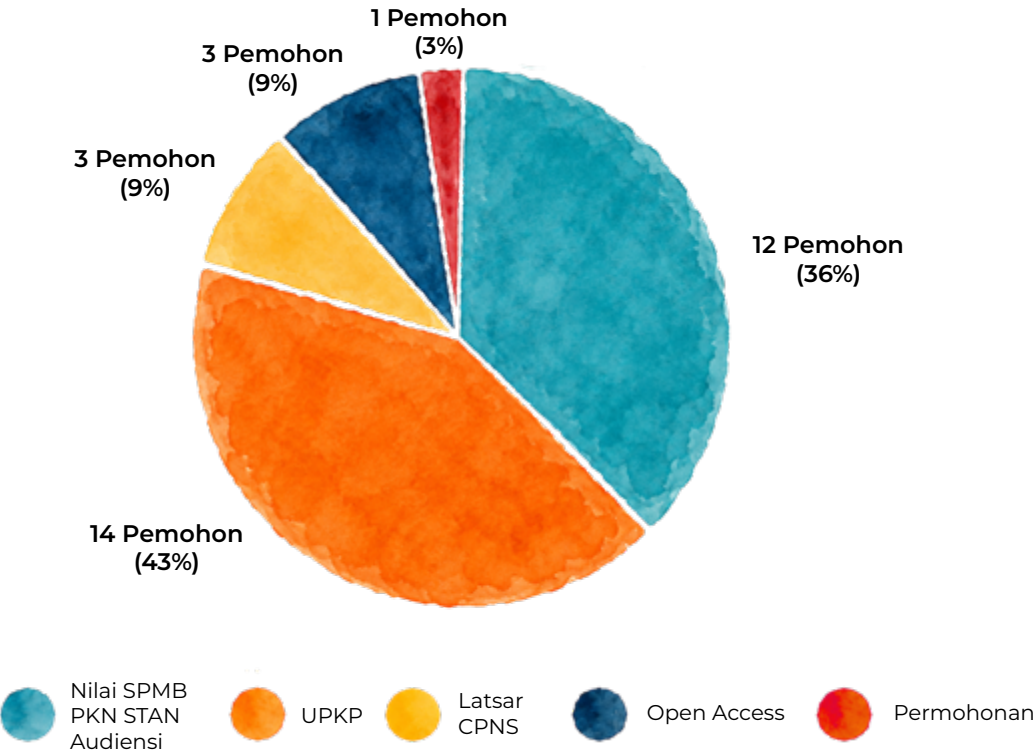
1. Permintaan informasi terkait UPKP sebanyak 14 (empat belas) pemohon;
2. Permintaan informasi terkait nilai SPMB PKN STAN sebanyak 12 (dua belas);
3. Permintaan informasi terkait Latsar CPNS sebanyak 3 (tiga) pemohon;
4. Permintaan Informasi terkait Open Access sebanyak 3 (tiga) pemohon; dan
5. Permintaan Informasi terkait Permohonan Audiensi sebanyak 1 (satu) pemohon.
6. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh permintaan informasi terkait nilai SPMB PKN tidak dapat diproses dikarenakan ketidaklengkapan dokumen surat kuasa

FETA PUBLIC INFORMATION SERVICES STATISTICS OF 2025

Throughout 2025, the Level I PPID of FETA received and processed public information requests submitted through the e-PPID application, the email address ppidFETA@MoF.go.id, public information requests forwarded by the Bureau of Communication and Information Services of the Secretariat General in its capacity as the Ministry of Finance's PPID, and any requesters who came in person. In addition to the PPID channels, requests for information related to FETA are also handled through Call Center 134 and the Ministry of Finance PRIME Customer Relationship Management (CRM) application, accessible on KLC and the FETA website.

In 2025, the Level I PPID of FETA received a total of 33 (thirty-three) public information requests, categorized as follows:

1. *Fourteen (14) information requests related to Rank Promotion Adjustment Examination (UPKP);*
2. *Twelve (12) information requests related to New Student Admission Selection (SPMB) of PKN STAN;*
3. *Three (3) information requests related to Basic Training for Civil Service Candidates (CPNS);*
4. *Three (3) information requests related to Open Access; and*
5. *One (1) information request concerning a request for an audience;*
6. *Of the total requests received, seven (7) requests concerning PKN STAN SPMB scores could not be processed due to incomplete power-of-attorney documentation submitted by the applicants.*



Seluruh dari jumlah tersebut telah diproses oleh BPPK selaku PPID Tingkat I sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan tahapan sebagai berikut:

1. menerima permohonan secara tertulis melalui media elektronik dan/ atau nonelektronik;
2. memastikan Pemohon memenuhi persyaratan Permintaan Informasi Publik;
3. memeriksa kelengkapan Permintaan Informasi Publik;
4. mengadministrasikan Permintaan Informasi Publik; dan
5. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.

All of the requests were processed by FETA as Level I PPID in accordance with Public Information Services Guidelines for the PPID within the Ministry of Finance. The processing stages are as follows:

1. *Receiving written requests through electronic and/or non-electronic media;*
2. *Ensuring that applicants meet the requirements for public information requests;*
3. *Verifying the completeness of public information requests;*
4. *Administering the public information requests; and*
5. *Issuing written notifications to the applicants.*





BAB 5

KEMITRAAN STRATEGIS

STRATEGIC PARTNERSHIPS





Nota Kesepahaman

Memorandum of Understanding (Mou)



5.1

Daftar Nota Kesepahaman/
MoU Kepala BPPK Tahun 2025

List of MoU
Signed by
Head of FETA
in 2025

No.	Nama Mitra Partner	Mengenai Subject	Keterangan Notes
1	Badan Pengelola Keuangan Haji	Nota Kesepahaman antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Nomor: 12/MOU-BPKH/III/2025 Nomor: NK-0100/2025 Senin, 3 Maret 2025	a. Pertukaran data dan informasi; Sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi PARA PIHAK; b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia; c. Penyelenggaraan pengkajian/penelitian bersama; d. Penyediaan narasumber, tenaga ahli, dan/atau konsultan; dan/atau e. Kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK
2	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Nota Kesepahaman antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 100.4.5.1/656/IPDN Nomor: PRJ-03/PP/2025	a. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi b. edukasi dan publikasi c. konsultasi dan pendampingan d. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi e. pengembangan kurikulum pendidikan f. kajian/penelitian bersama g. manajemen pengetahuan
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kementerian Pertahanan Nomor : PRJ-04/PP/2025 dan Nomor: PKS/29/IX/2025 2 September 2025	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara bagi CPNS Kemenkeu TA 2025

No.	Nama Mitra Partner	Mengenai Subject	Keterangan Notes
4	Universitas Andalas	Kemitraan Strategis dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: NK-04/PP/2025 Nomor: B/141/UN16/HK.10.00/2025 14 Agustus 2025	a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat b. pengembangan sumber daya manusia c. program pendidikan tinggi berdampak d. penyerapan lulusan e. kegiatan dosen tamu praktisi industri f. resource sharing sarana dan prasarana g. penyelenggaraan teaching factory/innovation center h. mendukung reputasi global PARA PIHAK i. kerja sama pengabdian kepada masyarakat dan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR)/tanggung jawab sosial lingkungan j. pengelolaan kawasan bisnis dan aset untuk mendukung ketersediaan dan pendidikan k. kegiatan lainnya yang disepakati
5	Universitas Jenderal Soedirman	Kemitraan Strategis dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat b. pengembangan sumber daya manusia c. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan

Selain nota kesepahaman yang dilakukan antara Kepala Badan dengan mitra, sepanjang tahun 2025 unit-unit kerja di BPPK juga melaksanakan perjanjian kerja sama atau MoU dengan mitra yang berasal dari Kementerian/Pemerintah Daerah/Universitas baik dalam bentuk pelatihan, tridharma perguruan tinggi ataupun pelaksanaan tugas lainnya.

Berikut ini adalah beberapa MoU yang dilakukan oleh unit Kerja di BPPK sepanjang tahun 2025.

In addition to memorandum of understanding signed by the Head of the Agency with partner institutions, throughout 2025, work units within FETA also entered into cooperation agreements or MoUs with various partners, including ministries, local governments, and universities. These collaborations were conducted in the form of training programs, the Three Pillars of Higher Education (Education, Research, Community Service), as well as the implementation of other organizational duties and functions.

The following are several MoUs undertaken by FETA units throughout 2025.

Daftar Nota Kesepahaman/ MoU Unit Eselon II di BPPK Tahun 2025

List of MoU Signed by Echelon II Unit in FETA in 2025

No.	Unit di BPPK FETA Unit	Mitra Partners	Mengenai Subjects	Keterangan Notes
1	Pusdiklat KM	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan	Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Pekerjaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun 2025	Angkatan I: 16 s.d. 19 September 2025 Angkatan II: 30 September s.d. 3 Oktober 2025 Angkatan III: 2 s.d. 5 Desember 2025
2	Pusdiklat KM	Kementerian Kesehatan	Permintaan Pengajar PJJ Manajemen Kinerja	September 2025
3	Pusdiklat KM	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemanfaatan Konten E-learning Transformasi Digital	September - Oktober 2025
4	Pusdiklat KP	1. Universitas Andalas 2. Universitas Udayana 3. Universitas Padjajaran 4. Universitas Jenderal Soedirman 5. Universitas Brawijaya 6. Universitas Airlangga	Pembentukan Pusat Studi Keuangan Publik (Center for Public Finance Research)	Februari - Desember 2026

No.	Unit di BPPK FETA Unit	Mitra Partners	Mengenai Subjects	Keterangan Notes
5	Pusdiklat KP	Biro Kepegawaian Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Pelatihan	1-18 Desember 2025
6	Pusdiklat Pajak	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor	Tridarma Perguruan Tinggi	-
7	Pusdiklat Pajak	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Tridarma Perguruan Tinggi	-
8	Pusdiklat BC	WCO Regional Office for Capacity Building Asia/Pacific (ROCB A/P) dan Regional Training Centers (RTCs) Asia Pacific	Pelatihan	1 s.d. 3 Oktober 2025
9	Pusdiklat BC	World Customs Organization (WCO)	Pelatihan	14 s.d. 17 April 2025
10	Pusdiklat BC	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	Pelatihan	1. Training on Small Craft Surveillance System for Asia Pacific Customs Administration Officers: 28 Oktober s.d. 5 November 2025 2. Training on Passenger Assessment for Asia Pacific Customs Administration Officers Operational and Managerial Level: 19 s.d. 25 November 2025
11	Pusdiklat BC	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU)	Pelatihan	1. Pelatihan Teknis Kepabeanan Bagi Perwira TNI AU: 6 s.d. 16 Oktober 2025 2. Pelatihan Teknis Investigasi Internal dan Teknik Penyidikan Menggunakan Teknologi Bagi Perwira Penyidik Polisi Militer Angkatan Udara: 22 September s.d. 2 Oktober 2025

No.	Unit di BPPK <i>FETA Unit</i>	Mitra <i>Partners</i>	Mengenai <i>Subjects</i>	Keterangan <i>Notes</i>
12	Pusdiklat BC	Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pelatihan	Open Access (sepanjang tahun 2025) 1. Microlearning Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia 2. Microlearning Impor Barang Pindahan Pekerja Migran Indonesia 3. Microlearning Impor dan Ekspor Barang Bawaan Penumpang Pekerja Migran Indonesia
13	Pusdiklat BC	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK)	Pelatihan	Workshop Pengawasan BPO dan Hydrofluorocarbon (HFC): 16 s.d. 18 Juni 2025 (Angkatan I), 2 s.d 4 Desember 2025 (Angkatan II)
14	PKN STAN	Pemprov Papua Barat Daya	Pelatihan Pengelolaan BMD	25 Maret 2025
15	PKN STAN	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan	Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Politeknik Keuangan Negara STAN	24 April 2025
16	PKN STAN	Pemerintah Kabupaten Sukamara	Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Politeknik Keuangan Negara STAN	23 Mei 2025
17	PKN STAN	TNI AU	Pelatihan Penilaian Properti dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi SIMAN	4 Februari 2025

No.	Unit di BPPK <i>FETA Unit</i>	Mitra <i>Partners</i>	Mengenai <i>Subjects</i>	Keterangan <i>Notes</i>
18	PKN STAN	Poltekkes Jakarta	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis	9 September 2025
19	PKN STAN	Berbagai Pemerintah Daerah	Pembibitan	Pemkab Grobogan, Musi Banyuasin, Kusud, Subang Karawang, Papua Barat Daya, Tanag Laut, Muara Enim, Pali, Tegal, Kutai Kertanegara, Kayong Utara dll.





Tim Penyusun

Editorial Team

Pengarah
Director

: Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, **Dwi Teguh Wibowo**
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, **Wahyu Kusuma Romadhoni**

Penanggung Jawab
Chief Committee

: Kepala Bagian Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Kerja Sama, **Arfiansyah Darwin**

Koordinator
Coordinator

: Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi, **Lili Mutiary**
Kepala Subbagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama, **Haris Nur Bambang**

Desain Grafis
Graphic Design

: **Miftahul Rizkiyah, Ivan Rizki Arviandi, Thalia Maudina**

Redaksi
Editorial

: **Bambang Eko Febrianto, Dwi Yan Septika, Dea Rizky Amanda Panjaitan, Novar Lanang Maulana, Immanuel Christian Tambunan, Agung Adhi Prabowo, Satria Aji Setiawan, Aziz Rlvanto, Aristito Febrianto, Kenya Laras Kirana, Irma Suryani Lubis, Phesona Elok Brillyananda Toruan, Gilang Suci Nugraha, Marini, Iva Kurnia Dewi, Dina Khairunnisa, Herry Samudro, Ardiana Dwi Endah Puspaningtyas, Rio Tri Wibowo, Sri Chairina, Siti Radhiatan Mardiah Daulay, Kusuma Aji Nugraha, Anang Maulana, Arief Sugiri, Irawati Nur Utami, Shinta Damayanti, Yoga Eginanda.**

Kontributor Foto
Photo Contributor

: **Tim Humas BPPK, Tim Media Sekretariat Badan, Tim Media Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Tim Media Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, Tim Media Pusdiklat Pajak, Tim Media Pusdiklat Bea dan Cukai, Tim Media Pusdiklat Keuangan Publik, Tim Media Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, Tim Media Politeknik Keuangan Negara STAN, Tim Media BDK Medan, Tim Media BDK Pekanbaru, Tim Media BDK Palembang, Tim Media BDK Cimahi, Tim Media BDK Yogyakarta, Tim Media BDK Malang, Tim Media BDK Denpasar, Tim Media BDK Pontianak, Tim Media BDK Balikpapan, Tim Media BDK Makassar, Tim Media BDK Manado.**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jl. Purnawarman No 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12110

Telp. Kemenkeu Prime: 134
www.bppk.kemenkeu.go.id

